

- WIFE ABUSE

- FAMILY VIOLENCE

**PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN EKONOMI**  
**Diskursus Mengenai Kekerasan dan Negosiasi Peran**  
**Perempuan Korban Kekerasan Ekonomi**

**B**

**SKRIPSI**

Fis 3 34/06

Fir

P



Oleh :

**Febriana Firdaus**

**(070116543)**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**

**2006**

**PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN EKONOMI**  
**Diskursus Mengenai Kekerasan dan Negosiasi Peran**  
**Perempuan Korban Kekerasan Ekonomi**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat**  
**dalam memperoleh gelar sarjana ilmu sosial dan ilmu politik**

Oleh :

**Febriana Firdaus**

**(070110002)**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**

**2006**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji  
Pada Tanggal 12 Juni 2006

Panitia Penguji

Ketua



*Dwi Narwoko*  
Drs. Dwi Narwoko  
NIP. 130 355 365

Anggota

Drs. Sudarso, Msi  
NIP. 132 014 462

Anggota

Dr. Emy Susanti  
NIP. 131 406 097



**Aku persembahkan skripsi ini untuk yang telah menemaniku dan mengisi hatiku saat resah dan gelisahku mengerjakan skripsi ini.**



**Identitas itu tidak pernah ABSOLUT**

**-Edward William Said-**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah....segala puji bagi Allah, Zat yang tak pernah tidur dan Maha Mengetahui isi hati hambanya. Akhirnya, dengan ijinNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Berawal dari kebiasaan penulis yang aneh dan pemikiran yang nyleneh lahirlah skripsi ini. Skripsi yang penuh dengan perdebatan dan pergolakan hidup penulis. Skripsi yang mungkin masih akan dimarjinalkan dalam dunia akademis, alias skripsi yang kurang 'diinginkan' dan diharapkan. Akhirnya, penulis mendapatkan banyak pengalaman dengan adanya skripsi ini, bahwa hidup itu harus realistis dan bukan sebuah utopia. Kegilaan demi kegilaan tulisan dari penulis kemudian membuahkan sebuah diskusi yang boleh diperdebatkan oleh generasi berikutnya. Kegilaan mengenai kanon maskulin dari bahasa sebagai labirin kekuasaan bagi seksualitas feminin. Tulisan yang akan menginspirasi baik laki-laki maupun perempuan untuk berpikir diluar 'kotak'. Tulisan yang dekonstruktif yang akan membakar 'semangat' para pejuangan tangguh, bahwa kami (perempuan) punya 'ramuannya' alias 'obat penawarnya'. Dan tulisan yang akan mungkin membuat yang membaca mengidap disorientasi diri, semoga.....

Karya tulis yang sederhana ini bagi penulis tidak akan 'berharga' tanpa melibatkan banyak pihak. Maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 'mencampuri' skripsi ini jadi lebih berwarna :

- Ibu dan Bapak yang tentu saja tidak pernah akan paham isi dari skripsiku ini, tapi jujur semua ini terinspirasi dari kalian berdua, semoga langgeng....
- Prof. Hotman Siahaan, selaku Dekan FISIP UNAIR, sayang sekali pak saya cuman sekali diajar sama bapak.....dan itu sudah cukup untuk mencuci otak saya.....
- Pak Dwi, selaku KPS, maaf pak kalau selalu membuat heran dan geleng-geleng kepala terus.....saya emang suka nelat pak....
- Pak Herwanto, dosen waliku yang super baik, pak baru kali ini saya bisa menemukan tandingannya superMan, ya bapak ini....
- Bu Emi, selaku dosen pembimbing, bimbingan-bimbingan kilat yang telah ibu berikan akan selalu saya ingat, terima kasih banyak bu atas waktu luangnya untuk saya....

- Ibu Bapak Dosen di Sosiologi yang telah memberi banyak ilmu untuk melengkapi kenjlimetan skripsi ini.....terima kasih bu...pak....
- Civitas Akademika FISIP UNAIR, mbak-mbak di rujukan, akademik, dan ikoma yang sabar menghadapi saya yang agak nekat....
- Kedua informan saya yang mau meluangkan waktu dan hatinya untuk saya, terima kasih sudah berlapang dada untuk saya dan skripsi saya....
- Dan pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.....

Sidoarjo, 10 Agustus 2006

Penulis





**Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya  
untuk keluarga Drh. Agus Prijono dan Drs. Yuniarsih  
atas bantuannya selama ini.  
Mbak Yun matur nuwun atas pertanyaan-pertanyaannya yang  
menohok tapi membangun semangatku yang rapuh  
" Yo' opo skripsimu fir..."  
Dek Angga atas pinjaman komputernya, maaf ya banyak virusnya,  
printernya, maaf ya kalau sering error, dan terutama  
kamarnya....maaf berantakan!**



Terima kasih juga buat teman-temanku, sahabat-sahabatku,  
Galuh, ita'  
Emma, Sri, Lina, Eli, Wita, Weni  
Desi, where are you?  
Tantri Putri Hapsari  
Emak dan anak-anaknya  
Tika, Lely, binti, Ndah, Ende, Inggit, Silvi, Barir,  
Ismi, Ana, denok, rosi, plum, dian plum, dan gengnya  
Peti, ica, ani, ivana, intan, nike, mala, ayudita, dian, ratih, ningsih, arie,  
cicil, miauw, anita, ana, mb ifah, luthfia, iis, cinthya, firdiyah, nurul  
Dinar, anang, aang, papi, edi, adi, cak ek dan sepeda balapnya, munuk,  
rigga, putra, wahyu, arwan, fahrizal, somat, matul, aries  
Yani, Elisa, luki, dan Grace yang sudah mau jadi gila waktu KKN  
Bu Teti, tempat sarapan, makan siang, dan sore....btw, saya nggak punya  
utang lo bu...  
Bpk-bpk yang njaga kelas plus pak tukang parkir, maaf pak suka nggak  
bayar...emang sengaja

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR MOTTO</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Kajian Penelitian	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan	9
1.3.2 Manfaat	9
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	<b>11</b>
2.1 Kuasa dan Wacana dalam Foucault	11
2.2 Dekonstruksi Ala Foucault, Lacan, Derrida dan Teori Feminisme	20
2.3 Akusisi Gender Freud	23
2.4 Lacan : Penanda, Tatahan Simbolik, dan <i>The Other</i>	24
2.5 Derrida : Destabilisasi Logosentrisme dan Logika Biner	25
2.6 Revolusi Hasrat Deleuze-Guattari	27
2.7 Psikoanalisa Luce Irigaray	31
2.8 Helena Cixous dan <i>Ecriture Feminine</i>	34
2.9 Julia Kristeva : Bahasa dan Subyek yang Terganggu	35
<b>BAB III METODOLOGI</b>	<b>40</b>
3.1 Analisis Wacana Foucauldian	40
3.2 Pemilihan Informan	42
3.3 Konsep Penelitian	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data	47
<b>BAB IV PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN EKONOMI</b>	<b>49</b>
4.1 Perempuan Indonesia dan Permasalahannya	49
4.2 Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	54
4.3 Perempuan Surabaya dan Kekerasan ekonomi	63
<b>BAB V PROFIL PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN EKONOMI</b>	<b>71</b>
<b>BAB VI DISKURSUS MENGENAI KEKERASAN</b>	<b>86</b>

<b>BAB VII NEGOSIASI PERAN</b>	<b>112</b>
<b>BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>128</b>
8.1 Kesimpulan	128
8.2 Saran	129
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Kasus KDRT LBH APIK Jakarta Tahun 2004	57
Tabel 2	Jenis Kasus Kekerasan Yang Ditangani PSW Unair April 2002-Desember 2004	66
Tabel 3	Bentuk pelayanan yang diberikan dalam penyelesaian kasus oleh PSW Unair tahun 2002-2004	67
Tabel 4	Relasi Pelaku Terhadap Korban Periode tahun 2002-2004	68
Tabel 5	Dampak yang Dialami Korban	69



## ABSTRAK

Diskursus mengenai kekerasan terhadap perempuan menjadi semakin hangat seiring dengan dikeluarkannya UU No. 23 Th 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebuah respon yang cukup bagus bagi semakin maraknya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Walaupun, tingkat permisifitas masyarakat di Indonesia masih sangat rMawar terhadap kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan. Namun, setidaknya undang-undang ini menjadi "pintu masuk" perempuan (terutama aktivis pejuang hak-hak perempuan) untuk mencoba mendekonstruksi wacana yang cenderung menggampangkan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat. Bahwa sudah saatnya perempuan mengakhiri pengingkarnya sendiri tentang kekerasan yang dialaminya.

Laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tentang situasi kekerasan yang dihadapi perempuan sepanjang tahun 2004 memberi gambaran buram terhadap situasi kekerasan yang dialami perempuan. Laporan ini dipublikasikan Komnas Perempuan pada hari Senin (14/03/05) di harian Kompas memperlihatkan jumlah kekerasan terhadap perempuan (KTP) naik secara konsisten dari tahun ke tahun. Dalam laporan tersebut juga menyebutkan bahwa KTP terbanyak terjadi di dalam rumah atau komunitas sebanyak 6.634 kasus (47,3%), yaitu kekerasan di dalam rumah sebanyak 4.310 kasus (30,7%) dan di tingkat komunitas 2.479 kasus (17,6%), sedangkan *trafficking* 562 kasus (4%), dan 302 kasus (2,1%) yang dilakukan oleh aparat negara. Tempat terjadinya kekerasan tersebut di dalam rumah, dalam proses migrasi, dalam pengelolaan sumber daya alam, dalam konflik bersenjata, dan dalam keterkaitannya dengan politisasi identitas agama. Dan dari 2.453 kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah, 1.782 kasus terjadi pada istri.

Sedangkan data kekerasan dalam rumah tangga periode terbaru yaitu 25 November 2003-25 November 2004 yang disarikan KPPD dari harian memorandum menunjukkan 42 dari 45 kasus masih memiliki hubungan sebagai istri dengan pelaku. Berdasarkan jenis kekerasannya, 34 kasus kekerasan fisik, 19 kasus kekerasan psikis, 6 kasus kekerasan seksual. Yang menarik adalah kekerasan psikis didominasi oleh kasus penelantaran istri atau istri tidak dinafkahi. Kekerasan jenis ini dapat digolongkan kekerasan ekonomi.

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti merasa sangat tertarik untuk mencoba menggali kembali permasalahan mengenai kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini adalah sebuah penelitian lanjutan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erlina Maya Novrita (2000), guna memperkaya literatur mengenai berbagai permasalahan kekerasan dan hubungannya dengan relasi kuasa.

Oleh karena itu melalui penelitian ini peneliti hendak melakukan analisis terhadap wacana perempuan korban kekerasan ekonomi mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui bagaimana perempuan korban kekerasan ekonomi ini melakukan negosiasi terhadap perannya baik sebagai *wife* maupun *housewife*.

Penelitian ini *pertama*, bertujuan untuk melakukan analisis terhadap praktik-praktik diskursif kuasa terhadap wacana perempuan korban kekerasan ekonomi mengenai kekerasan. Dan yang *kedua* untuk mengetahui bagaimana perempuan korban kekerasan ekonomi melakukan negosiasi terhadap perannya sebagai *wife* maupun *housewife*.

Untuk menjawab permasalahan pertama mengenai diskursus kekerasan, peneliti menggunakan analisis Foucauldian dan subordinasi femininnya Julia Kristeva. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua peneliti akan menggunakan psikoanalisa Luce Irigaray yang banyak dipengaruhi psikoanalisis Lacan dan dekonstruksinya Derrida. Walaupun peneliti menggunakan psikoanalisa Irigaray, tidak berarti membatasi peneliti dalam memakai skizoanalisa Deleuze dan Guattari dalam menganalisis ketergantungan ekonomi pada perempuan.

Dari pembahasan mengenai definisi kekerasan, jenis kekerasan dan wacana-wacana dan mitos-mitos perempuan yang berkembang, peneliti melihat bahwa ternyata perempuan itu hanya hadir (terutama dalam serat Wararetno) dalam diskursus mengenai seksualitas dan 'keluarga suci'.

Dalam falsafah Jawa ketika kita bicara perempuan, maka yang ada hanyalah masalah orientasi seksualitas perempuan yang harus 'dijaga' atau lebih miripnya 'dikontrol'. Sedangkan dalam mitos perempuan modern, perempuan mengalami kekerasan secara simbolik. 'Keberhasilan' perempuan dalam dunia nyata, seringkali tidak merubah posisionalitas perempuan secara psikis atau dalam dunia simbolik. Karena simbolik telah direpresentasikan oleh "The Name Of The Father" atau atas nama ayah.

Perempuan korban kekerasan ekonomi, dalam kemampuan metabahasanya memang tidak memadai. Selain karena terjebak oleh phallosentris, akses ekonomi memang lebih direpresentasikan oleh dunia maskulin. Tetapi dalam dunia ekonomi yang maskulin itu, hadirnya perempuan tetap lebih marginal dari laki-laki, walaupun mungkin tidak semua perempuan marginal secara nyata (karir, jabatan) namun secara simbolis, perempuan tetap diidentikkan dengan kekhasan femininnya (yang dianggap negatif). Perempuan memang bisa setara dengan laki-laki, dan dia akan menjadi sesuatu yang berpotensi menjadi laki-laki. Definisi patriarkal seperti inilah yang menurut Irigaray menyebabkan perempuan kehilangan sentuhannya dengan feminitas esensialnya yang terletak di dalam tubuh perempuan.

Hampir tidak ada ruang bagi perlawanan di dalam pengertian 'tatanan simbolik', dan perempuan yang tidak merepresi sifat keperempuanannya yang sejati, tidak bisa memiliki akses untuk itu. Begitu juga dengan perempuan korban kekerasan ekonomi, mereka terjebak oleh bahasa, dalam dunia simbolik, dan bila mereka tidak merepresentasikan femininnya menurut definisi patriarkal mereka (terutama bagi mbak Melati yang sudah bercerai) tidak akan mendapat akses dalam dunia nyata. Paling tidak mereka tidak lagi didefinisikan dari sudut kekurangannya (tidak lengkap, dsb). Bagaimana perempuan-perempuan korban kekerasan ini tidak lagi didefinisikan secara patriarkal, sehingga mereka bisa menemukan bahasanya sendiri dan menemukan identitas femininnya.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Diskursus mengenai kekerasan terhadap perempuan menjadi semakin hangat seiring dengan dikeluarkannya UU No. 23 Th 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebuah respon yang cukup bagus bagi semakin maraknya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Walaupun, tingkat permisifitas masyarakat di Indonesia masih sangat rendah terhadap kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan. Namun, setidaknya undang-undang ini menjadi "pintu masuk" perempuan (terutama aktivis pejuang hak-hak perempuan) untuk mencoba mendekonstruksi wacana yang cenderung menggampangkan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat. Bahwa sudah saatnya perempuan mengakhiri pengingkarnya sendiri tentang kekerasan yang dialaminya.

Ada empat macam kekerasan terhadap perempuan yang secara umum seringkali ditemukan di masyarakat kita, yaitu *physical abuse*, *marital abuse*, *psycho abuse*, dan *economic abuse*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuningsih (2001) terhadap 15 pasangan bermasalah didapati bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, mencakup : kekerasan langsung dan tak langsung, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, dan gabungan tiga kekerasan tersebut di atas.



Laporan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tentang situasi kekerasan yang dihadapi perempuan sepanjang tahun 2004 memberi gambaran buram terhadap situasi kekerasan yang dialami perempuan. Laporan ini dipublikasikan Komnas Perempuan pada hari Senin (14/03/05) di harian Kompas memperlihatkan jumlah kekerasan terhadap perempuan (KTP) naik secara konsisten dari tahun ke tahun. Dalam laporan tersebut juga menyebutkan bahwa KTP terbanyak terjadi di dalam rumah atau komunitas sebanyak 6.634 kasus (47,3%), yaitu kekerasan di dalam rumah sebanyak 4.310 kasus (30,7%) dan di tingkat komunitas 2.479 kasus (17,6%), sedangkan *trafficking* 562 kasus (4%), dan 302 kasus (2,1%) yang dilakukan oleh aparat negara. Tempat terjadinya kekerasan tersebut di dalam rumah, dalam proses migrasi, dalam pengelolaan sumber daya alam, dalam konflik bersenjata, dan dalam keterkaitannya dengan politisasi identitas agama. Dan dari 2.453 kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah, 1.782 kasus terjadi pada istri.

Seperti yang diungkapkan Kemala Chandra Kirana, ketua Komnas Perempuan, gambaran kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2004 menunjukkan bahwa rumah tempat tinggal, lahan kebun tempat perempuan mencari ikan serta pekarangan dan perkampungan tempat tinggal perempuan kota ternyata merupakan tempat diskriminasi dan kekerasan yang dialami perempuan. Hampir tidak ada ruang yang aman bagi perempuan, komunitas dimana seharusnya perempuan mengekspresikan diri, berpartisipasi dalam kegiatan, ikut memberikan



suara untuk keputusan-keputusan bersama yang mempengaruhi dirinya, ternyata juga menjadi tempat dimana kekerasan terjadi.

Meningkatnya jumlah korban kekerasan menunjukkan semakin banyaknya perempuan yang berani melaporkan dan atau pihak yang peduli, dan sadar untuk melaporkan kekerasan yang mereka ketahui. Ini bisa menjadi kabar baik bagi kita, bahwa masyarakat sudah mulai permisif terhadap berbagai kekerasan yang terjadi pada perempuan. Apalagi dengan adanya jaminan perlindungan hukum yang kuat dan jelas yang serta merta membongkar konstruksi dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan privat.<sup>1</sup>

Data mengenai kekerasan terhadap perempuan (KTP) juga dapat ditemukan di Jawa Timur. Bedanya yang ini adalah data berskala lokal. Dalam rangka "Refleksi Hari Ibu" Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD) Surabaya meringkas data perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pemberitaan media cetak di Jawa Timur periode 25 November 2002-25 November 2003. dari data tersebut dapat kita lihat bahwa rata-rata terjadi 35 perkosaan per bulan, atau 20 jam sekali jatuh 1 korban. Dan terdapat juga 76 kasus kekerasan terhadap istri (KTI) di tahun 2002, naik 447 % dari tahun sebelumnya. Sedangkan bentuk kekerasan yang terjadi bervariasi, antara lain :

- Kekerasan fisik : dijambak, ditampar, ditendaang, dicacah dengan silet atau pisau atau benda tajam lainnya, dipukul dengan alat besi atau kayu

---

<sup>1</sup> Diambil dari Swara, Kompas, 14 Maret 2005.



atau helm, disulut atau dicucuk benda panas, terjadi 69 kasus.

- Kekerasan psikologis : poligami, dicerai paksa tanpa pengetahuan si istri, tidak dinafkahi atau penelantaran atau *financial abuse*, caci-maki atau umpatan yang merendahkan, pemerasan, ancaman, tercatat 51 kasus.
- Kekerasan seksual : perkosaan atau marital abuse atau pemaksaan hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri, membandingkan dalam kaitan seksual, tercatat 3 kasus.

Sedangkan data kekerasan dalam rumah tangga periode terbaru yaitu 25 November 2003-25 November 2004 yang disarikan KPPD dari harian memorandum menunjukkan 42 dari 45 kasus masih memiliki hubungan sebagai istri dengan pelaku. Berdasarkan jenis kekerasannya, 34 kasus kekerasan fisik, 19 kasus kekerasan psikis, 6 kasus kekerasan seksual. Yang menarik adalah kekerasan psikis didominasi oleh kasus penelantaran istri atau istri tidak dinafkahi. Kekerasan jenis ini dapat digolongkan kekerasan ekonomi.

Walaupun fenomena kekerasan ekonomi sebenarnya sudah ada sejak dahulu, namun tidak banyak LSM, seperti KPPD misalnya, yang memasukkannya sebagai kekerasan dengan klasifikasi sendiri. Padahal kekerasan ekonomi yang menyebabkan ketergantungan perempuan pada pasangan di bidang *financial* atau keuangan membuat pisisi tawar



perempuan semakin rendah, sehingga mudah bagi pihak-pihak tertentu (semisal suami) untuk melakukan berbagai kekerasan lainnya seperti kekerasan psikologis, kekerasan seksual, bahkan kekerasan fisik.

Penelitian yang dilakukan oleh Erlina Maya Novrita tentang *Konstruksi dan Respon Perempuan Korban Kekerasan Domestik*<sup>2</sup> mencoba menjelaskan mengenai ideologi gender, konstruksi tentang perkawinan, dan respon perempuan korban kekerasan domestik. Definisi yang dikemukakan oleh informan tersebut sebagian besar menunjukkan realitas hidup yang mereka alami. Tetapi tidak semua realitas kehidupan informan dapat ditangkap secara lebih utuh dari definisi yang dibuat. Dengan kata lain, tidak semua kekerasan yang dialami oleh informan dipahami oleh informan sebagai kekerasan. Yang terutama adalah kekerasan ekonomi, walaupun sebagian besar mengalaminya, tetapi kekerasan ini tidak muncul sebagai sebuah wacana kekerasan.

Sedangkan beberapa hal yang menurut informan menjadi penyebab timbulnya tindakan kekerasan suami terhadap istri adalah pengaruh *role model*, stress atau suami yang ingin menang sendiri, kelakuan, kebiasaan suami, pancingan dari pihak istri, kehadiran pihak ketiga, perasaan cemburu, pengaruh lingkungan, faktor ekonomi, dan hukum karma. Dari penilaian informan tentang penyebab timbulnya kekerasan masih dijumpai adanya viktimisasi, informan menilai bahwa kekerasan itu terjadi karena kesalahan perempuan juga. Mereka sering

---

<sup>2</sup> Erlina Maya Novrita, *Konstruksi dan Respon Perempuan Korban Tindak Kekerasan*, th 2000.



melakukan tindakan yang dapat memancing timbulnya tindak kekerasan itu.

Tindakan kekerasan itu dilakukan oleh suami adalah untuk mendidik istri, menutupi kejelekan atau kesalahan suami, mengontrol istri, melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai suami, dan melampiaskan emosi.

Melalui pemahaman informan mengenai gender yang diungkap melalui sifat ideal dan tanggapan atas hubungan gender dalam perkawinan, dapat diketahui bahwa ideologi dominan itu tidak selalu menghegemoni secara total, tetapi nampak dalam bentuknya yang dinamis. Muncul dan tenggelam sesuai dengan konteks, realitas seperti apa yang dihadapi.

Dalam merespon pun informan memiliki dua alternatif yaitu bersikap defensif atau bertahan dan ofensif atau kontra. Sikap kontra pun tidak serta merta ditunjukkan secara terbuka, yaitu moderat atau tidak konfrontatif. Namun ada juga yang memakai perlawanan yang cukup konfrontatif.

Dari penelitian ini kita dapat melihat kembali bahwa perempuan sendiri mengingkari kekerasan yang dialaminya, bahkan kekerasan ekonomi tidak dianggap sebagai kekerasan.

Di luar negeri sendiri kasus-kasus kekerasan ekonomi lebih variatif dan terkesan lebih terbuka. Laporan yang dipublikasikan oleh *The Coburg Brunswick Community Legal and Financial Conselling Centre Inc*, melalui internet beberapa waktu yang lalu, mencoba untuk mengungkap kasus-



kasus kekerasan ekonomi dalam hal keuangan. Salah satunya yaitu mengenai ketidakberdayaan perempuan dalam mendapatkan haknya berkaitan dengan keuangan keluarga. *Security Mom* atau istilah untuk ibu rumah tangga adalah perempuan yang paling rawan terbelit permasalahan keuangan. Ketika laki-laki bekerja diluar, maka dia dianggap “kerja” karena menghasilkan uang. Sedangkan ketika perempuan bekerja dirumah : mengurus anak, mengerjakan segala pekerjaan domestik, melayani suami, maka perempuan tidak dapat dikatakan bekerja. Hal ini disebabkan pekerjaan perempuan tidak termasuk kategori *paid job* atau pekerjaan yang menghasilkan uang. Padahal perempuan sendiri melakukan pekerjaan tersebut dalam rangka membantu suami dalam mengurus permasalahan rumah tangga. Partisipasi perempuan di dalam rumah tangga dianggap sebagai kewajiban yang sudah semestinya, bukan dianggap sebagai bentuk *partnership* dalam berumah tangga. Akibatnya, beberapa perempuan yang telah bercerai dari suaminya harus hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka tidak punya hak atas harta yang diusahakan suami mereka untuk kehidupan rumah tangga dan bahkan terancam tidak mendapatkan hak asuh terhadap anaknya sendiri.

Beberapa tataran diatas baik dari KPPD, hasil penelitian maupun beberapa perbandingan data di luar negeri, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Indonesia belum mendapat respon yang layak. Dan data-data tersebut menurut peneliti haruslah dilihat sebagai fenomena gunung es atau *iceberg phenomenon*. Dimana angka



yang tampil mungkin hanya angka yang muncul di permukaan, dan masih banyak angka yang tidak terungkap atau *dark number* dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh tabunya pembicaraan masalah kekerasan didalam rumah tangga yang merupakan ruang paling privat bagi seluruh keluarga.

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti merasa sangat tertarik untuk mencoba menggali kembali permasalahan mengenai kekerasan terhadap perempuan.. Penelitian ini adalah sebuah penelitian lanjutan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erlina Maya Novrita (2000), guna memperkaya literatur mengenai berbagai permasalahan kekerasan dan hubungannya dengan relasi kuasa.

## 1.2 Fokus Kajian Penelitian

Kekerasan ekonomi sebagai salah satu bentuk kekerasan yang kerap kali terjadi pada perempuan, seringkali diingkari oleh perempuan itu sendiri. Praktik-praktik sosial dari kekuasaan, seakan-akan membungkam perempuan untuk menemukan makna kekerasan yang dialaminya.

Surabaya adalah salah satu kota yang mulai berkembang di Jawa Timur yang cukup padat penduduknya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh LSM di Surabaya setidaknya terdapat 159 perempuan korban kekerasan di Jawa Timur. Data ini adalah data yang tampak dan dilaporkan, dengan kata lain data ini adalah data yang terungkap. Hal ini dikarenakan fenomena kekerasan terhadap perempuan di Indonesia



adalah fenomena gunung es. Dan peneliti yakin bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebenarnya lebih banyak dari data yang terungkap.

Oleh karena itu melalui penelitian ini peneliti hendak melakukan analisis terhadap wacana perempuan korban kekerasan ekonomi mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui bagaimana perempuan korban kekerasan ekonomi ini melakukan negosiasi terhadap perannya baik sebagai *wife* maupun *housewife*.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan**

Penelitian ini *pertama*, bertujuan untuk melakukan analisis terhadap praktik-praktik diskursif kuasa terhadap wacana perempuan korban kekerasan ekonomi mengenai kekerasan. Dan yang *kedua* untuk mengetahui bagaimana perempuan korban kekerasan ekonomi melakukan negosiasi terhadap perannya sebagai *wife* maupun *housewife*.

#### **1.3.2 Manfaat**

Peneliti berharap penelitian ini nantinya bermanfaat baik secara teoritis maupun akademis. Secara teoritis peneliti mungkin berharap bahwa penelitian ini dapat membantu memberikan alternatif pendekatan baru terutama mengenai cara pandang feminisme terhadap kekerasan dan relasi kuasa.



Mengenai manfaat akademis peneliti berharap penelitian ini menambah wawasan bagi kajian sosiologi terutama sosiologi gender mengenai model feminis dekonstruktif seperti feminis postrukturalis yang banyak dipengaruhi oleh analisis Foucauldian.





## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini mengambil sub judul *Diskursus Mengenai Kekerasan dan Negosiasi Peran pada Perempuan Korban Kekerasan Ekonomi*. Untuk menjawab permasalahan pertama mengenai diskursus kekerasan, peneliti menggunakan analisis Foucauldian dan subordinasi femininnya Julia Kristeva. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua peneliti akan menggunakan psikoanalisa Luce Irigaray yang banyak dipengaruhi psikoanalisis Lacan dan dekonstruksinya Derrida. Walaupun peneliti menggunakan psikoanalisa Irigaray, tidak berarti membatasi peneliti dalam memakai skizoanalisa Deleuze dan Guattari dalam menganalisis ketergantungan ekonomi pada perempuan.

#### 2.1 Kuasa dan Wacana dalam Foucault

George Ritzer<sup>1</sup> menempatkan Foucault sebagai tokoh poststrukturalis. Ritzer menyebutkan bahwa Foucault yang sangat dipengaruhi Nietzsche tertarik pada kekuasaan mikro politik terutama sekali hubungan antara kekuasaan dan ilmu pengetahuan,

Dia sangat tertarik pada "kekuasaan mikro-politik", keanekaragaman teknik-teknik koersif minor.....Akhirnya, dan barangkali sangat penting, Foucault menggunakan beberapa minat Nietzsche (lihat Bab 2), terutama sekali hubungan antara kekuasaan dan ilmu pengetahuan (Smith,1994), bahkan keterkaitannya dianalisis secara sosiologis oleh Foucault (Ritzer, 2003 : 66).

---

<sup>1</sup> Ritzer, George. Teori Sosial Postmodern (2003)



Menurut Ritzer, dalam karyanya *Arkeologi Ilmu Pengetahuan*, Foucault tertarik pada penyelidikan peristiwa-peristiwa diskursif. Dia ingin menemukan kondisi-kondisi dasar yang menyebabkan sebuah diskursus tercipta. Foucault bukan memfokuskan pada manusia atau apa yang mereka katakan, namun pada pembahasan diskursus sebagai praktik.

Karya Foucault yang terpenting selanjutnya adalah genealogi kekuasaan, genealogi Foucault memfokuskan tentang asal-usul dan perkembangan rezim-rezim kekuasaan/ilmu pengetahuan. Menurut Foucault, diskursus itu berbahaya, dan kekuasaan berusaha menggunakan kontrol atas bentuk-bentuk diskursus yang dianggap potensial melemahkannya.

Foucault mengidentifikasi empat domain dimana diskursus terutama sekali dianggap membahayakan<sup>2</sup> : politik (kekuasaan), seksualitas (hasrat), kegilaan, dan secara umum apa yang dianggap benar atau palsu. Untuk yang terakhir Ritzer menjelaskannya lebih lanjut,

Foucault, sebagaimana ia mengikuti Nietzsche, mengidentifikasi yang terakhir sebagai "kehendak untuk kebenaran" atau "kehendak untuk berkuasa". Berhubungan dengan hal ini, Foucault (sama halnya dengan Nietzsche) mengaitkan ilmu pengetahuan dengan kekuasaan.....Dalam hal ini, kehendak untuk kebenaran diasosiasikan dengan kehendak untuk berkuasa; ranah keilmuan yang satu berusaha hegemoni atas ranah-ranah yang lain (Ritzer, 2003 : 79).

Jagi genealogis memiliki dua tugas, yang pertama tugas kritik yang berkaitan dengan,

---

<sup>2</sup> Ritzer, George. *Teori Sosial Postmodern* (2003 : 79).



Bentuk-bentuk pengecualian, imitasi dan penyelewengan.....bagaimana semua itu terbentuk, dalam menjawab kebutuhan, bagaimana hal tersebut dimodifikasi dan diganti, membatasi secara efektif yang digunakan seluas apa semua itu diterapkan (Foucault, 1969, 1971/1976 : 232) (Ritzer, 2003 : 80).

Dan tugas yang kedua adalah memeriksa bagaimana rangkaian diskursus terbentuk, dan bagaimana sebuah kondisi muncul dan tumbuh dengan variasinya. Jadi genealogis adalah analisis hubungan historis antara kekuasaan dan diskursus.

Menurut Sarup<sup>3</sup>, hampir semua pemikiran Foucault, diakuinya pengaruh dari skema konsepsi sejarah Nietzsche yang disebut *genealogi*. Analisis genealogis berusaha membangun dan mempertahankan singuralitas peristiwa, meninggalkan peristiwa spektakuler untuk peristiwa sepele yang dan yang diabaikan, serta keseluruhan rentang fenomena yang sering ditolak sebagai sejarah. Terjadi pemberontakan pengetahuan yang tertindas, pengetahuan yang diremehkan sebagai tidak memadai-pengetahuan naif yang ditempatkan pada posisi paling bawah dalam hierarki pengetahuan, diluar level keilmuan. Foucault sering menggunakan istilah genealogi untuk merujuk pada kesatuan pengetahuan intelek dan ingatan-ingatan lokal yang memungkinkan kita membangun pengetahuan historis tentang perjuangan hidup dan menggunakan pengetahuan tersebut secara taktis dalam kehidupan sehari-hari. Genealogi berfokus terutama pada pengetahuan lokal, diskontinu, remeh-temeh, dan dianggap tidak sah dihadapan klaim kesatuan teori yang akan menyaring,

---

<sup>3</sup> Madan Sarup, *Poststrukturalisme dan Posmodernisme, Sebuah Pengantar Kritis* (2003)



menyusun secara hierarkis, dan menatanya atas nama pengetahuan sejati tertentu,

Genealogi, saya tegaskan kembali, adalah sebetulnya kritik. Genealogi menolak pencarian asal-usul dan lebih tertarik pada konsepsi awal mula historis sebagai sesuatu yang bersifat rendah, kompleks, dan kebetulan (*contingent*). Genealogi berusaha menyingkap keanekaragaman faktor dibalik suatu peristiwa dan kerapuhan bentuk-bentuk sejarah. Menurut pandangan sejarah ini, seperti yang ditunjukkan tulisan-tulisan Foucault, tidak ada yang konstan, tidak ada esensi, tidak ada bentuk tetap, kontinuitas tak terinterupsi yang menstruktur masa lalu (Sarup, 2003 : 99-101).

Selanjutnya, Sarup dalam bukunya juga membahas mengenai kekuasaan dan pengetahuan oleh Foucault. Menurutnya, pada tahun 1960-an Foucault memusatkan perhatian karyanya pada bahasa dan pembentukan subyek dalam wacana. Subyek individual adalah entitas kosong, saling sengkabut wacana. Dalam karyanya yang lebih kemudian, Foucault bergeser dari determinasi linguistik ke pandangan bahwa individu dibentuk oleh pola hubungan kekuasaan, dimana kekuasaan menjadi prinsip realitas sosial yang tertinggi.

Foucault mengatakan pengaruh Nietzsche semakin dirasa penting. Nietzsche yang menempatkan pola hubungan kekuasaan sebagai fokus umum. Sementara itu, bagi Marx, yang difokuskan adalah pola hubungan produksi. Nietzsche adalah filsuf kekuasaan, filsuf yang secara sadar berpikir tentang kekuasaan tanpa harus mengaitkan diri pada teori politik tertentu. Para sejarawan mempelajari mereka yang memegang kekuasaan dan ada banyak sejarah anekdotal para raja dan jenderal: bila dibandingkan dengan hal tersebut, ada pula sejarah proses-proses



ekonomi. Sekali lagi, bila dibedakan dengan semua itu, kita juga memiliki sejarah institusi. Namun, kekuasaan dalam strategi dan mekanismenya belum pernah dipelajari. Apa yang telah dipelajari meskipun masih sedikit adalah pola hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Tentu saja, kesalingtergantungan kekuasaan dan pengetahuanlah (*pouvoir-savoir*) yang menjadi titik tumpu strategis karya Foucault yang lebih kemudian.

Secara tradisional, kekuasaan sering dipahami dalam pengertian negatif dan dilihat terutama sebagai mekanisme peradilan : yakni yang mendasari hukum, yang membatasi, menghalangi, menolak, melarang, dan menyensor. Kekuasaan mengandaikan penguasa yang perannya melarang : berkuasa berarti berhak melarang. Dan dengan demikian, melawan kekuasaan dipandang sebagai pelanggaran.

Inilah pandangan yang diterima Foucault dalam karya awalnya ; namun sejak 1971-1972 ia menyadari persoalan kekuasaan tampaknya perlu dirumuskan kembali. Ia mengubah konsepsi kekuasaan negatif, peradilan dan konsepsi kekuasaan teknis dan strategis. Pandangan kekuasaan positif ini dapat dilihat dalam *Discipline and Punish* serta *The History of Sexuality*. Kekuasaan modern bekerja melalui konstruksi kapasitas dan mode aktivitas “baru”, bukan melalui pembatasan apa yang ada sebelumnya.

Foucault mengatakan kekuasaan bukanlah kepemilikan ataupun kemampuan. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang tunduk pada atau melayani kepentingan ekonomi. Foucault menekankan bahwa pola hubungan kekuasaan tidak dapat dikonseptualisasikan sebagai milik



individu atau kelas. Kekuasaan bukanlah komoditas yang dapat diperoleh atau diraih. Kekuasaan bersifat jaringan; menyebar luas kemana-mana. Foucault mengatakan analisis kekuasaan seharusnya tidak memusatkan perhatian pada tingkat tujuan sadar, tapi pada poin penerapan kekuasaan. Dengan kata lain, ia ingin mengubah titik perhatian dari pertanyaan, seperti "Siapa yang memiliki kekuasaan?" atau "Apa tujuan atau maksud pemegang kekuasaan?" ke proses-proses yang membentuk subyek sebagai hasil pengaruh kekuasaan.

Ia menolak analisis yang menempatkan sumber asal-usul kekuasaan dalam struktur atau institusi pada posisi utama atau puncak. Pandangan Foucault mempersoalkan konsep konflik antara kelas penguasa dan kelas bawahnya Marxis. Foucault mengatakan mekanisme, teknik, dan prosedur kekuasaan tidak diciptakan kaum borjuis, bukan ciptaan kelas yang berusaha menjalankan dominasi yang efektif, tetapi tersebar sejak kekuasaan tersebut menunjukkan manfaat politis dan ekonomi bagi kaum borjuis.

Dengan demikian, menurut Foucault, melihat kekuasaan sebagai penindasan, pembatas atau larangan tidak memadai lagi : kekuasaan "menciptakan realitas"; kekuasaan "menciptakan domain obyek dan ritual kebenaran". Foucault mengatakan kita sering mendengar klise "kekuasaan membuat gila", tapi kita harus memperhatikan fakta bahwa pelaksanaan kekuasaan itu sendiri menciptakan pengaruh-pengaruh kekuasaan. Tanpa pengetahuan kekuasaan tidak mungkin dijalankan, pengetahuan tidak mungkin tidak melahirkan kekuasaan.



Penekanan Foucault yang terus menerus pada kekuasaan dan wacana menciptakan benang merah karya-karyanya. Seperti yang telah dibahas, Foucault mengatakan kekuatan tidak lagi bekerja melalui mekanisme dari atas-bawah yang langsung di mana penguasa menerapkan pembatasan-pembatasan yang koersif atau massa yang kurang lebih, selalu patuh. Menurut Foucault, pola hubungan kekuasaan diferensial yang kompleks meluas ke setiap aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik kita, melibatkan semua bentuk "posisi-subyek" (yang selalu kontradiktif), dan menjaga kesepakatan kita bukan dengan ancaman sanksi hukuman melainkan dengan membujuk kita untuk menginternalisasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam tatanan sosial.

Foucault mengatakan sebaiknya kita tidak melihat subyek sebagai subyek yang sadar, berkemauan, otonom, sadar-diri, atau subyek "transendental" dalam wacana Kantian. Sekarang, kita harus melihat subyek sebagai lokus wacana yang tersebar dan terdesentralisasi, dan bermacam ragam. Kematian "subyek transendental" menggeser dasar otoritas moral pembawa-kebenaran yang diyakini Noam Chomsky dan Jean-Paul Sartre.

Foucault sangat kritis terhadap para intelektual "universal" (seperti Sartre) yang tahu banyak tentang topik yang terspesialisasi dan kemudian mengeksploitasi posisi mereka untuk berperan sebagai kesadaran intelektual zaman mereka. Sebaliknya, Foucault percaya pada kaum "intelektual spesifik", intelektual yang bekerja di wilayah-wilayah keahlian



husus dan lokal yang terdefiniskan secara jelas. Pendapat ini tampaknya sejalan dengan keyakinannya pada politik-mikro pertarungan lokal dan pola hubungan kekuasaan yang khusus. Kaum intelektual spesifik tidak memiliki cita-cita universalis.

Menurut Foucault, sekarang kaum intelektual harus mengakui bahwa Pencerahan adalah wacana budaya dan historis spesifik yang klaim kebenaran dan nilai-nilainya tidak lebih dari sekedar sebuah episode pendek dalam sejarah pemikiran modern. Sejarah sering digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan yang menyeragamkan masa lalu dan sering diasosiasikan dengan narasi induk ("master"). Sebaliknya, Foucault mengadopsi perspektif Nietzschean atau genealogis yang melihat klaim kebenaran sebagai produk kehendak untuk berkuasa yang tersebar luas dalam bahasa, wacana, atau representasi<sup>4</sup>.

Selanjutnya Ann Brooks banyak membahas Foucault terutama<sup>5</sup> mengenai kuasa dan wacana berkaitan dengan pentingnya Foucault dalam perkembangan cara pandang yang baru bagi feminisme. Karya-karya Foucault merupakan usaha menguraikan bentuk kuasa yang berbelit-belit dan banyak variabel di dalam praktik diskursif maupun non diskursif. Foucault menyangkal bahwa kuasa bersifat represif atau dihasilkan dari sumber tunggal dominasi atau penindasan. Foucault tidak bermaksud untuk menyuguhkan teori kuasa, namun mengembangkan serangkaian metode untuk memeriksa bagaimana kuasa beroperasi. Baginya, kuasa tidaklah dimiliki, diberikan atau diperebutkan, lebih baik ia

---

<sup>4</sup> Madan Sarup, *Postrukturalisme dan Posmodernisme* (2003)

<sup>5</sup> Ann Brooks, *Postfeminisme and Cultural Studies* (1997)



dijalankan dan eksis hanya di dalam aksi. Kuasa merupakan substratum atau lapisan bawah yang dapat berpindah yang di atasnya ekonomi, cara produksi, cara pemerintahan, pengambilan keputusan, bentuk-bentuk pengetahuan, dan lain-lain. Kuasa juga dipahami bersifat plural, tidak bekerja pada 'lintasan tunggal', melainkan bersifat 'kapiler' menyebar melalui wacana, tubuh, dan hubungan di dalam suatu jaringan. Dengan kata lain kuasa tidak berasal dari sumber tunggal, melainkan beredar melalui keseluruhan tubuh sosial, bahkan sampai bagian tubuh terkecil dan terlihat sepele.

Oleh karena itulah Foucault mengakui pelaksanaan kuasa laki-laki atas perempuan, tetapi menolak bahwa laki-laki memegang kuasa. Ketika feminis mengidentifikasi kuasa laki-laki sebagai suatu yang represif, Foucault bergerak ke arah posisi yang menetapkan semua kuasa sebagai sesuatu yang produktif. Sebagai akibat ini Foucault menolak menyamakan kuasa dengan struktur sosial seperti patriarki.

Ann Brooks<sup>6</sup> juga menguraikan pemikiran Michele Barrett mengenai analisis wacana Foucault, dalam buku Barret : *The Politics of Truth : From Marx to Foucault* (1991). Menurut Barret, pendekatan analisis wacana Foucault bukan untuk menyelidiki hukum konstruksi wacana sebagaimana dilakukan oleh mereka yang menggunakan metode struktural, tapi pada kondisi keberadaannya. Wacana tidak terkait dengan pemikiran, pikiran, atau subyek yang menimbulkannya, melainkan dengan bidang praktis dimana ia disebarkan. Wacana adalah serangkaian 'praktik' daripada

---

<sup>6</sup> Ann Brooks, *Postfeminisme and Cultural Studies* (1997)



struktur. Wacana tersusun atas tanda, namun mereka melakukan lebih dari sekedar menandakan benda, bagi mereka adalah "praktik yang secara sistematis membentuk obyek yang mereka bicarakan".

Barret, menyoroti beberapa persoalan signifikan yang dimunculkan oleh konsep wacana Foucault,

*Pertama*, dia mempertanyakan hierarki determinisme yang ditemukan dalam Marxism. Seperti yang ditunjukkan oleh Barret, Foucault memandang determinisme sebagai *polymorphous* daripada tidak liner dan ingin menyatakan 'kuasa determinatif dari wacana dalam membentuk praktik yang paling bertanggung jawab bagi-seperti yang dikatakan Said-"bagaimana orang-orang berpikir, hidup dan berbicara (Barret, 1991 : 131). *Kedua*, Barret mencatat bahwa Foucault berlawanan dengan konsepsi struktur sosial meskipun dia mengembangkan konsep yang sama secara umum : kuasa (Brooks, 1997 : 74).

Intinya konsep wacana Foucault sangat terkait erat dengan konsepnya mengenai kebenaran, pengetahuan, dan kuasa. Konsep kuasa Foucault seperti yang dijelaskan Barret tidak di dalam agensi-misalnya negara, kekuatan ekonomi, atau individu- melainkan memandangnya dalam pengertian operasi 'mikro kuasa'.

Dengan analisis wacana Foucauldian inilah, peneliti akan berusaha mengungkap bagaimana wacana kekerasan tercipta pada perempuan korban kekerasan ekonomi, dan bagaimana praktik-praktik diskursif terjadi dalam wacananya.

## 2.2 Dekonstruksi Ala Foucault, Lacan, Derrida dan Teori Feminisme

Brooks<sup>7</sup> mencoba menjelaskan kontradiksi dan kompromi antara analisis Foucauldian dengan perspektif feminis. Menurut Brooks, Foucault

---

<sup>7</sup> Masih dalam karya Ann Brooks, *Postfeminisme and Cultural Studies* (1997),



secara personal menaruh simpati pada hasrat perempuan untuk mengubah relasi kuasa. Ketegangan yang jelas antara analisis Foucauldian dengan feminisme berkenaan dengan masalah mendasar dalam menjelaskan sifat dasar relasi kuasa.

Foucault menentang konsepsi feminis tradisional mengenai sifat dasar pengetahuan dan kuasa, khususnya pemahaman feminis mengenai sifat dasar atas kuasa laki-laki atas perempuan. Mengutip Brooks dalam menyampaikan pendapat Ramazanoglu (1993 : 2),

Ketika feminis mengembangkan teori konstruksi sosial tentang gender, seksualitas, dan tubuh, Foucault telah membukakan suatu teori konstruksi sosial yang paralel namun agak berbeda melalui cara baru mendekonstruksikan sejarah dan menganalisis relasi kuasa.....penjelasan Foucault tentang kuasa menunjukkan bahwa kuasa modern bersifat 'kapiler' (seperti pembuluh rambut) karena dia bekerja pada tingkatan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar di dalam praktik sosial keseharian (Brooks, 1997 : 80).

Brooks berpendapat bahwa pemahaman Foucault terhadap sifat dasar dan bekerjanya kuasa inilah yang berimplikasi langsung pada feminisme. Gagasan Foucault mengenai pengetahuan dan kebenaran sebagai pembatas kuasa telah memunculkan berbagai persoalan mengenai politik dan praktik feminis, dan menantang asumsi kunci tentang sifat dasar dan penyebab subordinasi perempuan, yang mana berbagai versi feminisme dilandaskan kepadanya. Analisis Foucauldian mampu menawarkan alternatif yang berguna bagi analisis feminis yang mengaopsi gagasan sangat monolitik tentang kuasa laki-laki dan kontrol pria atas perempuan.

Kritik-kritik Foucault tentang konsep kebenaran, dan anjurannya mengenai teori sebagai strategi atau alat, serta pemikiran-pemikiran



poststrukturalis lainnya juga seperti Lacan dan Derrida telah menyumbang pada pengembangan wacana feminis alternatif, sehingga mengilhami munculnya beberapa feminis dekonstruktif asal Prancis seperti Helena Cixous, Luce Irigaray, dan Julia Kristeva. Mereka bertiga yang notabene murid-murid Lacan, telah mengembangkan tubuh penulisan yang tidak mengklaim suatu status kebenaran, namun posisi penulisan perempuan antara teori dan fiksi. Maksudnya feminis yang menentang Phallosentrisme tidak bertujuan untuk menggantikan wacana patriarkal dengan kebenaran feminis-*yang sempat dikhawatirkan Foucault dengan munculnya 'diktator proletarian' versi feminis*-tetapi untuk mengungkapkan investasi pengetahuan patriarkal, baik yang merepresentasikan maupun meniadakan perempuan. Atau dengan kata lain feminis model dekonstruktif ini tidak mengklaim suatu nilai obyektif universal, tetapi merefleksikan pandangan tertentu yang ditulis dari perspektif tertentu.

Untuk mengungkapkan lebih jauh mengenai pemikiran trio feminis dekonstruktif tersebut, akan lebih baik jika kita meringkas sejenak teori psikoanalisisnya Freud dan Lacan, Derrida, serta Deleuze-Guattari yang sangat berpengaruh-selain Foucault-pada ketiga feminis tersebut. Dalam mengungkapkan ketiga pemikiran Poststrukturalis tersebut peneliti tentunya akan sangat berterima kasih pada karya Ann Brooks, dalam bukunya *Posfeminisme and Cultural Studies* (1997), mengingat karyanya yang sangat fokus, ringan, dan ringkas.



### 2.3 Akusisi Gender Freud

Inti dari psikoanalisis adalah tentang seksualitas dan subyektifitas. Psikoanalisis menyelidiki secara kompleks dimana psikoseksualitas terikat dengan proses ketidaksadaran. Psikoanalisis Freudian dapat dibagi menjadi dua area yang berhubungan,

Area pertama suatu teori asal-usul dan perkembangan seksualitas laki-laki dan perempuan dan area kedua suatu analisis bekerjanya ketidaksadaran (Brooks, 1997 : 104).

Freud mengembangkan teori akusisi gender yang menjadi kunci untuk mengenali gagasan subyektivitas yang dipengaruhi gender. Penekanan teori Freud adalah pada biseksualitas awal anak dan sifat dasar penjelasan psikis. Bagi Freud, akusisi subyektivitas feminin dan maskulin terletak di dalam sumber 'struktur psikis tentang identitas seksual yang diperoleh pada tahun-tahun awal masa kecil'. Freud menyatakan bahwa bayi tidaklah secara langsung bersifat feminin atau maskulin, namun merupakan *polymorphously preverse*. Implikasi dari *polymorphously preverse* ini adalah individu mampu mengembangkan identitas 'normal', baik feminin maupun maskulin, atau tidak keduanya. Akusisi feminitas atau maskulinitas oleh perempuan atau laki-laki biologis melibatkan represi terhadap ciri-ciri biseksualitas awal anak yang tidak sesuai dengan identitas seksual yang dipersoalkan. Teori Freudian memberikan keunggulan pada perbedaan anatomis di dalam seksual, dalam pengertian psikis dan simbolik. Usaha untuk berahih dari sentralitas perbedaan anatomis dalam akusisi identitas seksual psikis di dalam karya



Freud telah mendorong beberapa feminis untuk mengalihkan perhatian mereka pada Jacques Lacan<sup>8</sup>.

#### **2.4 Lacan : Penanda, Tatanan Simbolik, dan *The Other*.**

Lacan mengembangkan kembali psikoanalisis Freud dan mencoba melampaui psikoanalisis Freud dengan menekankan bahwa perbedaan antara jenis kelamin bukan merupakan efek sifat dasar atau anatomi, namun sebuah pertanyaan psikis. Ketidaksadaran dan seksualitas tidak dipandang Lacan sebagai sifat dasar atau esensi biologis, tapi sebagai suatu hasil dari pembentukan subyek di dalam bahasa, misalnya di dalam tatanan imajiner dan simbolik. Lacan menggeser pertanyaan identitas seksual dari dunia biologis untuk menempatkannya dalam bidang penandaan. Identitas seksual seorang subyek adalah efek dari posisinya dalam tatanan simbolik. Istilah simbolik sebagai ranah yang membentuk hukum sosial, bahasa, dan pertukaran atau ranah tatanan sosial. Dan tatanan sosial tersebut diatur oleh *The Other* atau Sang Lain.

Dan yang terpenting bagi Lacan, identitas 'maskulin' dan 'feminin' tidaklah 'alamiah', namun hasil retakan di dalam tatanan ilmiah. Sebagai penanda utama yang simbolik, alat kelamin menandai tubuh dan seksualitas laki-laki dan perempuan dalam berbagai cara. Intinya karya psikoanalisis Lacan berusaha untuk mengenalkan 'komponen psikis' tentang subyektivitas sosial yang tentunya tak bisa diputuskan dari peran bahasa, karena bagi Lacan *Tak ada subyek yang bebas dari bahasa*<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Ann Brooks, *Posfeminisme and Cultural Studies* (1997 : 104-106)

<sup>9</sup> Ann Brooks, *Posfeminisme and Cultural Studies* (1997 : 104-106)



## 2.5 Derrida : Destabilisasi Logosentrisme dan Logika Biner

Derrida mengembangkan gagasan Ferdinand de Saussure tentang perbedaan untuk menciptakan teori poststrukturalisme. Derrida mengembangkan konsep *difference* (perbedaan) dan *differance* : konsep pertama membawa perbedaan, yang kedua bersifat menunda. Dan perbedaan hanya dapat dipahami ketika kata-kata tersebut tertulis. Jadi sangat jelas bahwa bagi Derrida kata-kata tertulis memiliki arti penting yang lebih besar daripada kata-kata terucap. Klaim Derrida mengenai perbedaan tersebut bahwa makna dan bahasa merupakan produk dari relasi perbedaan, bahwa tidak ada petanda (konsep) yang tetap dan penanda (suara atau citra tertulis) yang memiliki identitas adalah subyek pada suatu proses penundaan yang tidak pernah berakhir. Dengan demikian, makna bagi Derrida hanya dapat ditetapkan secara temporer. Petanda selalu ditempatkan dalam konteks diskursif dan menetapkan secara temporer makna dalam pembacaan tertentu dari penanda tergantung pada konteks diskursif. Derrida mengusulkan permainan bebas pada makna tekstual, dan gagasan interpretasi banyak segi atas interpretasi yang ditetapkan.

Derrida berusaha untuk mendekonstruksi komitmen logosentris dalam psikoanalisis Lacan dan Freudian, dan Derrida juga berpendapat bahwa mereka masih terikat dengan konsep biner. Bagi Derrida sendiri logosentrisme secara implisit adalah patriarkal, struktur mendasar dari oposisi biner dimiliki secara privilese oleh perbedaan laki-laki dan non



laki-laki<sup>10</sup>. Akhirnya dekonstruksi Derrida bertujuan untuk meruntuhkan sejarah logosentrisme guna memungkinkan perbedaan ruang bebas bermainnya. Derrida menyajikan suatu trajektori yang berguna secara politis, dan juga intelektual bagi peneliti feminis, sebagaimana hal tersebut menekankan pada proses material dari pembacaan dan penulisan serta mempermasalahkan dasar yang menjadi landasan berbagai wacana<sup>11</sup>.

Seperti yang dikatakan Jacqueline Rose<sup>12</sup>, teori psikoanalisis menyediakan teori feminis dengan suatu cara untuk mengidentifikasi dan memperbaiki perbedaan gender melalui metanaratif tentang perkembangan sifat kanak-kanak yang terbagi; juga membantu feminis menunjukkan bagaimana gagasan mendasar dari subyek adalah hak prerogatif maskulin di dalam pengertian budaya.

Psikoanalisis Freud menawarkan suatu teori universal tentang konstruksi psikis identitas gender didasarkan atas represi. Psikoanalisis Freud mencoba menawarkan jawaban atas pertanyaan tentang apa yang membentuk subyektivitas dan bagaimana kita mendapatkan subyektivitas yang dipengaruhi gender. Sementara Lacan,

Menekankan struktur linguistik dari ketidaksadaran sebagai situs makna yang tertindas dan struktur *imajiner* dari subyektivitas yang diperoleh....pada titik poin masuk individu sebagai subyek yang berbicara ke dalam tatanan simbolik bahasa, hukum, dan proses sosial, serta institusi (Weedon, 1987 : 51) (Brooks, 1997 : 114-115).

Hukum paternal yang dibawa psikoanalisis Lacanian sebagai dasar semua pertalian keluarga dan relasi budaya, memapankan subyek laki-

---

<sup>10</sup> Ann Brooks, *Posfeminisme and Cultural Studies* (1997 : 111-113)

<sup>11</sup> Ann Brooks, *Posfeminisme and Cultural Studies* (1997 : 114-115)

<sup>12</sup> Ann Brooks, *Posfeminisme and Cultural Studies* (1997 : 116)



laki melalui suatu penyangkalan terhadap feminin. Rose berpendapat teori psikoanalisis memberikan penjelasan tentang budaya patriarkal sebagai suatu kekuatan transhistoris dan lintas budaya.

## 2.6 Revolusi Hasrat Deleuze-Guattari<sup>13</sup>

Karya Deleuze-Guattari, *Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia*, memberikan sejumlah kritik pada psikoanalisa terutama Freud. Seperti halnya Foucault, Deleuze-Guattari memberikan kritik mereka pada Marxisme, psikoanalisa Freud, dan strukturalisme Saussurian. Foucault sendiri melabeli orang yang mengikuti perspektif Freudian dan Saussurian dengan "teknisi hasrat yang miskin" yang berminat pada "setiap tanda dan simptom" yang akan menunjukkan keberseragaman hasrat pada kegandaan hukum struktur dan kekurangan. Selain sebutan "teknisi hasrat yang miskin", Foucault juga memandang karya Deleuze-Guattari sebagai "pengantar pada kehidupan non-fasis: Bukan sekedar fasis dalam arti politis, tapi juga fasisme yang ada pada diri kita, pikiran kita, perilaku kita. Fasisme yang menyebabkan kita mencintai kekuasaan, bernafsu terhadap segala sesuatu yang mendominasi dan mengeksploitasi kita. Dan karya Deleuze-Guattari mengenai anti-Oedipus diartikan sebagai upaya oleh Ritzer sebagai pembebasan diri dari mode pemikiran yang dominan dan membantu membebaskan masyarakat dari pemaksaan fasistik, baik eksternal maupun internal.

Anti-Oedipus Deleuze-Guattari dianggap sebagai perlawanan yang sungguh-sungguh pada ide Oedipus complex dan fokusnya pada

---

<sup>13</sup> Ritzer, George. *Teori Sosial Postmodern* (2003 : 210-215).



"keluarga suci" yang terdiri dari "bapak-ibu dan saya". Ini karena Oedipus complex dianggap sebagai sebuah totalisasi ide, dan masyarakat harus dibebaskan darinya. Selanjutnya dalam pembahasan terakhir dalam karyanya, Deleuze-Guattari mengaitkan Oedipus complex dengan kapitalisme.

Inti dari anti-Oedipus adalah mengingatkan kita bahwa kita semua sudah teroedipal dan digilakan oleh keluarga kita semenjak sosialisasi proses dan akibatnya menjadi fasisme. Tujuan dari anti-Oedipal adalah untuk membebaskan kita dari ikatan ini dan membirakan hasrat kita berkeliaran atau dengan kata lain "revolusi hasrat". Model seseorang yang bebas dari ikatan oedipal, yang bebas berkeliaran adalah skizofrenik. Lebih umum lagi, apa yang diusahakan Deleuze-Guattari adalah subyektivitas kolektif, subyektivitas non fasis-anti-Oedipus.

Deleuze-Guattari sangat mengokohkan skizofrenia, sedangkan Freud sangat membencinya karena sifatnya yang anti-oedipus. Menurut psikoanalisis, mereka telah menemukan produksi hasrat, namun kemudian mereka berubah dan berusaha menemukannya. Sedangkan, bagi Deleuze-Guattari masyarakat secara inheren adalah mesin hasrat dan juga mesin produksi. Deleuze-Guattari memandang dua tipe "mesin" ini dan juga "mesin skizofrenik" sebagai bagian "kehidupan spesies". Skizofrenia adalah dunia produksi dan reproduksi mesin-hasrat, produksi utama dunia sebagai "realitas esensi manusia dan alam". Skizofrenia hidup terus-menerus, ia lebih dekat menjadi mesin hasrat. Namun



psikoanalisa menentangnya, dan semua implikasinya atas humanitas, psikoanalisa berusaha menekan kehidupannya dan hasratnya.

Khayalan mengenai mesin menembus anti-Oedipus, "hasrat adalah sebuah mesin, dan obyek hasrat adalah mesin lain yang dihubungkan dengannya". Mesin pokok lainnya adalah kapitalisme, dan Deleuze-Guattari melihatnya sebagai upaya untuk menekan mesin hasrat.

Saat ini, mesin hasrat dipaksa untuk cocok dengan kode "Oedipus yang terbatas". Apa yang perlu dilakukan adalah "skizofrenisasi alam bawah sadar masyarakat secara keseluruhan dan individu. "Skizofrenisasi" seperti itu memberi peluang pada kita "untuk menghancurkan lingkaran besi Oedipus dan menemukan kembali dimana saja kekuatan produksi hasrat". Dengan skizofrenisasi, kita akan disembuhkan karena obat; artinya, kita akan bebas dari penindasan psikoanalisis, dan kita juga dalam proses dibebaskan dari kapitalisme. Kita perlu mengganti psikoanalisis dengan semua pengeksklusifan dan pembatasannya dengan skizoanalisis, karena persatuan psikoanalisis adalah agen kontrol sosial yang sama dengan polisi. Tujuan skizoanalisis adalah membuka kesalahan yang dilakukan psikoanalisis untuk de-Oedipalisasi alam bawah sadar atau membuka "jaring laba-laba bapak-ibu". Dalam penerapannya skizoanalisis akan lebih mampu memahami persoalan masyarakat yang sesungguhnya, dan sekurang-kurangnya salah satu persoalan yang sebenarnya, dan sekurang-kurangnya salah satu persoalan yang sebenarnya adalah penekanan hasrat masyarakat itu sendiri.



Skizoanalisis sebagai proses akan membebaskan mesin hasrat, dan hasrat dipandang sebagai kekuatan revolusioner. Ia adalah kekuatan eksplosif yang menyangsikan tatanan yang telah mapan.

Seperti halnya poststrukturalis dan posmodernis kebanyakan, kode menjadi cukup penting bagi Deleuze-Guattari. Kode dipahami sebagai sesuatu yang opresif dan menghancurkan kode tersebut, terutama salah satu aspek kode-Oedipus sebagai penanda yang zalim,

Arus skizofrenik adalah kekerasan pada sintaksis, dekonstruksi secara serempak penanda, non-sense membangun sebuah arus, polyvocality kembali menghantui semua relasi (Deleuze-Guattari, 1972/1983:133) (Ritzer, 2003 : 213).

Tentu saja, bukan hanya kode yang akan dihancurkan, akan tetapi juga kapitalisme dan sistem keluarga suci (bapak-ibu dan saya).

Deleuze-Guattari mulai mengaitkan antara kapitalisme dengan keluarga. Menurutnya keluarga telah bermain-main dengan Oedipus, tapi di belakang ini ada situasi ekonomi. Oedipus juga dianggap sebagai produk sistem kapitalis. Oedipus datang bukan melewati arus kotoran atau gelombang perzinahan, tetapi melalui arus kapital yang dikode melalui uang. Oedipus digunakan kapitalisme untuk menjajah keluarga kita dan akhirnya dii kita. Ia juga membantu keluarga memainkan peran pentingnya dalam kapitalisme sebagai "unit produksi dan reproduksi"

Namun, Deleuze-Guattari mengingatkan kita untuk berhati-hati, seperti kebanyakan poststrukturalis dan posmodernis dengan menolak ide narasi besar dan subyek revolusioner yang akan menyelesaikan persoalan kita sekaligus. Karena kita hidup di dunia parsial,



terfragmentasi, dan mustahil menggeneralisasi narasi besar untuk mengatasinya. Kita tidak lagi meyakini totalitas primordial yang dahulunya ada, atau totalitas final yang menanti kita pada kencana masa depan. Deleuze-Guattari menghindari pencerahan, persoalan dan solusinya, dan menolak menawarkan sebuah program politik yang jelas.

Akan tetapi, mereka tetap mengingatkan kita untuk mendekonstruksi dunia baru. Tujuan dekonstruksi semacam itu adalah membebaskan arus-arus skizoid yang inheren dengan mesin hasrat. Dan mereka mengakhiri karyanya dengan menyokong irrasionalitas skizofrenia dan hasrat.

Untuk selanjutnya, setelah mengenal pemikiran tokoh-tokoh psikoanalisis, dekonstruktif seperti Derrida, dan Deleuze-Guattari peneliti akan mulai membahas pemikiran ketiga feminis poststrukturalis tersebut. Sebut saja Luce Irigaray yang banyak dipengaruhi oleh psikoanalisis Lacan, Foucault, Derrida, dan mesin hasrat Deleuze dan Julia Kristeva yang banyak dipengaruhi Lacan serta Helena Cixous yang sangat dipengaruhi Derrida. Walaupun nantinya, hanya dua dari mereka-Luce Irigaray dan Julia Kristeva-yang dipakai sebagai pisau analisis, namun peneliti merasa perlu membahas ketiganya mengingat pemikiran mereka saling bergesekan secara historis.

## **2.7 Psikoanalisa Luce Irigaray**

Irigaray sangat berminat pada konsep perbedaan; perbedaan antara jenis kelamin; perbedaan antara perempuan; perbedaan di dalam individu seorang perempuan. Dia memikirkan proyeknya tentang



mengekspresikan positivitas perbedaan seksual. Salah satu tesis utamanya adalah bahwa bahasa dan sistem representasi tidak dapat mengekspresikan hasrat perempuan. Irigaray mempelajari bahasa skizofrenik laki-laki dan perempuan dan mengamati bahwa laki-laki memiliki kemampuan metabahasa yang tidak dimiliki oleh perempuan.

Dalam karyanya yang lain, *Speculum of The Other Woman* (1985), Irigaray menganalisis sejarah wacana teoritis Barat dari Plato hingga Hegel. Irigaray melihat bahwa feminin dilihat sebagai tidak ada apapun selain pelengkap, sisi lain atau sisi negatif dari maskulin. Oleh karena itu, Irigaray sama sekali tidak tertarik pada anatomi, melainkan pada morfologinya (bagaimana hal tersebut direpresentasikan, dikonseptualisasikan, dan diartikulasikan di dalam wacana ini). Proyek feminis Irigaray adalah mendekonstruksi wacana phallogosentris, untuk menunjukkan bahwa apa yang disebut wacana universal selalu diseksualisasikan dalam cara maskulin.

Dalam karyanya yang lain lagi, *This Sex Which is Not One* (1985), Irigaray menunjukkan pertanyaan tentang hubungan antara kesetaraan dan perbedaan. Perempuan bisa setara dengan laki-laki, dan dia akan menjadi sesuatu yang berpotensi menjadi laki-laki. Salah satu kritik dan kekhawatiran Irigaray terhadap gerakan feminisme adalah dimasukkannya hal tersebut dalam kanon maskulin yang termapankan. Untuk mengatasinya Irigaray mencoba untuk menawarkan teori mengenai libido feminin, bahwa definisi patriarkal tentang seksualitas menyebabkan perempuan kehilangan sentuhannya dengan feminitas esensialnya yang



terletak di dalam tubuh perempuan. Sebenarnya teori ini dipakai Irigaray untuk memperluas konsep Lacan tentang tatanan patriarkal phallosentris dengan pandangannya bahwa ke-yang-lain-an seksualitas perempuan telah direpresi oleh patriarki yang mencoba menteorisasikannya di dalam parameter maskulin. Menurut Irigaray seksualitas dan hasrat laki-laki dalam bentuk kelamin adalah prinsip pengaturan dari tatanan simbolik dan sumber dari tipe bahasa rasional, yang melaluinya kuasa sosial dijalankan. Bagi Irigaray tidak ada ruang bagi perlawanan di dalam pengertian 'tatanan simbolik', dan perempuan yang tidak merepresi sifat keperempuanannya yang sejati, tidak bisa memiliki akses untuk itu. Karya Irigaray tentunya menawarkan sebuah interpretasi positif tentang tubuh perempuan, paling tidak mereka tidak lagi didefinisikan dari sudut kekurangannya (tidak lengkap, dsb). Akhirnya Irigaray hanya ingin menciptakan suatu sistem alternatif dimana ada ruang untuk perempuan membicarakan hasrat mereka sendiri. Tujuan akhir Irigaray adalah mendekonstruksi terhadap Phallosentrisme melalui penegasan sistem simbolik lainnya yang didasarkan atas kekhususan feminin perempuan.

Karya yang terakhir dari Irigaray adalah esainya yang berjudul, *The Power of Discourse and The Subordination of The Feminine* (1985). Irigaray tertarik pada hubungan antara kuasa dan pengetahuan, misalnya tentang bagaimana kuasa bekerja dan menghasilkan subordinasi feminin. Irigaray ingin mengajak untuk cermat pada teks tertentu, dimana penindasan feminin dipengaruhi dalam wacana tertentu dan bagaimana



kondisi tersebut disingkap<sup>14</sup>. Dan pesan terakhir dari Irigaray adalah penciptaan rumah bahasa bagi perempuan, itu berarti juga keterlibatan perempuan dalam proses penciptaan realitas kultural dan politik<sup>15</sup>.

## 2.8 Helena Cixous dan *Ecriture Feminine*<sup>16</sup>

Senjata paling ampuh, yang menurut Cixous bisa membawa perempuan, sekaligus menumbangkan logika phallogosentrisme dominan adalah melalui *Ecriture Feminine* atau 'penulisan feminin'. Penulisan maskulin dipandang oleh Cixous sebagai sesuatu yang sistematis, tertutup, dan terbatas oleh hukum, sedangkan penulisan feminin muncul dari sesuatu yang 'imajiner',

Menulis. Suatu kegiatan yang tidak akan hanya 'menyadari' relasi tanpa sensor dari perempuan atas seksualitasnya, sampai keberadaannya sebagai perempuan, memberinya akses untuk kekuatan aslinya; akan memberinya kembali kesanggupan, kenikmatannya, organ-organnya, teritori yang sangat luas secara badaniah yang telah disimpan di bawah segel (Cixous, 1981 a : 280) (Brooks, 1997 : 121).

Karya-karya Cixous memang banyak dipengaruhi psikoanalisis Lacan, libido feminin dan maskulin, ketidaksadaran dan bahasa. Maksud dari Cixous untuk memakai penulisan feminin menentang tatanan patriarkal adalah untuk menunjukkan bahwa baginya seksualitas perempuan adalah sesuatu yang kaya dan plural. Cixous juga menunjukkan bahwa seksualitas maskulin dan bahasa maskulin bersifat phallosentris dan logosentris, dan masyarakat patriarkal menerima libido laki-laki tentang libido perempuan, dan penulisan laki-laki sebagai norma

---

<sup>14</sup> Ann Brooks, *Posfeminisme and Cultural Studies* (1997)

<sup>15</sup> Madan Sarup, *Poststrukturalisme dan Posmodernisme* (2003)

<sup>16</sup> Ann Brooks, *Posfeminisme and Cultural Studies* (1997)



baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dan Cixous yakin penulisan feminin mampu menentanginya, dan mencoba menunjukkan pada kita tentang kemungkinan mentransformasikan tatanan simbolik patriarkal dengan memberi perempuan pemikiran baru tentang diri mereka sendiri.

## 2.9 Julia Kristeva : Bahasa dan Subyek yang Terganggu<sup>17</sup>

Bagi Kristeva, apa yang dimaksud dengan 'feminin' bukanlah sesuatu yang khusus bagi perempuan, melainkan suatu posisi psikis, suatu bidang yang dipelihara di dalam ketidaksadaran, suatu bidang yang marjinal kepada simbolik. Perempuan tidak secara mendasar berbeda dengan laki-laki, tetapi bahwa faktor-faktor semiotik lebih dominan di dalam psikis perempuan daripada psikis laki-laki. Arah dari semua karya Kristeva adalah mengembangkan teori Lacanian tentang subyektivitas dengan membalikkan berbagai kategori, sedangkan fokus dari karyanya adalah menulis tubuh. Kristeva menerima pendapat Lacan bahwa tatanan simbolik adalah phallosentris dan perempuan dalam pengertian 'feminin' tidak memiliki akses terhadap bahasa, karena bahasa merupakan pusat bagi relasi kuasa tatanan sosial.

Walaupun Kristeva banyak dipengaruhi psikoanalisis Lacan, Kristeva telah melangkah lebih jauh dari Lacan, dia mencoba menghubungkan penindasan psikis dengan struktur aktual bahasa, yang dia ambil sebagai basis budaya. Bahasa memiliki peran di dalam pembentukan psikis, yang dengannya anak-anak dipisahkan dari hubungan primernya dengan ibunya dan ditempatkan dalam suatu

---

<sup>17</sup> Ann Brooks, *Posfeminisme and Cultural Studies* (1997)



jaringan sitem simbol yang dipengaruhi gender yang terpusat pada ayah sebagai representasi kuasa. Kristeva menghubungkan yang simbolik dengan berbagai wacana yang mengatur kehidupan publik : agama, ekonomi, penggolompokan tribal dan nasional, hukum, politik, dan metafisika. dan mengaitkan logika dominan dan basis kuasa dari masing-masing dengan paternitas (ayah) dan maskulinitas.

Jones dalam Brooks (1997) mengomentari karya Kristeva tentang budaya sebagai upaya untuk menemukan perlawanan terhadap yang Simbolik. Kristeva telah kembali ke tingkatan pra-Oedipal menggunakan riset ke dalam penguasaan bahasa masa kanak-kanak awal. Kristeva memusatkan pada ketertutupan awal anak-anak kepada ibunya, eksplorasi terhadap tubuh ibunya dan tubuhnya sendiri. Kristeva menggunakan istilah 'semiotika' untuk mengkategorisasikan aktivitas praverbal yang 'disensor' oleh tatanan simbolik namun tidak pernah hilang. 'semiotika' masuk ke dalam suatu hubungan yang bersifat berlawanan dengan yang simbolik, dan secara terus menerus menekan wacana rasional. Saling mempengaruhi antara semiotika dan simbolik menghasilkan suatu proses penandaan (*significance*) dari pada suatu makna univokal (*signification*). Dan tempat dimana praktik penandaan terjadi adalah sebuah 'teks', suatu situs dimana energi-energi ketidaksadaran secara simultan menyerang konvensi-konvensi formal bahasa.

Kristeva berpendapat bahwa satu-satunya cara memproduksi hasil yang menarik dari teks adalah dengan mengambil teks sebagai obyek



sesuatu dengan mengkaji artikulasi ideologis, politis, dan psikologisnya, hubungannya dengan masyarakat, dengan psikis dan dengan teks yang lain. Dengan ini Kristeva telah menawarkan sebuah konsep intertekstualitas untuk menunjukkan bagaimana satu atau lebih sistem tanda diubah urutannya ke dalam urutan yang lain. Dan kepentingan politik dan kuasa 'berpotongan' di dalam tanda. Walaupun kelompok kuasa dominan 'pada waktu tertentu' akan mendominasi produksi intertekstual dari makna, bukan berarti oposisi direduksi menjadi sebuah kebisuan total, karena pergulatan kuasa berpotongan di dalam tanda.

Kristeva mendefinisikan 'perempuan' ( hampir senada dengan Irigaray) sebagai sesuatu yang strategis. Namun Kristeva tidak memiliki suatu teori tentang 'feminitas' dan bahkan tentang 'keperempuanan', ini dikarenakan Kecurigaan Kristeva yang mendalam terhadap identitas membawanya untuk menolak setiap gagasan tentang *écriture feminine* akan secara inheren feminin atau perempuan. Selain itu Kristeva tidak ingin mendefinisikan penindasan feminin sebagai sebuah esensi namun lebih sebagai sebuah posisionalitas yang dihubungkan dengan konsep marginalitas. Walaupun dengan konsep 'posisionalitas' itulah Kristeva mendapat banyak kritik karena telah berusaha mengeluarkan perempuan dari eksistensinya, dan dianggap keluar dari fondasi perjuangan feminis. Sebaliknya yang dimiliki Kristeva hanyalah teori tentang marginalitas, subversi dan disiden/penolakan, misalnya tentang perempuan yang didefinisikan marginal terhadap patriarki, dalam hal yang sama dapat berlaku pada pergulatan apapun dengan struktur kuasa yang terpusat.



Seperti contohnya 'feminitas' dan 'semiotika'. Sebagaimana feminin didefinisikan marjinal di bawah patriarki, demikian pula semiotika marjinal terhadap bahasa.

Dan sumbangan yang cukup penting dari karya Kristeva terhadap kajian feminisme yaitu mengenai 'analisis identitas pra-Oedipal', dimana perempuan di dalam 'ekonomi psikis' dan kebudayaan ini telah kehilangan banyak hal dikarenakan identifikasi mereka dengan sang ayah juga merupakan identifikasi dengan ayah sebagai figur simbolik utama. Bahkan mereka tidak bisa kehilangan identitas itu dengan kembali melalui memori ketidaksadaran pada *jouissance* (kepuasan) dari ikatan awal mereka dengan ibu.

Walaupun terkadang karya-karyanya cukup kontroversial, namun Kristeva telah menyumbangkan perspektif baru dalam kajian feminisme melalui perhatiannya yang seksama mengenai permasalahan marjinalitas dan subversi, dekonstruksi radikalnya tentang identitas subyek, dan pertimbangannya yang sangat luas terhadap konteks material dan sejarah dari karya seni yang dia pelajari.

Terlepas dari pemikiran Kristeva mengenai subordinasi feminin, banyak yang bertanya-tanya mengenai persamaan pemikiran Kristeva dan Irigaray. Dalam tulisan Sarup Madan, *Postrukturalisme dan Posmodernisme : Sebuah Pengantar Kritis (2003)*, kita akan mendapatkan jawaban mengenai hal tersebut. Menurut Sarup<sup>18</sup>, ada lima persamaan Kristeva dan Irigaray. Pertama, Kristeva dan Irigaray sama-sama terbiasa

---

<sup>18</sup> Madan Sarup, *Postrukturalisme dan Posmodernisme (2003 : 214)*



dengan karya-karya Freud, dan memiliki pengetahuan tentang Lacanian. Kedua, mereka sama-sama menerima antihumanisme Lacanian, komitmen pada peran penting bahasa dalam kehidupan psikis, dan pemahaman tentang posisi yang pasti bersifat seksual yang diasumsikan subyek dalam dunia simblik. Ketiga, keduanya memfokuskan diri pada pola hubungan yang kabur dalam karya-karya Freud dan Lacan : pola hubungan ibu-anak (Kristeva) dan hubungan ibu-anak perempuan (Irigaray). Keempat, keduanya menerima kekuatan kuno pra-Oedipal, yang meskipun ditindas, tetap dipertahankan secara permanen. Terakhir, keduanya menerima status menyimpang dorongan libidinal yang polimorf dan cair.

Feminis seperti Luce Irigaray, Helena Cixous, dan Julia Kristeva telah memilih menggunakan strategi yang berbeda daripada tradisi feminis Anglo-Amerika pendahulunya. Ini merupakan suatu perspektif baru dalam kajian feminis dengan mempersoalkan 'destabilisasi subyek' sebagai suatu taktik dalam mengungkap kuasa maskulin.

Dalam hal ini peneliti akan memakai beberapa analisis dari feminis dekonstruktif ini untuk memahami permasalahan penelitian dengan memakai konsep destabilisasi subyek. Unsur-unsur linguistik seperti bahasa juga akan menjadi fokus perhatian peneliti. Untuk lebih mengenal bagaimana metodologi perspektif yang baru ini, peneliti akan membahasnya lebih lanjut di bab selanjutnya.



## BAB III

### METODOLOGI

#### 3.1 Analisis Wacana Foucauldian

Analisis wacana Foucauldian dimulai dengan pembahasan wacana dan hubungan antara wacana, 'pradiskursif', dan 'ekstradiskursif'. Foucault menyatakan bahwa wacana tidak sekedar konsep, melainkan bahwa wacana memiliki realitas obyektif, dengan kata lain wacana memiliki suatu kualitas 'eksterioritas'. Foucault menginginkan sebuah pemolaan 'rezim diskursif' dan 'relasi' di dalam masyarakat.

Secara metodologis Foucault menginginkan untuk mengeksplor hubungan internal antara 'unsur-unsur', seperti subyek, obyek, hubungan, dan lain-lain, yang membuat wacana tertentu menjadi sedemikian rupa. Dalam penjelasan Ritzer (2003) Foucault memfokuskan dirinya untuk membahas tentang diskursus sebagai praktik, bukannya peduli pada manusia dan apa yang mereka katakan. Dalam memahami praktik diskursusnya, Foucault memulai dengan kesatuan-kesatuan yang ada hanya untuk membongkarnya, mendekonstruksinya dalam bagian tertentu. Foucault ingin membebaskan peristiwa diskursif (sebagai obyek) dari manusia (subyek) yang terlibat didalamnya.

Foucault menggambarkan lima tahap proses untuk menganalisis ranah peristiwa diskursif:

1. Memahami pernyataan menurut kejadian yang sangat khas
2. Menentukan kondisi keberadaannya



3. Menentukan sekurang-kurangnya limitnya
4. Membuat korelasinya dengan pernyataan yang lain yang mungkin terkait dengannya
5. Menunjukkan apa bentuk lain pernyataan yang dia keluarkan

Yang perlu diingat bahwa Foucault pada awal-awal analisisnya tertarik pada penggunaan regularitas yang terdapat dalam diskursus. Menurutny regularitas tersebut ada pada berbagai jenis hubungan-hubungan, hubungan antara pernyataan, antara kelompok-kelompok pernyataan, dan hubungan antara pernyataan dan pernyataan kelompok-kelompok dan peristiwa yang sungguh berbeda jenisnya.

Lebih khususnya Foucault tertarik dalam formasi diskursif dimana sistem yang tidak sama ada diantara pernyataan dan dimana ada regularitas diantara elemen-elemen seperti obyek-obyek, tipe-tipe pernyataan, konsep-konsep atau pilihan-pilihan tematik. Semua elemen-elemen itu, menurutny adalah subyek bagi aturan-aturan formasi atau eksistensi kondisi dalam divisi diskursif yang ada. Jadi ada aturan-aturan bagi formasi konsep-konsep yang dia periksa dan tidak dijumpai dalam teks-teks individu tertentu atau bahkan dalam sains pada saat pembahasan-pembahasan tertentu. Aturan formasi konsep ini beroperasi tidak hanya dalam pikiran atau kesadaran individu, namun dalam diskursus itu sendiri. Dia beroperasi dalam semua individu yang berbicara dalam ranah diskursif. Foucault tertarik dalam kesamaan dan perbedaan diantara konsep dalam ranah ini.



Analisis Foucauldian digunakan peneliti dalam studi ini yaitu dalam menganalisis bagaimana sebuah proses tematik terjadi dalam peristiwa-peristiwa diskursif. Ada sebuah formasi-formasi diskursif dalam setiap pernyataan-pernyataan perempuan korban kekerasan ekonomi. Ada sebuah kuasa yang beroperasi dalam membuat aturan-aturan atau regulasi dalam diskursusnya. Regulasi dalam peristiwa diskursus itulah yang ingin ditemukan oleh peneliti.

Analisis Foucauldian bagi peneliti membantu menunjukkan operasi maupun praktik-praktik yang sedang berlangsung, dalam pernyataan-pernyataan dari perempuan-perempuan korban kekerasan ekonomi tersebut dan juga teks-teks serta mitos Jawa-Suroboyoan yang melatarbelakangi kehidupan asal mereka. Karena peneliti menganggap bahwa ada semacam narasi besar yang coba untuk dijadikan "mitos" dalam meregulasi konsep diri maupun identitas perempuan-perempuan tersebut.

### **3.2 Pemilihan Informan**

Pada awal penyusunan penelitian ini peneliti merasa pesimis, mengingat kekerasan ekonomi adalah kekerasan yang tidak mudah ditemukan. Hal ini dikarenakan bahwa kekerasan ekonomi diantara kekerasan-kerasan yang lainnya adalah kekerasan yang paling banyak diingkari dan bahkan tidak dianggap sebagai kekerasan. Kemudian peneliti awalnya mencoba menjalin hubungan dengan salah satu LSM perempuan di Surabaya. Melalui berbagai diskusi yang serius tapi santai, akhirnya peneliti mendapat kesediaan dari para aktivis perempuan di sana



untuk bisa berhubungan langsung dengan informan dicari. Namun, kerjasama tersebut dibatalkan karena LSM tersebut ternyata tidak memiliki klasifikasi sendiri pada kekerasan ekonomi, kekerasan ekonomi dimasukkan pada kekerasan psikologis. Kemudian peneliti, melalui internet menemukan LSM yang memiliki klasifikasi kekerasan ekonomi tersendiri yaitu P3A. Peneliti mencoba menjalin hubungan kerjasama dengan LSM tersebut, namun peneliti ternyata terbentur dengan kode etik LSM yang tidak akan pernah membiarkan pihak luar termasuk peneliti sendiri untuk menyentuh klien. Hal ini dikarenakan klien adalah sangat rahasia, dan klien bukanlah obyek.

Dari dua pengalaman diatas peneliti memutuskan mencari sendiri informan yang akan dipilih. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses penelitian. Namun peneliti berusaha untuk menjaga agar penelitian ini tetap memiliki kedalaman data yang akurat.

Dalam proses penelitian ini akhirnya peneliti berhasil mendapat dua informan. Informan pertama adalah ibu paruh baya yang memiliki 3 anak. Sebut saja namanya mbak Melati. Peneliti pertama kali mendapat informan mengenai mbak Melati dari sahabatnya semasa kuliah. Kemudian, untuk selanjutnya peneliti langsung berhubungan langsung dengan informan pertama. Untuk informan kedua peneliti juga mendapat informasi langsung dari sahabatnya yang kebetulan juga teman kuliah peneliti. Kemudian peneliti berhubungan langsung dengan informan, tetapi tetap didampingi sahabat informan.



Selanjutnya peneliti kesulitan menemukan karakteristik perempuan korban kekerasan ekonomi. Kemudian peneliti memutuskan untuk merujuk pada tiga sumber yaitu perspektif LSM, UU No 23 Th 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan penelitian yang dilakukan Erlina Maya Novrita tentang Konstruksi dan Respon Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun dengan berbagai usaha, akhirnya peneliti dapat menemukan definisi kekerasan ekonomi yang tegas dan jelas dari LBH APIK Jakarta.

Dengan pertimbangan di atas maka peneliti mendefinisikan perempuan korban kekerasan ekonomi sebagai perempuan yang mengalami eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya, mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban, dan melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Definisi tersebut akan digunakan peneliti untuk menentukan informan yang akan dipilih.

Dalam penelitian ini peneliti menggolongkan informan menjadi dua golongan. Pertama, perempuan yang mengalami kekerasan ekonomi berat yaitu informan pertama yang tidak dinafkahi dan ditelantarkan selama berumah tangga. Kedua, perempuan yang mengalami kekerasan ekonomi berat yaitu informan kedua yang dilarang bekerja oleh suaminya.



Selain kedua informan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara pada dua nara sumber atau informan ahli. Informan ahli yang pertama adalah seorang pakar budaya Jawa. Peneliti melakukan wawancara dengan pakar budaya tersebut untuk melengkapi diskursus mengenai perempuan yang hidup dalam budaya Jawa. Sedangkan informan ahli yang kedua adalah seorang pakar komunikasi yang memahami soal isu-isu perempuan dan kekinian. Peneliti melakukan wawancara dengan pakar komunikasi tersebut supaya mendapat gambaran mengenai kondisi perempuan sekarang beserta isu-isu serta mitos-mitos kekinian.

### 3.3 Konsep Penelitian

#### ***Kekerasan ekonomi***

Pada awal penelitian ini, peneliti menemukan istilah "*financial abuse*" dari salah satu artikel di internet yang diterbitkan oleh *The Coburg Brunswick Community Legal and Financial Conselling Centre Inc.* yang merupakan salah satu lembaga konsultasi keuangan. Dalam publikasi tersebut peneliti sangat terkejut karena korban *financial abuse* tersebut adalah ibu-ibu rumah tangga, yang kemudian ketika bercerai juga tidak mendapat hak asuh pada anak-anaknya.

Selanjutnya peneliti mencoba mengamati kasus yang sama di Indonesia. Di Indonesia kekerasan ekonomi pada saat ini masih diingkari tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh regulasi kita dan bahkan perempuan sendiri. Dalam UU No 23 Th 2004 pasal 5, hanya menyebutkan tiga kekerasan yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan



sebagai tambahan kasus penelantaran rumah tangga. Definisi kekerasan ekonomi ini tidak bisa dengan jelas ditemukan, dan hanya bisa ditemukan karakteristiknya saja seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Erlina Maya Novrita (2000). Karena tidak puas maka peneliti kemudian mencari data di salah satu LSM perempuan di Surabaya. Sayangnya, pengklasifikasian kekerasan juga tidak jauh beda dengan UU yang ada. Bedanya, mereka memasukkan kekerasan ekonomi pada kekerasan psikis. Padahal semua kekerasan pasti memiliki dampak psikis yang relatif lama.

Untuk itulah kemudian peneliti memutuskan untuk mencari definisi kekerasan ekonomi di internet, dan peneliti mendapatkan definisi tersebut dari LBH APIK Jakarta, definisi tersebut tentunya hasil eksplorasi yang merujuk pada UU No 23 Th 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Definisinya sebagai berikut :

1. Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:
  - a. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
  - b. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
  - c. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.



2. Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Kekerasan ekonomi dimaksud RUU ini adalah tindakan-tindakan di mana akses korban secara ekonomi dihalangi dengan cara korban tidak boleh bekerja tetapi ditelantarkan, kekayaan korban dimanfaatkan tanpa seizin korban, atau korban dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan materi. Dalam kekerasan ini, ekonomi digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan korban.

### ***Negosiasi Peran***

Negosiasi adalah menyusun atau mengatur syarat-syarat yang berhubungan dengan kontrak, transaksi, atau perundingan dengan membicarakan hal-hal yang penting atau perlu dalam bekerjasama<sup>1</sup>. Negosiasi tak bisa dilepaskan dari proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam konteks penelitian ini negosiasi yang dimaksud adalah negosiasi peran yang dilakukan perempuan korban kekerasan ekonomi pada pihak suami.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Sebelum melakukan analisa data maka peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu. Tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data

---

<sup>1</sup> Scanzoni and Scanzoni : *Men, Women, and Change ; A Sociology of Marriage and Family*, McGraw-Hill, inc, 1976.



dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam atau indepth interview, observasi, dan data sekunder.

Yang pertama, wawancara mendalam, dalam teknik ini peneliti menggunakan ~~guide interview atau~~ pedoman wawancara yang bersifat fleksibel dan terbuka. Dalam arti bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan data. Peneliti menggunakan *recorder* dengan seijin informan untuk merekam semua data.

Sebelum melakukan wawancara peneliti mungkin akan melakukan beberapa pendekatan pada informan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti mendapatkan kepercayaan dari informan. Proses ini diharapkan peneliti sekaligus sebagai bentuk observasi mengenai kehidupan informan.

Yang kedua, data sekunder. Data sekunder ini berupa teks-teks dalam pewayangan Jawa-Suroboyoan, mitos-mitos dalam dunia "modern", serta wawancara tambahan dengan pakar budaya di Surabaya. Hal itu semua dilakukan agar peneliti mendapat gambaran mengenai representasi perempuan baik dalam dalam budaya Jawa-Suroboyoan maupun dalam mitos budaya "modern".



## BAB IV

### PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN EKONOMI

#### 4.1 Perempuan Indonesia dan Permasalahannya<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa, memiliki beraneka ragam budaya. Kemajemukan ini juga sebagai sebuah gambaran akan berbagai macam kondisi perempuan di seluruh Indonesia menurut budayanya masing-masing. Dalam laporan UNDP (United Nation Development Program) tentang *Human Development Index*, mengenai kualitas sumber daya perempuan Indonesia yang belakangan menurun dan berada pada urutan 102, posisi terendah di ASEAN meskipun di atas Birma, Kamboja dan Laos. Laporan tadi adalah sebuah peringatan bagi kita, bahwa kondisi perempuan di Indonesia sangat memprihatinkan.

Laporan lainnya yang dapat ditemukan adalah *Gender Development Index* oleh UNDP, diketahui bahwa kondisi perempuan Indonesia jauh dibawah pria tiga kali lebih banyak dalam mengenyam dunia pendidikan ketimbang perempuan. Demikian pula angka drop-out pendidikan formal perempuan lebih tinggi dari pria.

Masih mengenai perkembangan dan perbandingan kondisi perempuan di Indonesia, menurut BPS (Badan Pusat Statistik), saat ini perempuan yang tidak/belum pernah sekolah tercatat sebesar 13,5 persen, sedangkan laki-lakinya 6.0 persen. Sebuah prosentase yang

---

<sup>1</sup> Data-data permasalahan perempuan didapatkan dari Media Perempuan edisi no.5, Mei 2005.



sangat timpang, hal ini berarti bahwa jumlah perempuan yang tidak atau belum pernah mengenyam pendidikan jumlahnya dua kali lipat dari pria.

Sedangkan pada tingkat SD perempuan yang tidak tamat SD lebih rendah dibanding laki-laki, dengan perbandingan 32,1 persen perempuan, dan 32,9 persen laki-laki. Di tingkat SLTP, prosentase laki-laki yang tamat SLTP 13,7 persen dan perempuan 15,9 persen. Perbedaan mencolok terjadi pada jenjang pendidikan SMU/SMK, dengan perbandingan 20,5 persen laki-laki dan 14,9 persen perempuan yang menamatkan jenjang pendidikan SLTA-nya.

Masalah pendidikan memang masalah yang cukup krusial. Hampir semua perempuan di Indonesia mengalami hambatan budaya. Dalam suatu keluarga misalnya, jika keadaan ekonomi terbatas dan harus memilih antara anak laki-laki dan anak perempuan untuk disekolahkan maka keluarga cenderung memilih anak laki-laki. Hal ini juga tidak lepas dari kepercayaan 'keluarga suci', dimana ada ayah, ibu dan anak. Dan ketiganya menjalankan peran sebagaimana direpresentasikan oleh masyarakat yang phallosentris. Ayah sebagai pencari nafkah, ibu sebagai ibu rumah tangga, dan anak sebagai generasi penerus keluarga. Dan anak laki-laki mendapat perlakuan khusus karena kelak harus berperan sebagai kepala rumah tangganya. Alasan-alasan oedipal inilah yang kerap kali dipakai oleh keluarga untuk lebih memilih anak laki-laki untuk disekolahkan.

Dalam bidang kesehatan, sedikitnya 50 persen perempuan mengalami anemia, kekurangan energi kalor sebanyak 18 persen.



Kondisi buruk ini diperparah lagi oleh tingginya angka kematian ibu akibat hamil dan melahirkan yang mencapai 340 per 100.000 kelahiran hidup dan merupakan tertinggi di ASEAN. Semua laporan kondisi kesehatan perempuan tersebut berasal dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 1997.

Di sektor ekonomi, partisipasi angkatan kerja perempuan hanya 51 % sementara pria 86 %, sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal, dan sebagian besar pria bekerja di sektor formal. Sedangkan dalam pengupahannya, pria menerima upah 100 %, sementara perempuan hanya 60 %.

Usaha-usaha untuk memperbaiki kondisi perempuan di Indonesia telah coba dirintis oleh kementerian pemberdayaan perempuan dengan memprioritaskan masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan tenaga kerja sebagai *gender mainstreaming*, dan memberikan dukungan penuh terhadap peraturan perundang-undangan yang memfokuskan pada perempuan dan anak, termasuk juga tentang agama, sosial dan budaya. Dan bersama pihak terkait termasuk LSM, akan segera disusun satu kebijaksanaan yang berkaitan dengan *gender mainstreaming*.

Usaha-usaha itu tampak pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kebijakan tersebut antara lain Keppres No. 87/2002 tentang Rencana Aksi Nasional Eksploitasi Perempuan dan Komersialisasi Anak, Keppres No.88/2002 tentang anti trafficking, dan UU No.7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk



Diskriminasi terhadap Perempuan dan Anak, yang jelas, tegas dan kuat secara hukum yang sudah dimiliki.

Khusus penanganan perempuan dan anak di daerah konflik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan membentuk 'trauma center'. Wadah ini dibentuk kerjasama dengan LSM, tugasnya memberikan bantuan psikologis, fisik maupun psikis terhadap perempuan dan anak korban konflik. Dan saat ini telah dibangun tiga 'trauma center' di daerah konflik Maluku Utara, dan satu di Ambon, di Belu dan Kupang (perbatasan Timor Leste dan NTT), termasuk masing-masing satu di Pidie maupun Lhokseumawe.

Bahkan upaya tersebut rencananya juga dilakukan di daerah rawan GAM. Namun karena status Aceh masih darurat militer, maka sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan tidak bisa terlibat secara langsung. Kementerian Pemberdayaan Perempuan bekerjasama dengan LSM juga mempunyai program pemberdayaan perempuan di sektor usaha ekonomi keluarga.

Permasalahan perempuan Indonesia lainnya adalah masalah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Masalah TKI sering mendapat sorotan dari berbagai pihak terutama aktivis perempuan. Pemerintah terkadang dinilai terlalu lamban dalam mengatasi berbagai permasalahan yang menyangkut TKI terutama punglisasi yang makin marak. Padahal, TKI kita membawa devisa yang tidak sedikit bagi negara ini.

Kementerian pemberdayaan perempuan sendiri mengusulkan tiga hal berkaitan dengan pengiriman tenaga kerja perempuan ke luar negeri.



Pertama, diharapkan jajaran pemuda (Depdagri) bisa mengeluarkan surat keterangan jaminan tentang kejelasan identitas tenaga kerja perempuan dari daerah asal keberangkatan. Surat ini harus asli dan tidak direkayasa.

Kedua, Depnaker seyogyanya mengawasi pelaksanaan pelatihan bagi tenaga kerja perempuan oleh PJTKI. Jangan sampai terjadi, pelatihan yang seharusnya berlangsung selama 14 hari, ternyata hanya dilaksanakan dalam waktu 2-3 hari. Diharapkan tenaga kerja perempuan yang dikirim ke luar negeri memiliki kemampuan kemampuan dan bersertifikat siap kerja. Mereka yang dikirim ke luar negeri janganlah yang buta huruf, melainkan yang betul-betul memiliki pendidikan.

Ketiga, penempatan tenaga kerja perempuan di luar negeri harus dialporkan kepada KBRI setempat. Selain itu, kontrak yang ditandatangani antara majikan dan tenaga kerja harus jelas dan detail, dan diketahui oleh KBRI. Kalau perlu, KBRI memegang dokumen dan data-data tenaga kerja.

Keempat, sistem pemulangan tenaga kerja perempuan dari Bandara Soekarno-Hatta ke daerah asal hendaknya ditata kembali. Pengiriman tenaga kerja itu seharusnya menggunakan angkutan yang benar-benar profesional. Selama ini, angkutan yang digunakan adalah kendaraan sewaan dan sopir tembak.

Berkaitan dengan masalah TKI tersebut, Indonesia juga menghadapi masalah trafficking. Permasalahan yang sudah lama menjadi isu hangat dan selalu dikaitkan dengan pengiriman TKI ke luar negeri.



Untuk meningkatkan kewaspadaannya tersebut, Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan Malaysia untuk peningkatan kualitas perempuan. Indonesia juga menjadi anggota dan forum khusus di antara negara ASEAN yang menangani masalah trafficking. Indonesia juga termasuk anggota ASEAN Community for Women Meeting. Pertemuan ini diselenggarakan setiap tahun. Selain melakukan sharing dan diskusi, negara anggota sepakat untuk memberikan bantuan bagi negara yang lemah dalam soal perempuan. Wadah serupa juga didirikan berkaitan dengan masalah narkoba, HIV-AIDS dan sejenisnya. Selain itu, juga mengembangkan kemitraan dengan ESCAP, Unicef, UNDP, UNFPA, termasuk dengan *Committee on Status For Women* (Lembaga PBB yang bertugas menangani masalah perempuan).

Jika kita berbicara mengenai perempuan Indonesia dan permasalahannya, maka kita tidak bisa lepas begitu saja dari masalah yang paling sering dibicarakan yaitu kekerasan.

#### **4.2 Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga<sup>2</sup>**

Lahirnya Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga No.23 Tahun 2004 mengundang banyak reaksi dalam masyarakat. Ada yang mengkhawatirkan undang-undang tersebut akan melampaui peran istri dalam batas-batas yang ditetapkan agama. Ada juga yang khawatir undang-undang tersebut akan membuat perempuan 'lupa diri' pada kodratnya sebagai istri. Namun juga ada yang merasa undang-undang tersebut masih perlu dikritisi, seperti yang dikemukakan oleh Nursyahbani

---

<sup>2</sup> Data-data kekerasan yang ditangani LBH APIK didapat dari SUARA APIK edisi no.25 dan 28, tahun 2005.



Katjasungkana, dkk di LBH APIK. Melalui medianya 'Suara APIK', pembahasan undang-undang tersebut menjadi lebih dalam.

Sebelum membahas lebih lanjut undang-undang tersebut, perlu diketahui bahwa undang-undang ini merupakan inisiatif dari kelompok perempuan yang dalam pekerjaannya bersentuhan langsung dengan para korban KDRT. Dipelopori oleh sejumlah LSM/Ormas Perempuan yang tergabung dalam Jangkar (1998-1999), terdiri dari LBH-APIK Jakarta (sebagai penggagas dan pembuat draft awal sejak tahun 1997), Rifka An-Nisa, Kalyanamitra, Mitra Perempuan, Fatayat dan Muslimat NU, Gembala Baik, Savy Amira, SPeAK, LBH-Jakarta dan Derap Warapsari. Selanjutnya ketika melebur menjadi Jaringan PKTP (Jaringan Advokasi Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan) (2000-2004), anggota jaringan semakin bertambah menjadi 92 LSM/Ormas Perempuan, lembaga-lembaga profesional seperti lembaga advokat juga turut terlibat dalam mengadvokasikan UU PKDRT ini.

Kritik pertama pada UU PKDRT tersebut ada pada tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Banyak yang menganggap bahwa UU PKDRT ini akan memberikan peluang besar pada bubarnya perkawinan dan meningkatnya angka perceraian. Yang kedua, pada pasal 15 yang mengatur masyarakat untuk wajib melakukan pencegahan KDRT dan memberikan perlindungan pada korban KDRT. Pasal ini dianggap utopis oleh para aktivis perempuan, karena pasal ini akan sangat berbenturan dengan budaya dalam masyarakat kita yang memarginalkan perempuan baik dalam dunia nyata maupun dunia



simbolik. Pasal lainnya yang kontroversial lainnya adalah pasal 8 yang mengatur kekerasan seksual. Pasal ini dianggap rancu karena 'pemaksaan hubungan seksual' dijelaskan secara global. Pemahaman literal atas teks mengenai kewajiban istri 'melayani' suami bisa menimbulkan efek psikologis bagi perempuan.

Kekerasan ekonomi dalam rumah tangga dirumuskan dalam UU PKDRT dengan istilah penelantaran rumah tangga. Seperti yang diatur dalam pasal 9 (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Pasal ini lagi-lagi diklaim bisa menjadi legitimasi istri untuk menuntut sang suami ke pengadilan dengan alasan suami melarang istrinya bekerja. Padahal pasal ini ada, diantaranya karena banyaknya kasus penelantaran istri dan anak yang dilakukan oleh suami. Jika ditelaah lebih jauh lagi pada pasal 9 (1) ini tidak secara jelas menyebut bahwa yang wajib mencari nafkah adalah suami. Pasal ini tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa suami adalah pencari nafkah. Yang menjadi inti persoalan dalam pasal ini adalah penelantaran nafkah terjadi ketika salah satu pihak (suami atau istri) maka sudah dapat dipastikan ketika KDRT terjadi, ada satu pihak



yang akan kesulitan secara ekonomi. Ketika akses ekonomi hanya dimiliki oleh salah satu pihak (suami istri) maka sudah dapat dipastikan ketika KDRT terjadi, ada satu pihak yang akan kesulitan secara ekonomi karena selama ini hidupnya bergantung kepada pihak yang lainnya, sementara dia sama sekali tidak memiliki akses ekonomi sejak awal. Oleh karenanya, pasal ini mengatur bahwasannya pihak yang memiliki akses ekonomi yang lebih baik agar tidak menelantarkan pihak lainnya yang tidak memiliki akses ekonomi. Selain itu, membuat seseorang pihak bergantung akibat pelarangan bekerja di dalam atau di luar rumah juga merupakan suatu bentuk kekerasan yang diatu dalam pasal penelantaran rumah tangga (Ps 9 ayat 2)

Permasalahan perempuan dan kekerasan tidak berhenti pada pembahasan undang-undangnya saja, namun juga pada pelaksanaannya di lapangan. LBH-APIK sebagai salah satu medium pelayanan perempuan memberikan laporannya mengenai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di sepanjang tahun 2004.

**Tabel 1**  
**Data Kasus KDRT LBH APIK Jakarta**  
**Tahun 2004**

No	Bentuk	Jumlah
1	Kekerasan Fisik	77
2	Kekerasan Psikis	201
3	Kekerasan Ekonomi	104
4	Kekerasan Seksual	7

Sumber : LBH APIK Jakarta



Masih seperti tahun-tahun sebelumnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kasus yang paling banyak masuk ke LBH APIK Jakarta yakni berjumlah 389 kasus. Kasus KDRT tersebut meliputi : 77 kasus kekerasan fisik, 201 kasus kekerasan psikis, 104 kasus kekerasan ekonomi dan 7 kasus kekerasan seksual.

Sedangkan, menurut data media (Pos Kota, Warta Kota dan Kompas), selama bulan Januari sampai Desember 2004 terjadi paling sedikit 73 kasus KDRT. Adapun motif kekerasan suami atas istri yang berhasil diidentifikasi dari berita media diantaranya adalah suami cemburu, suami marah saat dimintai nafkah, suami marah karena istri menolak berhubungan badan dan perebutan warisan antara suami istri. Bila dibandingkan dengan jumlah kasus yang telah masuk ke LBH APIK Jakarta, terlihat data KDRT yang dihimpun sejumlah media ini jauh lebih kecil dari realitas yang terjadi. Diyakini, kasus KDRT yang terjadi akan tetapi tidak direkam oleh media jumlahnya jauh lebih banyak. Apalagi kasus KDRT yang terekam oleh media umumnya adalah kekerasan fisik dan seperti mengabaikan bentuk KDRT lainnya (ekonomi, seksual, psikis).

Dari kasus-kasus KDRT yang berhasil ditangani oleh LBH-APIK Jakarta, dapat digaris bawahi catatan-catatan penting sebagai berikut :

Pertama, selama tahun 2004 telah dijatuhkan dua putusan pengadilan kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang didampingi oleh LBH-APIK Jakarta. Di tahun-tahun sebelumnya, hanya ada satu kasus KDRT dampingan LBH-APIK yang selesai sampai tahap putusan.



Dalam dua putusan paling akhir tersebut, pelaku dikenakan sanksi 8 bulan dan setengah tahun penjara. Meskipun terbilang ringan, jika dibandingkan dengan putusan hakim sebelumnya yang hanya menjatuhkan sanksi percobaan terhadap pelaku KDRT, dua putusan hakim terakhir dinilai 'cukup progresif'. Setidaknya, putusan-putusan tersebut dapat dijadikan acuan para hakim dalam memutus kasus KDRT lainnya. Esensinya, kasus KDRT bukanlah kasus privat yang dapat diselesaikan hanya di lingkup keluarga saja tanpa memberikan efek jera bagi pelaku.

Kedua, sikap dan respon aparat dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, untuk tahun ini, cukup tanggap dalam menerima laporan. Pada tahun 2004, tidak ada penolakan dari aparat ketika korban KDRT yang kasusnya ditangani LBH-APIK Jakarta melaporkan kekerasan yang dialaminya. Di tahun-tahun sebelumnya, aparat cenderung untuk menolak atau tidak mau menerima laporan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalihnya, hal yang dilaporkan adalah masalah rumah tangga sehingga sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan.

Dalam proses pemeriksaan kekerasan fisik dalam rumah rumah tangga, aparat (khususnya RPK) tidak lagi berpihak pada suami dan 'mencari-cari' kesalahan pelapor. Aparat juga cenderung tidak lagi mendamaikan korban dan pelaku. Dengan demikian, kami melihat ada pergeseran pemahaman aparat atas permasalahan KDRT, KDRT mulai dipandang sebagai bentuk kejahatan publik dan bukan lagi dianggap



sebagai masalah privat. Namun, perlu kami sampaikan bahwa perubahan sikap aparat ke arah yang lebih baik ini kami cermati sebatas sikap aparat RPK Polres karena sebagian besar kasus yang didampingi LBH-APIK Jakarta adalah di tingkat RPK Polres.

Ketiga, Kami mencatat tingginya kasus kejahatan perkawinan (suami menikah lagi atau poligami tanpa ijin) yang masuk ke LBH-APIK Jakarta yaitu sebesar 23 kasus. Sayangnya, dari 23 kasus hanya satu kasus yang berhasil dibatalkan oleh pihak KUA yang mengawinkan suami mitra dengan perempuan lain tanpa seijin mitra. Langkah ini ditempuh KUA setelah mitra melaporkan kasus perkawinan tanpa ijin suaminya (poligami) kepada KUA terkait. Selebihnya, karena kebanyakan perkawinan poligami dilakukan dibawah tangan maka penanganan kasus poligami masih sulit ditindaklanjuti karena terbentur masalah pembuktian.

Keempat, sepanjang tahun lalu kasus kekerasan ekonomi dalam rumah tangga didominasi oleh kasus penelantaran nafkah istri dan anak oleh suami. Tidak banyak kasus penelantaran nafkah yang dapat diselesaikan dan kasus yang sudah 'diselesaikan' pun masih jauh dari harapan korban. Upaya hukum yang dilakukan adalah mengadakan proses mediasi atau musyawarah (sepuluh kasus) dengan mengundang pelaku ke LBH-APIK Jakarta. Dari sepuluh kasus tersebut hanya empat kasus yang berhasil mencapai kesepakatan atau titik temu. Kebanyakan mitra (80 kasus) yang mengalami kasus kekerasan ekonomi memilih untuk mengajukan gugatan perceraian.



Kelima, angka kasus kekerasan seksual dalam perkawinan (marital rape) yang diajukan ke LBH-APIK Jakarta cukup tinggi yaitu berjumlah 7 kasus. Ketujuh korban kekerasan seksual yang melapor ke LBH-APIK Jakarta, selain mengalami KDRT seksual juga mengalami kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi. Umumnya, korban baru menceritakan kekerasan seksual yang dialaminya setelah mengungkapkan kekerasan-kekerasan lain yang dialaminya. Pemahaman mitra tentang, 'apa yang dimaksud kekerasan seksual' dan 'apa yang dialaminya adalah bentuk kekerasan seksual' mulai terbangun. Dalam budaya masyarakat yang menganggap seksualitas sebagai sesuatu yang tabu dibicarakan, hal ini kami lihat sebagai suatu kemajuan.

Sementara itu, kendala-kendala yang dihadapi LBH-APIK Jakarta dalam menangani kasus KDRT, adalah sebagai berikut :

Pertama, kesadaran mitra untuk melakukan upaya hukum atas kasus KDRT belum mengalami kemajuan yang berarti. Sebagaimana ditemukan di tahun-tahun sebelumnya, minimnya kesadaran disebabkan oleh beberapa faktor seperti kendala ketergantungan secara ekonomi dengan pasangannya. Mitra yang selama ini tidak memiliki akses ekonomi umumnya khawatir tidak dapat membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak jika pelaku (suaminya) dihukum. Sebagian mitra tidak menginginkan pelaku dihukum, mereka hanya mengharapkan, mereka hanya mengharapkan pelaku dapat merubah perilaku mereka. Perubahan perilaku ini diharapkan mitra akan berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak. Ketakutan mitra



atau korban menjadi target balas dendam dari pelaku jika pelaku dihukum penjara turut menjadi salah satu kendala. Sistem hukum yang tidak berpihak pada korban menimbulkan rasa takut akan adanya penuntutan atau pelaporan baik oleh pelaku. Beberapa mitra bahkan mencabut kasusnya di tengah jalan. Kendala-kendala ini mengakibatkan cukup banyak kasus KDRT yang tidak lanjut sampai ke pengadilan.

Pengalaman LBH-APIK Jakarta dalam menangani kasus-kasus KDRT dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa korban KDRT lebih memilih untuk menempuh proses perceraian ketika dia tidak lagi mentolerir kekerasan yang menimpanya.

Kedua, pelaksanaan putusan-putusan cerai yang memuat kewajiban suami untuk membayar nafkah seringkali terhambat dan tergantung pada 'niat baik' mantan suami. Pemberian sanksi yang diatur dalam UU PKDRT terhadap pelaku kekerasan ekonomi, sayangnya tidak menjangkau masalah nafkah paska perceraian. Putusan lebih mudah dieksekusi jika mantan suami adalah PNS sehingga dapat dilakukan penekanan melalui intensinya. Sementara, penyelesaian kasus-kasus penelantaran nafkah oleh suami dalam kondisi siam-istri masih terikat perkawinan (belum terjadi perceraian) dan suami bekerja di perusahaan swasta atau wiraswasta, sangat sulit diselesaikan.

Dari aspek kebijakan, setelah melalui masa advokasi selama kurang lebih 7 tahun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) akhirnya diundangkan dan disahkan pada bulan September 2004 menjadi UU No. 23 th 2004. Meskipun tidak



semua usulan LBH-APIK Jakarta bersama dengan elemen gerakan perempuan yang lain (terutama Jaringan Jangka PKTP) diakomodir dalam kebijakan tersebut, lahirnya UU PKDRT menjadi tonggak sejarah perjuangan pergerakan perempuan dalam mengangkat kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sekat antara ranah domestik dan publik, dalam konteks ini, mulai terkikis. Namun, perlu diasadari bersama bahwa lahirnya UU PKDRT bukanlah akhir dari langkah advokasi penghapusan KDRT. Komitmen pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan melaksanakan UU PKDRT harus terus diuji, ditinjau kembali ke-konsistennya.

Meskipun UU ini sudah berlaku satu bulan sejak disahkan (menurut rapat paripurna DPR), namun dalam pelaksanaannya UU ini belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Ini tercermin dari ketidaktahuan dan ketidakyakinan aparat penegak hukum yang menangani kasus KDRT kan keberadaan UU tersebut. Seandainya pun aparat terkait mengetahui adanya UU PKDRT, mereka lebih memilih untuk tidak menggunakan pasal yang ada di UU PKDRT dengan alasan, "belum ada pelaksanaannya."

#### **4.3 Perempuan Surabaya dan Kekerasan ekonomi**

Tidak banyak yang tertarik membicarakan kekerasan ekonomi sebagai sebuah kekerasan terutama jika dikaitkan dengan rumah tangga. Pembagian gender tradisional dalam keluarga telah memarjinalkan perempuan baik secara simbolik maupun nyata dalam dunia ekonominya. Perempuan telah diwacanakan sebagai 'pendamping' laki-laki dalam



rumah tangga sehingga aktivitas apapun yang dilakukan perempuan adalah sebagai upaya membantu suami. Termasuk ketika perempuan memasuki dunia kerja, di rumah perempuan harus kembali menjalani peran sebagai istri yang 'baik'. Wacana tersebut tidak pernah berbicara siapa perempuan sesungguhnya, tetapi hanya berbicara perempuan menurut representasi phallosentrisme dan laki-laki sebagai simbol utamanya.

Keadaan perempuan yang secara simbolik termarginalkan ini, ternyata tidak sepenuhnya didukung oleh keadaan perundang-undangan di negara kita. Dalam UU No.23 Th 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, secara eksplisit tidak disebutkan mengenai kekerasan ekonomi, tetapi kasus penelantaran rumah tangga. Belum lagi perdebatan mengenai kekerasan ekonomi masih terlalu kompleks. Bahkan beberapa LSM belum memasukkan kekerasan ekonomi sebagai kekerasan.

Permasalahan-permasalahan kekerasan sebenarnya makin berkembang dari masa-kemasa. Dahulu kekerasan ekonomi dipandang sebagai bentuk penelantaran ekonomi saja atau bentuk pengupahan yang minim dari perusahaan. Saat ini wacana kekerasan ekonomi pelan-pelan mulai lebih berani dibicarakan. Misalnya soal harta gono-gini atau harta setelah bercerai. Atau masalah pembatasan 'yang disengaja' atas akses ekonomi perempuan dan masih banyak contoh yang lainnya.

Dalam beberapa rekaman kasus yang didapat dari KPPD Surabaya, periode 25 November 2003-25 November 2004 yang disarikan dari harian memorandum menunjukkan terdapat 19 kasus



kekerasan psikis. Sedangkan kekerasan psikis didominasi oleh kasus penelantaran istri atau istri tidak dinikahi. Kekerasan jenis ini dapat digolongkan kekerasan ekonomi.

Data lainnya juga bisa didapat dari Pusat Studi Wanita Universitas Airlangga (PSW Unair) Surabaya. Dari data tersebut kita dapat melihat bahwa jumlah korban kekerasan ekonomi yang melaporkan diri baru ada di sepanjang tahun 2003 dengan jumlah 1 orang dan tahun 2004 berjumlah 4 orang. Bahkan pada tahun 2002 belum ada satupun korban yang mau membuka diri dan melapor.





**Tabel 2**  
**Jenis Kasus Kekerasan**  
**Yang Ditangani PSW Unair**  
**April 2002-Desember 2004**

No	Jenis Kasus	April s/d Desember 2002		Sepanjang Tahun 2003		Januari s/d Desember 2004	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	KDRT	13	40.6	40	47	63	48
2	Kekerasan seksual	9	28.1	25	29	40	30.5
3	Kekerasan dalam pacaran	1	3.1	6	7.1	8	6.1
4	Kekerasan dalam hub kerja	3	9.4	3	3.5	3	2.3
5	Broken Home	1	3.1	1	1.1	-	-
6	Kasus kespro remaja	4	12.5	2	2.3	-	-
7	Kekerasan Ekonomi	-	-	1	1.1	4	3
8	Kekerasan terhadap anak	1	3.1	2	2.3	8	6.1
9	Penganiayaan	-	-	3	3.5	5	3.8
10	Trafficking	-	-	2	2.3	0	-
	JUMLAH	32	100	85	100	131	100

Sumber : PSW Unair Surabaya

Sedangkan untuk bentuk pelayanan yang diberikan antara lain berupa konseling, shelter, kantor kepolisian, rumah sakit, pengadilan negeri, dan pengadilan agama. Dari tahun ke tahun pelayanan ini lebih didominasi oleh konseling yaitu 48,8 % (2004); 44,8 % (2003); dan 37,3 % di tahun 2002.



**Tabel 3**  
**Bentuk pelayanan yang diberikan**  
**dalam penyelesaian kasus**  
**oleh PSW Unair**  
**tahun 2002-2004**

No	Bentuk pelayanan yang diberikan dalam penyelesaian kasus	April s/d Desember 2002		Sepanjang Tahun 2003		Januari s/d Desember 2004	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Konseling	31	37.3	77	44.8	102	48.8
2	Shelter	3	3.6	19	11	14	6.7
3	Polisi	20	24.1	34	19.7	47	22.5
4	Rumah Sakit	15	18.1	16	9.3	34	16.2
5	Pengadilan Negeri	10	12.1	13	7.6	6	2.9
6	Pengadilan Agama	4	4.8	13	7.6	6	2.9
	<b>JUMLAH</b>	<b>83</b>	<b>100</b>	<b>172</b>	<b>100</b>	<b>131</b>	<b>100</b>

Sumber : PSW Unair Surabaya

Korban kekerasan yang melapor di PSW juga beragam dari mahasiswa/pelajar, ibu rumah tangga, PNS, TNI, POLRI, buruh, karyawan, wiraswasta, profesional, pembantu rumah tangga, dan lain-lainnya. Namun, dari semua status yang ada, mahasiswa dan ibu rumah tangga tercatat sebagai pihak yang paling banyak melapor yaitu antara 20-30 persen tiap tahunnya.

Pelaku kekerasan seringkali adalah orang yang terdekat dengan korban, sebut saja keluarga, teman, pacar, rekan kerja, tetangga. Dan, hanya beberapa yang berasal dari pihak luar misalnya institusi, majikan atau atasan. Dari data yang didapatkan di PSW Unair menunjukkan bahwa pelaku kekerasan yang berasal dari keluarga dari tahun ke tahun



masih mencapai separuh dari jumlah pelaku kekerasan. Di tahun 2002; 56,7 % pelaku kekerasan masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Sedangkan sepanjang tahun 2003 mencapai 53,2 % dan pada tahun 2004 hingga 48,4 %.

**Tabel 4**  
**Relasi Pelaku Terhadap Korban**  
**Periode tahun 2002-2004**

No	Relasi pelaku terhadap korban	April s/d Desember 2002		Sepanjang Tahun 2003		Januari s/d Desember 2004	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Keluarga	17	56.7	49	53.2	62	48.4
2	Teman/Pacar	5	16.7	22	23.9	35	27.3
3	Rekan Kerja	1	3.3	0	0	2	1.6
4	Tetangga	1	3.3	10	11	20	15.6
5	Istitusi	3	10	5	5.4	1	0.8
6	Majikan/Atasan	1	3.3	6	6.5	0	0
7	Guru/Pendidik	2	6.7	0	0	3	2.3
8	Tidak dikenal	0	0	0	0	5	4
	<b>JUMLAH</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>100</b>	<b>128</b>	<b>100</b>

Sumber : PSW Unair Surabaya

Kekerasan yang terjadi seringkali membawa berbagai dampak pada si korban. Dampak tersebut dapat menyentuh berbagai dimensi kehidupannya, misalnya dimensi kekerasan fisik, dimensi kekerasan psikologis, dimensi kekerasan ekonomi, dimensi kekerasan reproduksi, sampai pada dimensi yang bisa menyebabkan kematian.



**Tabel 5**  
**Dampak yang Dialami Korban**

No	Dampak yang dialami korban	April s/d Desember 2002		Sepanjang Tahun 2003		Januari s/d Desember 2004	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Dimensi kekerasan fisik	31	40.3	56	26.3	68	21.3
2	Dimensi kekerasan psikologis	27	35.1	83	38.9	114	35.6
3	Dimensi kekerasan Ekonomi	17	22.1	37	17.4	66	20.6
4	Dimensi kekerasan Reproduksi	1	1.3	34	16	72	22.5
5	Kekerasan berakibat kematian	1	1.3	3	1.4	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>77</b>	<b>100</b>	<b>213</b>	<b>100</b>	<b>320</b>	<b>100</b>

Sumber : PSW Unair Suarabaya

Meskipun data-data mengenai kekerasan ekonomi yang detail sulit didapatkan, namun beberapa data yang didapatkan dari PSW Unair tersebut bisa memberikan gambaran pada kita mengenai kondisi perkembangan kasus kekerasan yang terjadi. Dan kekerasan ini menjadi semakin kompleks jika dikaitkan dengan kekerasan ekonomi. Dari data diatas, kekerasan ekonomi menjadi kekerasan yang paling sulit diungkap, karena selain kurangnya keterbukaan masyarakat juga karena konsep kekerasan ekonomi ini masih banyak diperdebatkan berbagai kalangan. Dan perdebatan tersebut bukan untuk mencari-cari celah untuk memaksakan suatu narasi besar tentang kekerasan, tetapi sebagai cara untuk mengungkap sebuah pengetahuan yang tersembunyi dan mungkin



'disembunyikan'. Dalam bab selanjutnya akan banyak dibahas mengenai 'pengetahuan yang tersembunyi' ini.





## BAB V

### PROFIL PEREMPUAN

#### KORBAN KEKERASAN EKONOMI

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua informan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian. Dua informan tersebut memiliki dua ragam kekerasan. Yaitu kekerasan ekonomi berat dan kekerasan ekonomi ringan.

##### I. **Mbak Melati**

Mbak melati adalah seorang perempuan paruh baya yang bekerja sebagai wartawan di salah satu majalah lokal di Surabaya. Saat ini beliau memiliki dua orang putri dan 1 orang putri. Dan sudah bercerai dengan suaminya beberapa tahun yang lalu.

Masa-masa kecil mbak Melati dihabiskan bersama kakek dan nenek di desa, namun menginjak tahun keempat di SD, mbak Melati kembali pada orang tuanya di Surabaya,

" Bapakku kan tentara ya, bapakku kan angkatan darat, saya dititipkan di mbah ya di Lamongan, kelas empat saya mulai di Surabaya, dari desa ke kota. Ya memang mengalami adaptasi ya, di kelas dianggap paling bodoh. Paling bodoh, paling ndeso, basa Indonesia gak iso yo "

(Mbak Melati)

Selama tinggal di Desa, mbak Melati memang mengalami ketertinggalan akademis dari teman-temannya di kota. Akan tetapi menginjak tahun keenamnya di SD mbak Melati mengalami banyak



peningkatan akademis, sehingga bisa diterima di SMP Negeri favorit di Surabaya saat itu. Tidak hanya SMP tetapi juga SMU-nya,

" Nggak! Jadi malah lek sinau gak iso aku malah nangis, gak tahu kok tiba-tiba bijiku apik-apik, kan aku diterima ndek SMP Negeri 2, waktu itu masih favorit ya, ya biasa aja. SMP, SMA. Cuma waktu di SMA itu aku diajak...bapakku bingung, pengen anaknya masuk negeri, ya dititip-titipkan, berusaha nyuap gitu, tapi aku nggak. Pak percoyo'o wes lah, aku lek gak diterima SMP Negeri yo luar negeri, gayaku, tapi pada akhirnya aku kok mampu, bahwa saya diterima di SMA Negeri, aku bukan anak kolokan ya, aku anak yang mandiri, waktu cari SMA, aku cari-cari sendiri." (Mbak Melati)

Menurut pengakuan mbak Melati, sang Ayah mendidik mbak Melati dengan cukup disiplin, akan tetapi tidak ada kekerasan yang dialaminya dan juga tidak ada perlakuan berbeda antara anak perempuan maupun anak laki-laki. Selama membantu ibu di toko, mbak Melati merasa tidak mengganggu jadwal belajarnya. Bahkan sejak SMP mbak Melati sudah mendapat les bahasa Inggris.

" He'eh. Bapakku tentara, tapi ya begitu...disiplin, juga ndak mengalami kekerasan dari orang tua, ya bapakku iku yo apik-apik nemen iku yo nggak, kereng-kereng nemen juga nggak, standar, ibuku juga gitu. Ibuku kan jualan, buka toko gitu, apalagi kan sudah wajar ya membantu orang tua, ke pasar, disuruh ini, tapi kan sudah biasa, tidak sampai menyita waktuku untuk belajar, saya juga dileskan supaya maju, SMP saja sudah disuruh les bahasa Inggris, waktu itu jauh, diluar lingkungan rumah saya. Saya harus ngelen di Kaliasin, waktu itu kadang saya diantar bapak, ya waktu itu ya sepi. Surabaya masih gak begitu ramai ya... Jadi gak militeristik atau apa gak-gak terus dirumah bapak memperlakukan anak laki juga pernah nyapu, laki perempuan sama, apa ada yang dibedakan? Apakah masih ada sedikit yang dibedakan, anak perempuan pastinya lebih banyak di dapur atau gimana. Eh soal itu ya bapakku iku gak pernah mendidik anaknya itu, bapakku iku sibuk karepe dewe dadi tentara, ibuku di



pasar, dadi anake setengah diumbar. He'eh, terus memang mereka kongkon nulungi, terutama di toko, kalo pekerjaan rumah kan ada pembantu, bersih-bersih, masak, kan onok pembantu, tapi mereka mestinya (yang laki-laki) juga disuruh bapak bantu ibu di toko, sebenarnya kan lumayan laris tah mbak, tapi arek-arek gak gelem, anak-anak lanang-lanang gak gelem. Yo, justru anake sing wedok-wedok seng ngrewangi dodol, arek lanang gak blas, dikongkon kulak'an malah anak laki-lakinya yang..."(Mbak Melati)

Pengalaman berorganisasi mbak Melati dapat dilihat sejak SMU. Mbak Melati mulai aktif berorganisasi sejak SMU di salah satu organisasi siswa berbasis politik dan juga di organisasi kesenian untuk kawula muda Surabaya,

" Saya waktu SMA itu sudah ikut organisasi GSNI, itu waktu jaman Bung Karno jaya...GMNI itu kan mahasiswanya. Sempat jadi pengurus, jadi bendahara pernah...Ya, sudah SMA sudah kemana-mana. Rapat sana-rapat sini, tapi masih di Jawa,ke Semarang, ke Jawa Barat...Trus, ya itulah sejak SMA aku udah biasa orang kesenian di bengkel muda Surabaya." (Mbak Melati)

Perkenalan mbak Melati dengan organisasi kesenian untuk kawula muda di Surabaya membawa mbak Melati bertemu dengan calon suaminya. Pertemuan ini menjadi semakin sering mengingat sang calon suami adalah pekerja seni dan mbak Melati bertindak sebagai koordinator acaranya. Dan kantor dari sang calon suami juga dekat dengan kantor organisasi siswa yang diikutinya,

" Memang, dia kan pemain drama ya, aku kan juga ikut di dalamnya. Saya gak ikut main, saya kan pekerja seninya. jadi saya pekerja seninya, jadi saya sebagai pekerja seninya, waktu itu yo, kalau ada pementasan saya bekerja di belakang panggungnya gitu yo.trus sekolahan saya kan dekat ini...bengkel ini...balai pemuda kan dekat.



Juga jalan-jalan, kalau nonton, makan-makan, nonton film juga di Mitra, sering makan disitu. Trus apa waktu itu ikut GSNI, kantornya kan di Panglima Sudirman, kan dekat. Tau nggak bangunannya, embong kenongo, yang ada bangunannya dulu kan disitu. Tempatnya di balai Surabaya Post, enggok-enggokan nang embong kenongo iku loh. La iku dadi kan sekitar situ, trus disitu ada kursus Bahasa Inggris. Ya di GSNI itu.” (Mbak Melati)

Pilihan mbak Melati pada organisasi berideologi nasionalis ini sebenarnya banyak dipengaruhi sang ayah yang sangat mengagumi Soekarno dan pemikiran-pemikirannya,

” He’eh tahu, udah tahu resikonya, heeh, dan bapakku kan termasuk orang PNI, jadi tahu betui, bapakku juga tentara, jadi tentara yang nasionalis gitu loh, dia juga pecinta Soekarno, buku-buku Soekarno banyak. Aku juga suka baca-baca buku Soekarno, buku-buku putih, buku-buku yang dilarang pemerintah. Itu saya baca, anu suka baca...ya buku-bukunya Pramoedya Ananta Toer, sempet dilarang, he’eh, buku-buku putih, wes lali aku, bukunya Arif Budiman. Wes lali aku... Ya, rasanya di Indonesia itu gak ada orang sehebat Soekarno, tidak sehebat Soekarno, sampai sekarang saya tidak menemukan orang yang selevel, separohe, gak ono iki prasaku. Dia konseptor sejarah, terlepas bojone akeh iku wis lumrah, manusiawi, justru orang yang libidonya seks tinggi, walaupun iku duduk penelitian iki, justru brilian itu, saya itu kan mayoritas dekat dengan orang-orang gede, justru wong sing otake brilian-brilian rumangsaku, asumsiku. (Mbak Melati)

Setelah menamatkan pendidikannya di SMU, mbak Melati melanjutkan ke perguruan tinggi. Sebenarnya mbak Melati sama sekali tidak mempunyai gambaran mengenai jurusan yang akan dipilihnya, akan tetapi akhirnya mbak Melati memilih untuk masuk di fakultas baru di salah satu universitas negeri di Surabaya,

” Eh, ya Fisip, waktu itu kan pengumumannya Fisip. kita ndak tahu, he’eh, ini kok ada fakultas baru, tapi aku IPS, paling iso ekonomi, hukum gak seneng, yo pilihan dua hukum. Iki ono fak baru. Fisip. Yo opo rek, senengane



kan sosial politik yo. Tak leboni, ngono ae wis, ternyata yo koyok ngene, tapi aku mulai SMA kenal ini....” (Mbak Melati)

Selama kuliah, mbak Melati melanjutkan karir politiknya di salah satu Ormek (Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus) yang memiliki ideologi yang sama yaitu nasionalisme. Mbak Melati merasa nyaman dengan organisasi politi tersebut, dan sempat menjadi salah satu kader unggulannya.

Kehidupan mbak Melati yang akrab dengan lingkungan kumuh membuat mbak Melati memiliki kepekaan sosial yang cukup tinggi. Kepekaan sosialnya juga hasil dari sosialisasi sang ayah yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sejak kecil. Minat dan perhatiannya pada orang miskin juga diwujudkan dalam skripsinya.

” Walaupun aku sendiri bukan orang kaya, ya itu disuruh peka sama lingkungan, memahami, lingkungan masyarakat seng, ya terutama orang-orang miskin ya, sambil waktu itu kan kebetulan aku hidup di kampung yang kumuh, ibuku itu punya toko di terminal jembatan merah, di sekitar terminal iku, macam-macam orangnya. kebetulan rumahku di depan RT kalisosok, dadi lingkungan-lingkungan yang sangat keras ya, lingkungan kumuh keras, isuk sekolah, awan ngewangi ibuku dodolan nang terminal ya ngarepe terminal jembatan merah. Disitu banyak, yo opo yo, konco pergaulane iku macem-macem, bakul-bakul, wong mbambung, terus kernet, copet, maling, wes biasa di depan toko itu kan ada stan kosong, iku nggoneh wong narkoba. Narkoba udah populer, udah jamane masku aeh. Aku kan punya mas tiri, iku kan anu...iku candu. Sampai saiki wonge gak pernah mari. Iya, narkoba iku sampek saiki, yo podo ae jaman aku sek remaja. dekade tahun 70 iku wes ada, cuma jenisnya beda lagi, kalau dulu kan...Yo termasuk para teolog-teolog, aku seneng iku, yang aku buat skripsiku...yang teori antara harmoni sopo toh iku lali, wes lali kabeh...Sopo yo, antara harmoni...ada lagi, ya itu ternyata orang miskin itu ada fungsinya. Trus, sopo toh



iku, antropolog juga kok penelitianku kan kualitatif, pendekatan budaya kemiskinan iku sopo, lha aku...Parsudi Suparlan iku mbak, sopo seh.."

Mengenai hubungannya dengan lawan jenis, mbak Melati menuturkan tentang lika-liku hubungan dengan sang calon suami. Dan bahkan proses pacaran yang mereka alami diwarnai oleh beberapa insiden menarik. Salah satunya adalah sikap mengancam yang ditunjukkan calon suami ketika hendak mengajak menikah,

" Ya sebenarnya, kita deket mulai SMA, tapi trus dia keluar jawa, aku sempet dengan anak FK. Iya, dengan anak hukum, wes macem-macem lah, ganti-ganti, mungkin karena masih muda-mudanya. Sama teman sekampus nggak, sama pernah sama anak FKH....Tapi ndilalah de'e iku kok pulang, pulang ke Surabaya, padahal waktu itu aku sudah ada kok...kembali sama pacarku yang pertama, akhirnya dia kembali, trus dia ngomong, trus anu dia ngomongnya kok pengen mbalek, trus dia tak terima. Gak tahu ya, kok sakno perasaanku. Bener, yo mungkin yo, tapi kalau saya inget ajaran bapak saya itu lho! Kon iku ojo suka njalok-njalok, gak to. dadi aku iku, pacaran iku gak pernah njalok-njalok, meneng ae dan menganggap iku tabu yo, opo maneh yo lek njalok-njalok ikun sesuai dengan ajaran bapakku. trus tapi aku tak abaikan yo, karena waktu itu aku kan orangnya sederhana, gak macem-macem, gak nuntut. ngejreng-ngejreng iku yo ndak, waktu iku aku yo digawani bapak sepeda motor, waktu kuliah ya. Gak, kaya sih gak, tapi yo....Trus emboh yo mungkin, ya cinta itu buta yo, kita gak berpikir rasio, dia waktu itu emang udah kerja, aku kuliah, dia kerja jadi wartawan juga khan. harian Suara Indonesia, tak pikir ah iki kerjo, meskipun kawin kan gak masalah, kan pada saat iku kan aku gak pernah tanya, trus aku yo jarang ditukokno klambi, yo untunge gak tahu, cuman ya kadang-kadang diajak makan gitu aja.....trus malah dia itu waktu nikah iku rodok ngancam yo! "Kon lek gak cepet-cepet kawin, aku iki arepe ditugasno nang Timor-Timur. Timor-Timur kan masih rame ya. "Nek aku nang Timor-Timur yo kemungkinan kita ndak ketemu". Trus ya akhire aku ndak nduwe pilihan lio, mek de'e tok, yo wes gak popo wes, dadi iku asline bapak-ibuku gak setuju juga kok....gak



setuju, karo sajakno iku rodo nyeniman iku yang...pekerja seni iku kadang-kadang..."(Mbak Melati)

Mbak Melati memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya ketika masih duduk di bangku kuliah. Saat itu, keinginan menikah muncul karena mbak Melati merasa putus asa dengan skripsi yang dikerjakannya. Sebelum menikah, mbak Melati sudah memiliki pekerjaan sebagai wartawan. Kondisi yang mengambang, dan skripsi yang terjatung-katung membawa Mbak Melati untuk berpikir soal pernikahan. Ditambah lagi, 'ancaman' dari sang pacar yang menginginkan secepatnya menikah atau akan ditinggalkan ke luar Jawa. Pernikahan ini sebenarnya tidak direstui orang tua, namun akhirnya dilaksanakan juga padatanggal 19 Mei 1985,

" Tapi, saya masih sekolah, dia kan gak kuliah dulu, aku menikah itu sebelum lulus, Mei 85 itu, sebelum lulus kuliah itu, waktu itu kan aku bikin skripsi tapi kok nggak dadi-dadi, trus mari ngono kok aku malah belajar kerjo aku dadi wartawan, nang nggone majalah Liberti, trus maune aku diteri Jawa Pos, gak entok ambek bapakku. "kon timbange terkatung-katung, wes tutukno ae kuliahmu, gak usah kerjo, bapak sek kuat mbandani". Yo sombonge ngono bapakku iku, trus iku, trus antara iku mau, trus antara kerja...masa vakum, gak ono kuliah wes entek, skripsi yo gak dadi-dadi, wes moro-moro...we lah, akhere wes, kawen ae wes, trus aku kondo bapakku, trus walaupun tidak direstui, trus akhirnya perkawinan itu terlaksana 19 Mei 1985, tapi aku lek wes kawin, kudu skripsiku dadi, tapi iki...bahaya iki...aku ngono, nduwe anak barang...bahaya iki. Akhere Desember aku lulus, gak sampek Desember, November iku lulus, wisuda wes, maringono, arepe golek kerjoan, ndilalah Januari langsung meteng." (Mbak Melati)

Mbak Melati sendiri sejak dahulu memang mendambakan profesi sebagai seorang wartawan,



" Cita-citaku, dulu cita-citaku emang jadi wartawan, emang saiki dadi wartawan, tapi wartawan seng gak dadi. Wartawan-wartawan seng biasa-biasa wae, iya tapi lain." (Mbak Melati)

Permasalahan demi permasalahan dalam pernikahannya kembali karena hamil, dan tidak mendapat uang belanja dari sang suami. Selain itu juga konflik dengan orang tua yang kecewa karena ketidakmandirian menantunya. Bahkan mbak Melati sempat diusir dari rumah oleh orang tuanya untuk memberi pelajaran pada sang suami. Tapi Mbak Melati tak kunjung mendapat uang belanja dari sang suami, bahkan saat kelahiran putri pertama mereka,

" Tapi udah lulus, trus sudah punya anak, tapi waktu itu kan hanya tinggal beberapa hari di rumah orang tua, setelah itu kan, dikasih rumah orang tua, suruh nempati gitu...rumah kosong. Anu...kok bendino Cuma dike'i duek sa'mene, Cuma cukup untuk belanja-belanja gitu loh, he'eh, trus selama iku aku gak pernah dikasih gaji, gajine piro, gak tahu, tapi aku yo kok meneng ae. Trus iku berhasil nglamar, yo trus kok iku, bapakku tahu yo, aku gak bahagia yo, aku yo suka purik, yo suka anu...tapi selama iki yo gak dike'i duwek, yo aku yo Cuma pas...isuk belonjo, sore blonjo. He'eh wes aku, iki engkok pokoke lek aku kawin, duwek blonjone lak dikekno aku, ternyata ndak gitu...Anak lahir itu emang dia yang membiayai, trus yo opo yo, akhirnya aku minta, iki yo...gawe kebutuhan bayi yo! Trus waktu itu aku anu, karena aku sering, omahku kan adoh, jauh gitu di Tandes, waktu di Tandes itu ya sepi dan jauh sekali. Trus aku dibayangi ketakutan hidup sendiri, ditarik sama ibuku, tinggal di rumah orang tuaku, soale aku kan hamil punya anak, iku kan...orang tua kan was-was ya, aku..pertama karena kan aku kan yo gak tego ngono yo ijen, aku moro melok, wong tuaku malah gak dike'i duwit. Gak ngasih belanja, prasaku kan ditanggung orang tua. Dia malah gak ngasih uang belanja. Trus akhirnya aku sampai diusir dari rumah orang tua. Karena sudah punya anak, bojomu wes nduwe penghasilan, koen wis wayahe metu omah, golek kontrakan. Ya, itu pertama di rumah orang tua,



aku gak terima duek, opo-opo njaok wong tuwo, kan orang tua kan akhere meker. "kon iku bojomu nyambut gawe, kok gak dike'i duwek",kene yo gak tau, yo,"Yo opo carane njauk", aku ngono. Tapi selama iku gak pernah minta e, saya lebih ke orang tua. Trus akhire aku yo iku, sampe' diusir, tapine ngusire yo gak kasar. "Koe iku wes wayahe mandiri". Akhere golek kkontrakan. Di tempat kontrakan iku, tapi aku sudah mulai kerja. Jadi aku sudah bekerja, itu baru bapak ngusir gitu. Kamu harus belajar mandiri, kamu sudah bekerja, jangan ikut orang tua terus."(Mbak Melati)

Selama berkeluarga mbak Melati hanya mendapatkan belanja dari koperasi tempat suami bekerja. Dan tidak ada pemagian yang istimewa di rumah, mbak Melati seakan-akan menjalani dua profesi ekaligus, pencari nafkah dan ibu rumah tangga. Selama itu juga, tinggal bersama mbak Melati kemenakan dari suami, yang membantu mbak Melati mengerjakan pekerjaan di rumah,

" He'eh, ngomongnya ke aku, trus aku arep pindahan. Yo iku pindahan, aku wes kerjo to, nang nggone majalah Liberti maneh, mbalek nang nggone majalah Liberti, akhere diangkat jadi karyawan, trus ako ono lumayan gajiku termasuk lumayan. selama itu aku gak dikasih duwek. Cuma gini dia kan kerja di Surabaya, trus di Surabaya kan ada koperasi, itu ambil belanjaan itu aja di koperasi untuk 1 bulan kebutuhan dapur lah, tapi waktu iku ono ponak'ane de'e melok aku, yang nganggur, les ngono, trus SMA nganggur, trus lek melok aku de'e seng ngerjakno semua pekerjaan rumah tangga, memang gak ono pembagian secara saklek, awakmu bagian iki, aku bagian iki, ono ponakane de'e seng melok aku, dadi pekerjaan rumah tangga di handle de'e (ponakannya tadi) termasuk momong anakku, trus lahir anak maneh, lah pas lahir anak ke dua ini, aku biaya sendiri, nggak, aku kontrol dewe, masuk rumah sakit mbayar dewe, sudah gak, dan iku aku gak pernah njalok." (Mbak Melati)



Selama masa perkawinan, mbak Melati hanya sekali menerima gaji dari suami, selebihnya mbak Melati membiayai sendiri kehidupannya bersama anak-anaknya bahkan sampai anak ke-empat. Mbak Melati juga tidak pernah meminta gaji pada suami,

" Bayar listrik, trus yo, de'e Cuma nge'i seng neng koperasi tok sampek kelahiran anak ke-tiga, ke-empat meninggal satu, bayi, baru dapat beberapa jam meninggal, keracunan ketuban, iku anak ke-tiga, ke-empat aku nglahirno iku, mbayar dewe, trus bertahan sampai ke-empat, anak ke-empat kan udah lahir yang terakhir ini, ya masih biaya sendiri. Dadi opo yo gak tahu njaluk, gak tahu nuntut aku." (Mbak Melati)

Awalnya mbak Melati hanya bungkam saja, akan tetapi akhirnya mbak Melati mencoba untuk memberanikan diri menanyakan pada suami. Tindakan mbak Melati ini mendapat respon negatif dari suami, suami tersinggung dan menganggap tindakan ini sebagai ajakan untuk bercerai. Mbak Melati tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, mbak Melati langsung melayangkan gugatan cerai pada suami. Setelah melalui proses selama tiga bulan akhirnya gugatan cerai tersebut disetujui pihak pengadilan, dan surat cerai dilayangkan pada suami,

" Trus akhere, aku..terus..terus...terus, sui-sui kesel aku. Ya aku memang orangnya gak mau ribut, akhere tak jarno ae, tak umbar ae. Yo akhere terus yo iku, akhere de'e jarang mole-mole, tak jarno. "Kon nang endi wae? Kerjo, kok gak onok beritane mole". De'e memang kekerasan fisik gak ya, tapi nggondo'an, ngkok lek'e anu ngono, nggondok gak boleh. Ya iku, la kon laopo melok-melok urusanku, trus de'e tak omongi, "Yo iek wes koen ngono, yo wes nikmati duniamu", tak umbar pisan, "Lek kon nglanggar komitmen, artine boleh sak karepmu, totok-totokno, sakkarepmu, tapi aku iso mengambil keputusan". Akhirnya, he'eh, meskipun diem, tapi



ternyata aku ngomong iku, ternyata ditindak-lanjuti, de'e ngerem surat aku, ditantang, "Koen lek pengen cerai, gak popo cerai", o aku disurati ngono, yo tak budal aku nang pengadilan langsung, wes tak tantang, selama persidangan de'e gak datang, akhirnya 3 kali sidang diputus, cerai! Tiga bulan tok, wes langsung diputusno, la dia kan gak teko. E..yo wes meneng-menengan. Anak...gelisah, tapi gak wani takok-takok. Trus iku akhere, setelah surat keputusan keluar yo, keluar...tak dodokno, wes kita bukan suami istri lagi. Iku lo surate. Nangis de'e. "kon tak kirakno gak gertak! Gak aku gak nggertak", aku ngono. Yang menangis itu dia! Ketok'e menyesal, ngerti karaktere kan wong keras, dadi ngerti karaktere wonge keras..Eh tak pikir iku koyok roda, tahap-tahap kehidupan. Aku wonge easy going, meskipun atiku remuk-redam ngono, seneng ae, perceraian akhere biasa, perceraian bukan hal yang menakutkan, memang semua harus dijalani tapi, semua mengandung resiko, baik-buruk harus dijalani." (Mbak Melati)

## II. Mbak Mawar

Mbak mawar adalah informan kedua yang didapat oleh peneliti melalui beberapa teman dekat peneliti. Mbak mawar adalah seorang ibu rumah tangga yang menikah di usia muda yaitu 21 th. Mbak Mawar memiliki seorang anak dari pernikahannya dengan seorang wartawan media cetak. Semasa kecilnya mbak Mawar dibesarkan oleh kakek dan nenek di desa, namun karena kenakalannya akhirnya mbak Mawar dipulangkan kembali kepada orang tuanya di kota,

"...Eh masa balita saya, yang saya inget ini ya, saya itu dulunya tinggal atau diasuh sama embah atau nenek di desa, waktu itu orang tua saya baru menempati rumah barunya di Surabaya, dan karena saya ini anak yang nakal, dan waktu itu ibu saya mengandung adik saya, maka orang tua saya angkat tangan, dan kemudian dititipkan di mbah saya di desa. Saya tumbuh jadi anak...selama balita saya, saya hidup dengan limpahan kasih sayang, sehingga saya terkesan manja, kemudian karena nakalnya saya dan saking manjanya saya,



sehingga kakek-nenek saya ndak bisa menghandle dan takutnya kakek saya, orang tua saya gak terima. Ketika umur 5-6 tahun lah, sejak usia itu hingga sekarang, saya ikut orang tua.”(Mbak Mawar)

Selama tinggal bersama dengan kakek dan nenek, mbak mawar terbiasa bermanja-manja, namun sejak tinggal dengan orang tua mbak Mawar terpaksa untuk lebih disiplin. Kedisiplinan dari sang bapak, membawa banyak perubahan dan polemik dalam kehidupan mbak Mawar,

” Masa-masa itu masa sulit karena saya yang dulunya biasa dengan limpahan kasih sayang, dengan kemandirian, ketika diasuh lagi dengan orang tua, orang tua saya...apalagi dia itu orang tua yang otoriter, ya saya mengalami seperti *shock culture*. Orang tua saya sangat disiplin, otoriter, dsb, sehingga saya yang dulunya dimanja, wah...terserah apa kata saya, sekarang jadi apa kata orang tua, akhirnya saya berkembang jadi anak nurut diluar, seakan-akan saya, tapi di dalam diri saya itu ada gejolak untuk membangkang lah...” (Mbak Mawar)

Otoritari dari sang ayah menurut mbak Mawar penyebabnya adalah anggapan dasar sang ayah yang menganggap mbak Mawar adalah anak yang harus dilindungi oleh orang tua. Anak dianggap sebagai makhluk yang belum berpengalaman dalam menjalani hidup jadi harus di bimbing oleh orang tua. Oleh karena itu, anak-anak harus mengikuti kemauan orang tua,

” Orang tua saya itu orang tua yang mungkin konservatif,dia itu prinsipnya anak itu harus nurut apa yang orang tua mau, karena orang tua orang yang lebih berpengalaman dari si anak, tapi orang tua pasti lebih tau yang terbaik untuk anak, itu asumsi mereka, dan eh anak-anak dari orang tua saya termasuk saya itu harus mengikuti apa yang orang tua mau, karena mereka tahu itu yang terbaik untuk anak-anaknya dan akhirnya hasil



dari pola asuh yang seperti itu, mungkin diluar kita atau anak-anaknya, ini saya dan adik-adik saya, diluar kita terlihat sebagai penurut padahal dibelakang kita itu pemberontak." (Mbak Mawar)

pembagian kerja di rumah mbak Mawar memang tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Semua anak mendapat giliran mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Begitu juga dengan hubungan lawan jenis, mbak Mawar dan saudara laki-lakinya sama-sama mendapat ultimatum untuk tidak memiliki hubungan dengan lawan jenis sampai sukses berkarier,

"Trus pembagian kerja, pembagian kerja di rumah, itu orang tua saya di rumah itu mengajari anak-anaknya itu di rumah mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sebagai contoh, saya sebelum menikah dapat bagian kerja cuci piring, nyapu dan setrika, kemudian adik saya yang laki itu dapat bagian mengepel, ya seperti itulah. Soal hubungan dengan lelaki, karena label orang tua saya yang otoriter, yang konservatif, saya tidak mempunyai banyak teman lelaki, orang tua saya sangat melarang saya berhubungan dengan lelaki sebelum saya lulus dari kuliah dan hal itulah...eh faktor-faktor lain yang memicu saya, akhirnya memberontak untuk mengambil langkah untuk menikah dalam arti menikah dini." (Mbak Mawar)

Perbedaan antara mbak Mawar dan sang ayah, membawa mbak Mawar pada pertengkaran hebat yang kemudian memunculkan niat dari mbak Mawar untuk menikah. Niat mbak Mawar menikah saat itu adalah bagaimana bisa lepas dari otoritari sang ayah,



" Istilahnya dan itu puncaknya terjadi waktu masa remaja, saya inget waktu itu saya mau berulang tahun yang ke 17, setelah saya berulang tahun tepat umur yang ke 17, saya baru merasakan perbedaan-perbedaan dan perubahan pada saya, ya umumnya sebelum saya berumur 17 saya nurut, apa yang ortu saya ngomong, kamu harus begitu-begitu, tapi eh waktu itu saya nurut saja. E..tapi ya pembangkangan dimulai ketika saya berumur 17 th, saya selalu dimusuhi orang tua, karena saya selalu membangkang, ya seperti itulah sejak berumur 17, hingga saya menikah, yaitu berumur 22, itu penuh dengan konflik-konflik dengan orang tua, dan itu menjadi masa-masa yang kurang mengenakan sebetulnya, tapi bagaimana...saya tidak kuat lagi berpura-pura, saya ingin jadi diri saya, saat saya memutuskan untuk menikah. Sebenarnya latar belakang saya untuk menikah itu adalah untuk keluar dari kekangan dan otoritari dan kekangan selama saya hidup ini, selama 22 th, dari orang tua saya, saya ingin bebas, saya ingin jadi diri saya sendiri, maka saya memutuskan untuk menikah." (Mbak Mawar)

Selama masa pernikahan, awalnya pernikahan mereka berjalan wajar-wajar saja, seperti pasangan-pasangan pada umumnya. Pada tahun pertama pernikahan dipenuhi dengan kasih dan sayang. Namun, menginjak tahun kedua pernikahan, yaitu ketika mbak Mawar melahirkan anak pertamanya. Perubahan pada sikap suami tampak pada pembagian tugas di rumah tangga. Suami yang dulu mau membantu mbak Mawar, saat itu tidak lagi terlibat dengan segala macam urusan domestik dalam rumah tangga.

" E tentang perkawinan saya, tahun-tahun pertama ya seperti halnya, pasangan-pasangan yang lain, tahun pertama ya masih indah-indahnya kan, waktu itu belum, beban belum seberapa banyak, anak belum ada, kita enjoy aja, saya waktu itu sangat menikmati banget berperan sebagai seorang istri, kita jalani apa adanya tanpa ada beban, gitu...e...semuanya waktu itu terasa ya indah-indah saya dan mengenai pembagian kerja dalam rumah tangga, suami saya sih kelihatannya nih ya, selama ini saya perhatikan, dia itu orang yang...tipe



orang yangagak patriarkal, e..dia itu udah terkonsep dalam pikirannya dia...kalo perempuan itu seperti ini, tugasnya ini...ini...ini...ini, kalo suami tugasnya ini dan ini, jadi membantu juga ndak apa-apa, jadi dia seperti itu.” (Mbak Mawar)

Konflik rumah tangga mak Mawar tidak berhenti sampai disitu, pemikiran suami yang 'patriarkal' memakasa mbak Mawar untuk menjadi ibu rumah tangga yang sejati. Ini berarti mbak Mawar harus sepenuhnya mengabdikan diri di rumah dan tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah.





## BAB VI

### DISKURSUS MENGENAI KEKERASAN

Perempuan telah banyak diidentikkan dengan kekerasan. Kekerasan dianggap sebagai representasi kekuasaan laki-laki. Kekerasan juga sebagai wujud ketimpangan jender seperti yang dituduhkan oleh para feminis gelombang kedua. Bagi mereka, laki-laki (tentunya secara biologis) menguasai semua struktur kehidupan yang biasa disebut sebagai patriarki. Hal ini menuai kritik dari Foucault dengan menolak bahwa laki-laki memegang kuasa, tetapi mengakui pelaksanaan kuasa laki-laki atas perempuan. Foucault ingin bergerak lebih jauh lagi, dengan menetapkan semua kuasa sebagai sesuatu yang produktif. Foucault menolak terjebak pada oposisi biner antara laki-laki dan perempuan, antara borjuis dan proletar, dan antara patriarki dan matriarki. Bagi Foucault laki-laki bukanlah penguasa yang absolut, karena kekuasaan itu menyebar atau sporadis dan merupakan sesuatu yang produktif. Dan bila terjebak pada dominasi patriarki, menurutnya terlalu fasistik.

Foucault mengatakan kekuasaan bukanlah kepemilikan ataupun kemampuan. Kekuasaan bukanlah sesuatu yang tunduk pada atau melayani kepentingan ekonomi. Foucault menekankan bahwa pola hubungan kekuasaan tidak dapat dikonseptualisasikan sebagai milik individu atau kelas. Kekuasaan bukanlah komoditas yang dapat diperoleh atau diraih. Kekuasaan bersifat jaringan; menyebar luas kemana-mana. Foucault mengatakan analisis kekuasaan seharusnya tidak memusatkan perhatian pada tingkat tujuan sadar,



Foucault mengatakan analisis kekuasaan seharusnya tidak memusatkan perhatian pada tingkat tujuan sadar, tapi pada poin penerapan kekuasaan. Dengan kata lain, ia ingin mengubah titik perhatian dari pertanyaan, seperti "Siapa yang memiliki kekuasaan?" atau "Apa tujuan atau maksud pemegang kekuasaan?" ke proses-proses yang membentuk subyek sebagai hasil pengaruh kekuasaan.

Ia menolak analisis yang menempatkan sumber asal-usul kekuasaan dalam struktur atau institusi pada posisi utama atau puncak. Pandangan Foucault mempersoalkan konsep konflik antara kelas penguasa dan kelas bawahnya Marxis. Foucault mengatakan mekanisme, teknik, dan prosedur kekuasaan tidak diciptakan kaum borjuis, bukan ciptaan kelas yang berusaha menjalankan dominasi yang efektif, tetapi tersebar sejak kekuasaan tersebut menunjukkan manfaat politis dan ekonomi bagi kaum borjuis.

Dengan demikian, menurut Foucault, melihat kekuasaan sebagai penindasan, pembatas atau larangan tidak memadai lagi : kekuasaan "menciptakan realitas"; kekuasaan "menciptakan domain obyek dan ritual kebenaran". Foucault mengatakan kita sering mendengar klise "kekuasaan membuat gila", tapi kita harus memperhatikan fakta bahwa pelaksanaan kekuasaan itu sendiri menciptakan pengaruh-pengaruh kekuasaan. Tanpa pengetahuan kekuasaan tidak mungkin dijalankan, pengetahuan tidak mungkin tidak melahirkan kekuasaan.



Foucault mulai memusatkan perhatian karyanya pada bahasa dan pembentukan subyek dalam wacana. Subyek individual adalah entitas kosong, saling sengkabut wacana. Dalam karyanya yang lebih kemudian, Foucault bergeser dari determinasi linguistik ke pandangan bahwa individu dibentuk oleh pola hubungan kekuasaan, dimana kekuasaan menjadi prinsip realitas sosial yang tertinggi<sup>1</sup>.

Pembentukan individu melalui pola hubungan kekuasaan tampak pada diskursus yang tercipta pada perempuan korban kekerasan ekonomi ini. Diskursus mengenai kekerasan ini, telah memberikan pandangan-pandangan mereka tentang apa itu kekerasan, dan bagaimana sebuah kekerasan dianggap sebagai sebuah kekerasan. Definisi kekerasan menurut mereka tidak lepas dari masa kanak-kanak awal mereka yang hidup di lingkungan Jawa dan mitos-mitos tentang perempuan modern yang sedang berkembang.

Beberapa definisi kekerasan oleh informan dilihat sebagai sebuah bentuk 'pengekangan' atau sesuatu yang membuat individu tidak nyaman,

"Kekerasan itu, menurut aku bukan hanya sekedar kekerasan global, ya ketika hak istri itu tidak pernah terpenuhi itu juga kekerasan buat aku, kekerasan itu adalah ketika kita merasa tidak bebas, ya itu kalau menurut aku bisa dikatakan mungkin ya itu kekerasan, kayak pengekangan, kon kudu ngene, koyok begitu...begini...begini, ya ndak sesuai dengan kemauan kita, itu masuk kekerasan." (Mbak Mawar)

"Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak...membuat diri seseorang itu nyaman, ndak enak, terluka dua, luka fisik dan batin.....(bagaimana kekerasan

---

<sup>1</sup> Madan Sarup, *Poststrukturalisme dan Posmodernisme, Sebuah Pengantar Kritis* (2003)



terjadi), awal mulanya, kalau ditempatku itu, ketidak mampuan untuk melakukan kewajiban.....saya kira sama....kekerasan terhadap perempuan yo wis iku mau, fisik, non fisik,.....itu bisa dilakukan oleh anak-anak yo wanine kebangeten itu termasuk kebangeten iku....”(Mbak Melati)

Mbak Mawar mendefinisikan kekerasan sebagai segala bentuk upaya yang membatasi ruang gerak perempuan, sedangkan definisi kekerasan oleh mbak Melati lebih pada sebuah cermin dari pengalaman masa lalunya dengan sang suami. Walaupun dalam dunia nyata, mbak Melati mencoba mengingkari kekerasan yang dialaminya.

Mengenai jenis kekerasan, mbak Mawar membagi kekerasan menjadi dua macam yaitu kekerasan fisik dan non fisik. Sedangkan kekerasan domestik menurutnya timbul ketika suami-istri tersebut tidak berada pada kesetaraan. Baginya kekerasan yang terjadi pada perempuan terutama ditempat tinggalnya adalah kekerasan yang tidak lagi dianggap kekerasan tetapi sesuatu yang "pantas" didapatkan perempuan.

"e...kalau aku sih fisik dan non fisik. Fisik ya biasa, pemukulan, tMelatian, pokok'e yang melukai secara fisik, itu fisik bagi, trus kalau non fisik ya itu pelanggaran hak, terus pelanggaran kebebasan, seperti itu... Kekerasan domestik itu timbul ketika suami-istri itu ndak berada pada...ndak imbang, ada salah satu yang lebih dominan dan seringkali melihat budaya kita yang dominan itu si suami. Dan itu kayak dilegalkan. Perempuan itu punya kekuatan apa? Perempuan kan apa kata suami, kan gitu". (Mbak Mawar)

Sedangkan Mbak Melati membagi kekerasan menjadi dua macam, yaitu fisik dan non fisik,



" Kekerasan itu apabila kita eh, sedikit yang non fisik ya, kalo fisik ya gak perlu dijelaskan, ditunjuk prok yo...Ya walaupun tak ada bekas, lek ditapok yo loro kan, ditapok gak mesti ono bekase, dan marah, kan ditapok marah laen lo yo ditapok marah ambek gak marah laen ya to? Ala yo, lek kekerasan yang fisik iku mengarahe nang psikologis yo, psikologis iku bisa sikap yo tindakan yang tidak menyenangkan yang membuat hati perempuan itu tersinggung." (Mbak Melati)

Bahasan yang paling menarik adalah kekerasan ekonomi. Mbak Mawar tidak secara eksplisit mendefinisikan kekerasan tersebut, namun dalam pandangannya ada pembagian peran antara suami dan istri. Suamilah yang memiliki akses ekonomi, sedangkan istrilah yang mengelola. Mbak Mawar sendiri juga mengalami kesulitan saat mendefinisikan kekerasan ekonomi yang dialaminya.

"Aku ndak tahu aku ini merasa ada kekerasan atau ndak, yang aku rasain sekarang agak gak bisa bebas" (Mbak Mawar)

Bagi Kristeva, pendapat Lacan bahwa tatanan simbolik adalah phallosentris dan perempuan dalam pengertian 'feminin' tidak memiliki akses terhadap bahasa, karena bahasa merupakan pusat bagi relasi kuasa tatanan sosial adalah sesuatu yang bisa diterima. Mbak Mawar adalah salah satu contoh kasus perempuan yang sudah melakukan negosiasi peran dengan maksimal, namun karena bahasa dalam tatanan



simbolik adalah pusat bagi relasi kuasa tatanan sosial maka baginya pembagian peran suami-istri merupakan hal yang "normal".

Deleuze-Guattari mengaitkan antara kapitalisme dengan keluarga. Menurutnya keluarga telah bermain-main dengan Oedipus, tapi di belakang ini ada situasi ekonomi. Oedipus kemudian dicurigai sebagai produk sistem kapitalis. Oedipus digunakan kapitalisme untuk menjajah keluarga kita dan akhirnya di kota. Ia juga membantu keluarga memainkan peran pentingnya dalam kapitalisme sebagai "unit produksi dan reproduksi". Oedipus adalah salah satu mesinnya, dan Kapitalis adalah salah satu mesin pokoknya.

Seperti yang dikemukakan mbak Mawar, bahwa suami adalah pencari nafkah dan perempuan yang mengelola uang dan urusan rumah tangga. Keluarga atau Oedipus adalah sumber produksi kapitalis. Dibalik kecurangan Oedipus, disisi lain terjadi subordinitas 'feminin' dan pemiskinan 'ekonomi psikis'. Ketika laki-laki dipilih oleh kapitalis untuk menjadi 'buruhnya', perempuan harus menerima kekalahan di dunia nyata dan simbolik. Seperti ketika laki-laki menganggap dirinya superior dan enggan untuk menyentuh pekerjaan domestik. Karena Oedipus hanyalah sebuah permainan untuk membuat perempuan dan laki-laki (terutama perempuan) terjebak pada bahasa 'oedipus' dan salah satu dari mereka menjadi marjinal baik dalam tatanan nyata maupun simbolik.

"Itu terjadi waktu anakku lahir trus pindah to nang Surabaya, ah dia kan akhirnya kebutuhan kita tambah banyak, karena kita hidup sendiri, kan gak ada topangan dari orang tua, akhere pengeluaran



kita membentak dan dia harus kejar target untuk kerjanya, harus dia kencengin untuk memenuhi itu, akhere alasane...aku kerja...aku capek....dia gak pernah nyapu dari awal nikah....karena nyapu itu pekerjaan cewek.....kalo dia nyuci piring masih mau....cuci baju masih mau....dan itu pun sekarang itu mau bantu kalau kita sudah bertengkar, nunggu aku sampek nangis, sampek nggondok, ndak mau bicara sama dia, dia mau bantu dan itu pun dia kerjanya kasar seperti bak itu kalau sudah selesai dilempar...glodak...brak.....ya seperti itu, kayak ndak ikhlas gitu, ndak-ndak nyadari...oh istriku capek tak bantu....makanya dia kan mau ngurus anak, akhirnya kalo dia dirumah...dia tak suruh handle anak...karena dia lebih suka ke anak daripada pekerjaan rumah.....kalau aku minta waktu...besok-besok...kalau aku libur." (Mbak Mawar)

Laki-laki dan perempuan telah ter-Oedipal dan digilakan oleh Oedipus complex sehingga menjadi fasis. Karena Oedipus Complex telah menjebak kita pada logika 'keluarga suci'. Logika yang hanya (terutama perempuan) mengukuhkan membuat kita terjebak pada subyektivitas yang fasis. Mengikat hasrat anggota 'keluarga suci' terutama perempuan untuk melawan 'bahasa' secara simbolis sebagai pusat relasi kuasa dan posisionalitasnya (posisi psikisnya). Oedipus telah menekan mesin hasrat baik laki-laki maupun perempuan.

Subordinasi, marjinalitas, dan penolakan 'feminin' tampak pada pengetahuan mengenai kekerasan terutama kekerasan ekonomi. Mbak Melati sendiri mendefinisikan kekerasan sebagai sebuah tindakan yang melewati batas kenyamanan dan membawa dampak baik fisik maupun non fisik,

Definisi kekerasan ekonomi oleh mbak Melati jauh lebih kompleks,

"E....kekerasan ekonomi apabila si suami tidak melaksanakan kewajibannya kewajibannya sebagai laki-laki untuk menafkahi



keluarga atau menafkahi tidak sesuai dengan porsi ukuran pengeluaran, biaya pengeluaran keluarga...lek sama sekali itu berat! Lek nge'i sakkarepe dewe iku yo rodok berat! lek ringan, masih membantu, tapi dia memang penghasilannya kecil....termasuk ringan kalau penghasilannya kecil. ya to, saiki lek kene iki de'e cuma pegawai pabrik, UMR sak ngene, la lek kene nuntut 1 juta setengah lak gak wajar yo, tapi kalo dia memang penghasilannya kecil, itu saya kira ringan, tapi lek de'e iki penghasilane gedhe, tapi lek ngekekno dibawah standar biaya hidup, itu kan yo berat. Opo maneh yang tidak sama sekali."  
(Mbak Melati)

Definisi kekerasan ekonomi oleh mbak Melati menurut peneliti menggambarkan sebuah marjinalitas pengetahuan perempuan mengenai kekerasan ekonomi. Dalam berbagai literatur yang dipakai LSM dalam mendefinisikan kekerasan ekonomi, terdapat alur berpikir yang sama. Sebuah penelitian yang dilakukan Pingky Saptandari Wisjubroto, dkk (1999) tentang perspektif LSM mengenai kekerasan terhadap perempuan. Penelitian tersebut salah satunya menghasilkan bentuk-bentuk kekerasan dan konsep kekerasan yang diambil dari 11 aktivis perempuan yang berada dalam wadah 9 LSM perempuan di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Mereka melakukan identifikasi pada kekerasan menjadi lima yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan sosial. Pada kekerasan ekonomi, para aktivis LSM tersebut melakukan pendefinisian ekonomi hanya di sektor publik saja seperti diskriminasi upah buruh perempuan dan diskriminasi dalam memperoleh kredit. Sedangkan mengenai konsep kekerasan, ada tiga yang menjadi unsur yang dipakai yaitu ada tindakan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban, akibat yang ditimbulkan, dan yang menyangkut bentuk kekerasan.



Bagi peneliti bagaimana informan dan para aktivis LSM mendefinisikan kekerasan ekonomi adalah sebuah subordinitas pada pengetahuan 'feminin'. Jika Baudrillard melakukan kritik pada Marxisme karena melihat kapitalisme hanya pada aspek produksi saja dan menunjukkan bahwa kapitalisme beroperasi juga pada proses konsumsi. Seperti pada kasus "supermall". Dimana, "supermall" dilihat sebagai "labirin produksi kapitalisme". Masyarakat masuk pada "bursa" dimana mereka harus melayani dirinya sendiri. Mereka melakukan prosedur dengan sukarela. Kekuasaan kapitalisme bukan hanya melakukan subordinasi ekonomi pada buruh tapi juga menjadikan konsumen sebagai "buruh ekonomi"-nya dengan membeli produk dan melayani dirinya sendiri. Maka, definisi kekerasan ekonomi hanya melihat perempuan sebagai "consumer" atau "pelanggan". Sebenarnya model berpikir seperti ini masih terjebak pada phallogosentrisme yang hanya mengukuhkan dominasi maskulin dan menunjukkan kemiskinan "ekonomi psikis" perempuan serta kemampuan metabahasanya. Pendefinisian tersebut menunjukkan pada kita ketidakmampuan metabahasa perempuan. Seharusnya, kekerasan ekonomi juga harus dilihat sebagai kuasa maskulin untuk melakukan disiden atau penolakan pada perempuan dalam memiliki dunia ekonominya dalam tatanan simbolik. Oleh karena itu, banyak sekali *Ecriture* maskulin yang menyebutkan bahwa dunia kerja adalah dunia laki-laki (saja). Jika pun ada perempuan yang bekerja, hal tersebut tidak mewakili hasrat perempuan secara simbolik dan dalam



bahasa lainnya bahwa perempuan telah mengalami penolakan dalam tatanan simbolik. Sebaiknya kita harus mulai melihat kekerasan ekonomi sebagai semua bentuk upaya yang apapun yang membuat subyek atau individu mengalami penindasan dan penolakan baik di dunia nyata maupun dalam tatanan simboliknya. Jadi, ketika perempuan mulai berpikir bahwa perempuan memilih menjalani dunia ekonomi sebagai tuntutan ekonomi, atau sebagai penghasilan tambahan dalam rangka membantu suami maka perempuan bisa dikatakan telah mengalami kekerasan ekonomi dalam tatanan simbolik.

Diskursus mengenai kekerasan tidak berhenti pada pengetahuan individu, tetapi bagaimana kuasa wacana dalam kehidupannya melakukan 'represi' terhadapnya. Bahkan, bagaimana kuasa beroperasi melalui represi tersebut bukan lagi dalam bentuk yang tradisional (misalnya dalam falsafah hidup perempuan Jawa lewat serat Wararetno) namun juga kekuasaan modern bekerja melalui 'aktivitas-aktivitas baru' dengan membuat individu 'terpaksa' untuk menginternalisasi nilai-nilai yang phallosentris. Atau dalam bahasa Foucault, kekuatan tidak lagi bekerja melalui mekanisme dari atas-bawah yang langsung di mana penguasa menerapkan pembatasan-pembatasan yang koersif atau massa yang, kurang lebih, selalu patuh. Menurut Foucault, pola hubungan kekuasaan diferensial yang kompleks meluas ke setiap aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik kita, melibatkan semua bentuk "posisi-subyek" (yang selalu kontradiktif), dan menjaga



kesepakatan kita bukan dengan ancaman sanksi hukuman melainkan dengan membujuk kita untuk menginternalisasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam tatanan sosial<sup>2</sup>.

Kekuasaan yang beroperasi secara tradisional tampak pada falsafah perempuan Jawa. Kekuasaan sering dipahami dalam pengertian negatif dan dilihat terutama sebagai mekanisme peradilan : yakni yang mendasari hukum, yang membatasi, menghalangi, menolak, melarang, dan menyensor. Kekuasaan mengandaikan penguasa yang perannya melarang : berkuasa berarti berhak melarang. Dan dengan demikian, melawan kekuasaan dipandang sebagai pelanggaran. Pembahasan perempuan dan kekuasaan dalam falsafah perempuan Jawa akan banyak bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat semiotik yang tentunya marjinal terhadap yang simbolik.

Dalam filsafat Jawa, Serat Wararetno dikenal sebagai serat yang berisi tentang *wejangan-wejangan* mengenai kehidupan berkeluarga, terutama untuk perempuan. Serat ini adalah serat yang diturunkan raja-raja Jawa untuk anak-anaknya dan tentu juga pada rakyatnya. Serat Wararetno memerintahkan kepada anak-cucunya dalam berkeluarga harus berhati-hati menjaga diri, terutama sekali perempuan. Perempuan diharapkan bisa 'setara' dengan laki-laki dengan mengembangkan pribadinya sebagai wanita. Falsafah perempuan Jawa dan pedharingan

---

<sup>2</sup> Madan Sarup, *Poststrukturalisme dan Posmodernisme, Sebuah Pengantar Kritis* (2003)



akan banyak dibahas didalamnya karena kepercayaan serat Wararetno bahwa perempuan adalah kunci kehidupan dalam berumah tangga,

" Kalau wanita jaman apalagi wanita Jawa di dalam kehidupan itu memegang kunci penting dalam jalannya roda rumah tangga, makanya ada istilah *pedaringan*...*pedaringan* itu yang memegang kunci itu wanita karena pa tanpa wanita kehidupan itu tidak akan jalan". (Pak Sri Hono)

*Pedharingan* atau yang berarti gudang makanan dalam dunia perempuan adalah simbolisasi dari penindasan psikis. *Pedharingan* tidak hanya diartikan sebagai satu dari tiga ruangan penting dalam 'feng shui' orang Jawa tapi juga sebuah label atau simbol yang diberikan pada perempuan Jawa. Bagaimanapun pintar dan suksesnya perempuan, mereka tetap akan memiliki hak otoritasnya secara nyata dan simbolis atas *pedharingan*,

" Begitupun fisik wanita bangun terlebih dahulu daripada pria begitu bangun nyandak dapur menyediakan makanan mengasuh anak menyelesaikan pekerjaan rumah samapai nanti sore suaminya mapan turu perempuannya baru nyusul turu ini kenyataan ya kita jangan jangan membandingkan dengan alam sekarang alam globalisasi itu kan sudah terkontaminasi oleh kebudayaan asing. " (Pak Sri Hono)

Walaupun secara filosofis perempuan Jawa dikatakan kuat fisik dan mental, namun seakan-akan perempuan Jawa mulai diterjemahkan dalam bahasa phallosentris. Dan tentu saja, perempuan yang sempurna adalah perempuan yang bisa melakukan fungsi *pedharingannya* dengan baik.

Dalam serat Wararetno juga dibahas bagaimana kesetaraan perempuan itu karena juga perempuan dianggap bisa melakukan dua pekerjaan baik laki-laki maupun perempuan.



'Ketidakmampuan' perempuan secara simbolik juga tampak dalam hubungan seksualnya,

" Seperti disini itu saya tulis dalam hubungan seks, seksualitas itu tidak ada kesetaraan antara wanita dan pria yang dicari adalah kepuasan. Pria itu dominan dimana-mana, padahal dalam hubungan itu kita harus setara."(Pak Sri Hono)

Seperti yang dikatakan Cixous dan Irigaray bahwa orientasi seksual perempuan yang sangat kaya dan tidak pernah dapat mencapai klimaks, membuat laki-laki merasa ingin 'menikmati' tubuh perempuan namun sebenarnya tidak mampu untuk menghadapi 'kekuatan' perempuan di dunia nyata. Jadi, mungkin itulah perempuan Jawa atau perempuan-perempuan lainnya di belahan dunia lain mengalami represi seksualitas secara simbolik.

Bila dalam falsafah Jawa, sejak wanita lahir sampai wanita menikah sudah memiliki tahapan-tahapan penting yang harus dilalui,

" Kalau di Jawa itu, sejak lahir sampai dengan perkawinan itu sudah benar-benar dipisahkan antara pria dan wanita. Lahir ya lahir masih sama-sama telanjang, belum ada ciri-ciri khusus. Tapi kalau orang Jawa umur 3 bulan daripada ketahiran itu.... setelah tidak di opo.... digedong itu kalau bayi perempuan pakai oto.... tahu oto.... oto itu seperti celemek itu loh, yan la ya sehari-harinya kalau wanita dipakai oto.... kalau pria nggak wes bledhong wes melayu ndak papa. Tapi kalau wanita pake oto trus sampai dengan umur mulai 1 th....sampe dengan mens pertama itu.... kalau istilah Jawa parapan itu sama-sama pakaiannya pake kalau jaman dulu....namanya kain model sabuk wolo, dadi kain ngarepe disumpelake tok, soale kenapa karena anak sampai dengan umur 9 tahun masih perlu gerakan yang bebas, mangkanya kainnya diberi sabuk wolo...nanti kalau sudah mens....situ kira-kira umur 9-11 th itu....terus laen pakaeannya, kalau yang laki terserah....trus kalau yang perempuan diganti pake kain biasa, tapi belum pake wiron....karena biar ringkes rapet....rapet itu ada dua fungsi rapet dalam hal kerapatan rahasia dan rapet untuk fisik kalau nanti sudah umur 15 tahun mulai tumbuh payudara. Lain lagi sudah kalau wanita kainnya pake pinjung....tahu pinjung....pinjung itu kain yang diturahi pucuknya



untuk tutup dada....dada ada pinjung...ada kemben....kalau kemben itu kham kain untuk dada tapi kalau pinjung itu satu kain itu hanya diikatkan, kalau sudah pinjungan nanti mulai tumbuh payudara itu ....nanti entrok....tau entrok .....itu kotang medura .....itu lo seng ditaleni mburi.....nah ato itu untuk menjaga pertumbuhan tubuh kalau sudah kawin atau nikah baru boleh pake kotang atau BH....itu dalam hal pakaian.....dalam pakaian luarnya begitu juga kalau sudah nikah pake wiron ,kenapa pake wiron? karena walaupun itu ringkas ....tapi ada wiron jadi kan bisa mekar jadi tidak mengganggu langkah....trus kalau masih gadis atau belum kawin pake baju kartini.....dari sini dibenekke sampek puser...ya tapi kalau nanti sudah nanti nikah bajunya lain pake kutu baru tau kutu baru gunanya apa kutu baru itu barangkali menyusui dibuka yang atas saja sudah bisa memberikan air susu ibu kepada anaknya itu baru dalam pakain jawa itu sudah diatur begitu teliti oleh leluhur kita dulu," (Pak Sri Hono)

Begitu detailnya tubuh perempuan direpresentasikan oleh phallosentrisme Jawa. Semua detail itu, dimaksudkan untuk mengontrol orientasi seksualitas perempuan agar dapat 'dinikmati' tentunya. Selain dimarjinalkan secara nyata dengan *pedharingan* perempuan ternyata juga mengalami represi dalam dunia simbolis.

Falsafah jawa lainnya mengenai perempuan adalah istilah 'wanita' yaitu 'wani noto' dan 'wani ditoto'. Atau dalam bahasa Indonesia bila terjemahkan menjadi 'berani menata' dan 'mau ditata'. Perempuan memang diberi *privilege*, namun sayangnya *privilege* tersebut hanya berlaku di dalam 'rumah' saja. Ini berarti mengajak kita untuk kembali terjebak pada oposisi logika biner, dimana ada laki-laki-perempuan, publik-privat, dan lainnya,

" Wanita atau dalam istilah anunya bahasa indonesianya perempuan tapi dalam bahasa jawa wanujo atau wanito wanito itu ada dua arti wani noto lan wani ditoto wani ditoto harus tunduk pada guru laki kepala keluarga ya suami tapi wani noto harus bisa mengatur kehidupan baik kehidupan suami sampai kehidupan anak-anaknya itu wanito kalau wanudyo itu figur yang bisa



ditonjolkan ke depan jadi wanita tidak hanya sebagai konco wingking tapi malah kalau bisa berdiri yang paling depan tapinya dalam segala hal." (Pak Sri Hono)

Selain wanita, istilah 'konco wingking' juga sering digunakan. Walaupun pada jaman kolonial penggunaannya dimaksudkan untuk 'melindungi' perempuan. Namun, istilah 'konco wingking' dapat diterjemahkan sebagai bentuk representasi maskulinitas terhadap identitas perempuan yang masih perlu 'dilindungi', sama seperti kajian orientalisme Said yang mengatakan pandangan barat mengenai Timur yang perlu 'diwakili'. Yang kedua, adalah bentuk segregasi atau pemarjinalan perempuan atau penegasan laki-laki sebagai simbol utama.

Kontrol atas tubuh perempuan tidak berhenti pada represi atas tubuhnya, tapi juga kehidupan seksualitasnya, seperti celetukan Foucault 'perempuan hadir hanya dalam diskursus seksualitas saja',

"Dalam liku-liku hubungan seks itu tidak pernah apa wanita itu memberi pelampiasan bahwa saya sudah pada puncak kenikmatan itu tidak ada yang merasa sudah pada puncak kenikmatan adalah pria padahal daya seksual wanita lebih tinggi daripada pria jadi pencapaian orgasme wanita lebih lambat lah itu terbukti daripada ajaran yang ada 1 kamasutra pernah dengar istilah kamasutra kamasutra yang di sini tang digambarkan seng elek-elek mengenai hubungan seks teknik bersetubuh padahal bukan itu kamasutra banyak sekali ajaran yang bagus antara lain perempuan kenapa ditindik tahu tindik itu mengurangi daya seks wanita jadi sama orang-orang sana India dia sudah dipelajari akhirnya ini apa ini apa organ telinga ada satu saraf yang bisa melemahkan daya seks wanita ditindik ilang daya seksnya ...kalau tindiknya dilepas ya tapi kan sudah bolong ini yang pertama sudah bolong ini sarafnya sudah hilang kalau dibolong itu sudah kurang." (Pak Sri Hono)

Bentuk-bentuk represi seksualitas ini mungkin adalah bentuk kesadaran phallosenrisme Jawa pada orientasi seksual perempuan yang



sangat kaya, sehingga perlu secara detail 'diatur'. Orientasi seksual ini, oleh Pak Sri Hono digambarkan sebagai sebuah 'kelebihan' perempuan terutama dalam menarik laki-laki untuk obesif dan posesif terhadap seksualitas perempuan,

" Coba cerita wayang yang menjadi rebutan apa pasti wanita, cerita sinetron yang menjadi perkara wanita di Yunani sendiri dewa Zeus juga wanita di Mesir Cleopatra wanita jadi wanita itu mesti berdiri dipaling depan jatuhnya Hitler sama wanita jatuhnya Soekarno sama wanita tuh menandakan bahwa wanita itu adalah kehidupan sesungguhnya lebih dominant daripada itu kalau berdasarkan kehidupan di daerah Jawa." (Pak Sri Hono)

Selain itu, tanpa bosan-bosannya phallosentrisme membahas perempuan, sampai sedetil apa perempuan harus 'menjaga' orientasi seksualnya, tentunya dalam pandangan yang sangat phallosentris,

" Kamasutra banyak sekali ajaran yang bagus antara lain perempuan kenapa ditindik tahu tindik itu mengurangi daya seks wanita jadi sama orang-orang sana India dia sudah dipelajari akhirnya ini apa ini apa organ telinga ada satu saraf yang bisa melemahkan daya seks wanita ditindik ilang daya seksnya ...kalau tindiknya dilepas ya tapi kan sudah bolong ini yang pertama sudah bolong ini sarafnya sudah hilang kalau dibolong itu sudah kurang kalau di Cina kaki tahu singkek...kecil dibikin kecil sehingga dia jalannya saja sudah susah apalagi melawan baru jalan saja sudah susah jadi diapa-apa kan oleh lakinya sudah gak bisa melawan karena jalannya saja sudah susah kalau di Yunani dengan tumit tinggi kalau jalan dengan tumit tinggi itu kan pertama kan kita gerakannya tidak bisa bebas ya kedua namanya ini otot yang disini ya betis itu istilahnya itu sudah juga mengurangi daya seks padahal seks dalam kewanitaan terutama di kaki sama di pinggang makanya dia mau yang konvensional dia ditempatkan di bawah itu antara lain begitu lah lah kalau di Jawa beda melahirkan itu supaya wanita tetap eksis itu kalau perlu dicancang selama 7 hari itu supaya tidak jingkrong karena kalau wanita habis melahirkan jingkrong nanti timbul farises jadi kalau nanti melahirkan sedapat mungkin jangan tidur jingkrong nanti farises kalau farises dengan sendirinya nanti daya seksnya berkurang." (Pak Sri Hono)



'Yang semiotik' pada perempuan memang tidak akan pernah berhenti untuk dibahas, dalam falsafah Jawa terlihat pada tiga hal penting dalam mencari jodoh yaitu bibit, bebet, dan bobot,

"...ah bibit bebet bobot itu aturannya baik perempuan maupun laki untuk mencari pasangan bibit itu sudah terang anaknya siapa keturunan anu kesehatan wajahnya ayu opo tampan karena kita kene opo kok cari bibit yang unggul karena kita kan memerlukan punya keturunan keturunannya kan harus juga harus bagus ibibit bebet bebet oitu dasar akhlak pendidikan moral itu bebet bobot itu bobot itu baru mengenai harta benda diletakkan ketiga karena apa kita jangan tiru apa yang ada sekarang sagendong dan sarpikul , lek sak gendong lan sarpikul itu bukan adat jawa kalau adat jawa lanang wedok itu bukan adat jawa itu adat Indonesia kalau adat Indonesia lanang wedok haknya sama kalau segendong lan sarpikul itu berarti adat timur tengah dengan alasan lelaki akan menanggung beban perempuan la lek perempuan kan hanya sendiri tapi dalam hal harta waris tidak ada segendong dan sepikul wong sama-sama anaknya yang lain kan cuman bentuk biologinya lain tapi hak dan kewajiban sama mangkanya ada istilah mendem jero mikul dhuwue itu bukan berarti mendm jero edan mikul dhuwur di dalam banduso itu ndak mendem jero itu segala sesuatu kekurangan dari pada teruma orang tua itu harus kta tutupi kita tojolan baik-baik saja mikol dhuwur kita harus bisa hidup mengangkat martabat keluarga." (Pak Sri Hono)

Kriteria bibit, bebet, dan bobot lebih berat pada perempuan, karena perempuan harus memenuhi syarat *pedharingan* tadi dan kesuburan tentunya. Perempuan Jawa tidak hanya harus siap menata kehidupan rumah tangganya, tetapi juga harus siap 'dikontrol' baik secara simbolik maupun dalam dunia nyata.

Istilah *konco wingking* sendiri memiliki sejarah yang cukup menarik pada jaman kolonial dulu. Awalnya dalam istilah Jawa, *konco wingking* tidak dikenal, hal ini bermula dari kondisi di jaman kolonialisme Belanda DI Indonesia. Perempuan yang dianggap sebagai kunci kelangsungan hidup rumah tangga merasa perlu dilindungi dan diselamatkan dari penjajah.



Perempuan harus dijaga agar tidak terusik penjajah dan merasa aman. Maka disebutlah *konco wingking*, karena saat itu yang menjadi fokus dari penjajah adalah siapapun yang berada di garda depan (dalam hal ini para lelaki),

" Konco wingking itu istilah setelah penjajahan ya sebelum penjajahan nggak ada konco wingking kenapa istilah-istilah penjajahan karena segala sesuatu itu yang menyediakan perempuan dan dibelakang misalnya ada tamu itu mboh londo mboh musuh mboh opo orang perempuan kan dilindungi mangkanya ditaruh wingking wingking itu mburi jadi kalo orang yang di mburi itu oleh si tamu itu sudah dianggap tidak ada artinya bagian belakang saja yang perlu yang dimuka yang digepuk padahal kunci daripada rumah tangga ada di wanita pria mong nggolek tok nggolek usaha untuk mencukupi kebutuhan tapi yang memegang kunci pedharingan adalah wanita." (Pak Sri Hono)

Sebuah bentuk filosofi yang cukup menarik, dimana sejarah *pedharingan* dan *konco wingking* ini dapat menjadi sejarah panjang juga bagi gambaran miskinnya 'ekonomi psikis' perempuan dan kemampuan metabahasanya. Itu karena perempuan tidak pernah dapat menggambarkan dan merepresentasikan dirinya sendiri dan menurut pengalaman-pengalaman hidup mereka sendiri.

Representasi perempuan Jawa yang phallosentris juga tampak pada cara-cara masyarakat Jawa memandang aktivitas sehari-hari perempuan yang idealnya harus di *pedharingan* tadi alias menjadi *konco wingking*,

" Wanita wanita itu dulu kalau dia mau dilamar orang itu menariknya mesti antara jam delapan pagi atau jam 4 sore kenapa karena begitu bangun habis cuci muka solat terus nyapu trus rampungan setengah delapan baru kita mandi terutama kalau yang di desa mandinya terutama di kali di sumber atau di belik soalnya nanti pulang nya nanti habis nyuci pulang sama nyangking klinting ngangsu yang punya umurmulai itu disitu biasanya yang namanya congkok , mak comlang terus abis ini



aslinya gimana sekarang lek dilihat ya cuman wes di make up percuma gak aslinya nanti abis make up suruh raup mukanya peok." (Pak Sri Hono)

Representasi perempuan tidak hanya pada falsafah hidup orang Jawa saja tapi juga di dunia 'modern' saat ini. Banyak mitos-mitos perempuan yang berkembang, antara lain *public sphere* yang makin kabur dan bahkan memunculkan isu-isu baru dalam kajian tentang perempuan.

Mitos-mitos perempuan 'modern' tersebut seringkali dikaitkan dengan media dan informasi. Perempuan-perempuan di negara dunia ketiga dapat belajar dari perempuan-perempuan di dunia yang pertama dan kedua tentang pengalaman-pengalaman hidupnya. Namun, terkadang yang menjadi kekhawatiran adalah hilangnya identitas perempuan dunia ketiga karena terjebak pada narasi besar tentang perempuan.

Pembahasan-pembahasan mengenai perempuan dunia ketiga, dicirikan dengan 'keluarga suci'. Keluarga dalam masyarakat negara dunia ketiga menjadi sesuatu yang sangat disakralkan, dan bahkan bagi perempuan sendiri, keluarga adalah bagian dari identitasnya,

" Karena kan status pernikahan itu dianggap sebagai status yang aman jadi daripada bercerai lebih baik dia tetap berada dalam sebuah hubungan perkawinan walaupun perkawinan itu bukan perkawinan yang ideal bukan yang harmonis gitu lo tapi menurut dia status itu lebih terhormat di mata masyarakat di mata keluarganya karena perempuan yang menikah adalah perempuan yang dipandang terhormat dari pada perempuan yang lajang apalagi janda itu juga yang membuat bargaining posisi perempuan lebih rMawar ya itu mungkin....ya itu bukan hanya mitos jawa sepertinya dimana-mana perkawinan itu identik dengan *security*, *secure* secara posisi *secure* secara status, *secure* secara ya...apa namanya mungkin ini ya secara psikis secara psikologis dia merasa *secure* kemudian dia mendapat *social approval* artinya e....disetujui didukung oleh masyarakat ya begitulah ya perempuan yang baik ya ya sepeti itulah masyarakat



ya itu juga kan yang menyebabkan walaupun dia mengalami apa namanya kondisi rumah tangga yang nggak harmonis dia memilih tetap bertahan demi status-status itu tadi ya. Menurut dia dilarang kerja itu masih kalau kita bikin level kekerasan itu masih lebih baik daripada dicerai, dicerai itu mungkin dia malu keluarganya malu dia mungkin pressure dari keluarganya yang janganlah jangan bercerai bercerai itu kan aib di keluarga kita selama ini nggak ada yang bercerai masak kamu mau bercerai gitu misalnya itu kan juga dari sekian banyak pilihan buruk dia memilih yang agak tidak buruk gitu lo ya kalau itu sih kembali pada bagaimana anggapan masyarakat tentang seorang perempuan ideal, perempuan ideal itu tadi yang menikah harus bisa melahirkan keturunan ya selain misalnya keluarga suci itu tadi itu itu kan yang menyebabkan perempuan akhirnya bargaining posisinya "Mawar tapi itu juga kalau masalah kelas beda lho" (Bu Ratih)

Namun, kondisi-kondisi ini jarang sekali ditemui pada perempuan-perempuan kelas bawah, karena bagi mereka *'nothing to lose'*, tidak ada yang perlu disesalkan karena perempuan-perempuan kelas bawah ini ternyata juga mapan,

"Kalau di Ariel Herianto tapi saya lupa tulisannya yang mana pernah baca dia pernah mengatakan bahwa posisi seperti itu hanya pernah dialami oleh perempuan kelas atas atau menengah-menengah atas jadi ketergantungan pada finansial ketergantungan pada status sebuah perkawinan itu lebih-lebih apa ketidakbebasan keluar dari belenggu itu lebih dialami oleh wanita kelas menengah daripada kelas bawah. Perempuan kelas bawah karena kita menyebutnya mungkin *nothing to lose* gitu ya jadi cerai nggak ngefek nggak cerai juga nggak ngefek misalnya itu mereka jadi lebih kalau kita katakan itu sebagai sebuah kemandirian ya mandiri sekali konsep kemandirian itu seperti apa makanya apa angka perceraian itu lebih tinggi pada perempuan kelas bawah karena mereka lebih mandiri secara finansial biasanya karena kondisi ekonomi yang "Mawar eh itu menyebabkan dua-duanya harus bekerja dan itu menyebabkan bahwa si suami maupun istri merasakan bahwa kedudukan mereka itu sama karena saya juga memberikan kontribusi yang cukup besar untuk keluarga ini dan kasus yang mereka bawa dari strata sosial menyebabkan mereka *nothing to lose* itu tadi jadi dari aspek status posisi itu nggak ada yang dipertahankan gitu maksudnya saya bercerai atau tidak bercerai tetep saja saya orang miskin nggak ada yang peduli gitu lo beda kalau misalnya saya sebagai dosen saya bercerai wah itu kan status. Kan disana gampang sekali kan cerai suaminya apa sedikit cerai, kan gitu kan perempuan kelas bawah apa sedikit pegat, pembantu sayaitu bolak-balik gonta ganti. Beberapa kali saya pernah punya



pembantu itu kan selalu statusnya janda dan dia itu santai aja gitu lo dan dia kenopo kok anu, oh mboten genah niku biasa gitu lo ya udah cerai gitu bukan sesuatu yang ini tidak bicara tentang moralitas lo ya tetapi bicara tentang pressure untuk mempertahankan itu dari aspek sorotan masyarakat itu tidak dialami perempuan kelas bawah dan itu lebih menjadi sesuatu yang lebih berat bagi perempuan kelas menengah” (Bu Ratih)

Perempuan sendiri, bahkan tidak berani melakukan perlawanan dalam dunia nyata, apalagi dalam dunia simbolik. Perempuan negara dunia ketiga, memang lebih memilih 'aman' di rumah. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh iklim masyarakat kita yang 'moralis' dan 'religius'. Berbeda dengan kondisi perempuan di negara-negara dunia pertama yang lebih egaliter dalam menentukan hidupnya dan moralitas sudah lama usang di sana.

Fenomena-fenomena keluarga suci lainnya dapat dilihat pada beberapa isu misalnya pertukaran peran dalam keluarga. Perempuan-perempuan 'modern' ini boleh saja merasa berhasil melakukan negosiasi peran dengan suaminya terutama dengan pekerjaan domestik, namun terkadang perempuan sendiri masih terjebak dengan phallosentrisme, keluarga suci, terutama dalam tatanan dunia simbolik. Dan terkadang perempuan sendiri juga belum siap untuk menerima privilege itu, tidak jarang yang lebih memilih laki-laki sebagai 'penghuni utama' di dalam keluarga,

“.....saya sudah melihat banyak fenomena itu misalnya suami-suami yang bekerja di rumah trus apakah dia dikatakan yang...trus istrinya bekerja di luar rumah...trus yang ranah publik yang mana? Nggak bisa lo lha iya kan seperti itu trus mungkin ternyata suami-suami itu juga ya karena dia bekerja di rumah misalnya dia juga mengurus tugas-tugas domestik misalnya bantu momong anaknya misalnya anaknya pulang sekolah bantu momong anaknya sementara istrinya memang harus



bekerja.....apakah masih dia memandang yang ranah publik ranah privat itu sebagai sesuatu yang kaku yang harus dibedakan antara yang satu dengan yang lain ya itu misalnya kamu suami kamu bekerja jadi kamu harus memberi saya nafkah karena kan kamu kepala keluarga lha misalnya khan itu..apa yang membuat si suami merasa semuanya harus ditanggung istri kalau untuk yang..... perempuan sendiri sebenarnya tidak siap dengan achievement-achievement yang dia raih salah satunya adalah tetep memberlakukan pola relasi gender lama pula kepada pasangannya kembali kepada ya sudah saya punya gaji besar saya bekerja tapi ya tetep kamu yang harus, jadi masih seperti itu dan juga ketika dia mengharapkan misalnya dia S2 nggak mau menikah dengan lelaki lulusan SMA ah itu kan sebenarnya masih timpang lagi kalau gitu jadi keberhasilan-keberhasilan dalam tanda kutip ya yang diperoleh perempuan ternyata itu tidak mengeluarkan perempuan dia mungkin secara individu terbebaskan tapi ketika dia memberlakukan gender yang lain yaitu gender laki-laki tetep aja dia terjebak pada pola relasi yang tradisional juga gitu lo ya kita bisa mengatakan sebuah relasi gender timpang misalnya perempuan bekerja laki-laki tidak bekerja kemudian laki-lakinya ini masih menuntut perempuan dan sebagainya sama seperti seolah-olah dia masih menjadi kepala keluarga tapi kalau perempuan bekerja dan sudah terjadi pertukaran peran itu sudah tidak masalah lagi sebenarnya gitu lo perempuan bekerja di luar rumah laki-lakinya di rumah karena nganggur dia yang mengerjakan semua pekerjaan domestik yang momong anak yang cuci piring yang umbah-ubah yang ngepel dan segala macam ya kalau menurut saya itu sudah tidak menjadi masalah khan nah tapi kadang-kadang yang seperti ini masih dipertanyakan oleh perempuan lo khan laki-laki gak nyambut gawe ngene-ngene-ngene ya sama saja kan dia berharap kalau si suami ini harus memiliki peran-peran gender tradisional kan tetep aja dulu ketika suami bekerja istri dirumah ini menggunakan.. berperan sebagai apa ya pengurus rumah tangga dikatakanimbang sekarang kalau posisi seperti ini istrinya juga menuntut karena suaminya harus lebih lagi kan seharusnya itu justru timpang kalau menurut saya gitu lo itu juga timpang dan e banyak perempuan yang tidak siap sebenarnya seperti itu tadi kalau cari suami misalnya kalau saya sudah bergaji lima juta ya suami saya harus bergaji 10 juta gitu lo kalau 3 juta 2 juta ya nggak level dia masih terus menuntut yang lebih dari laki-laki ya itu kan serba salah juga laki-laki gitu loh di satu sisi dia merasa tertindas dan disisi lain itu mungkin gambaran keluarga yang kontemporer.” (Bu Ratih)

Mitos-mitos perempuan lainnya, misalnya tentang bagaimana perempuan 'modern' digambarkan dengan berbagai atributnya yang sangat glamour dan bahkan mengaburkan konsep publik dan privat



sendiri. Terkadang makna publik diabsolutkan sebagai sesuatu yang berada 'diluar' atau keluar dari rumah,

" Kalau yang mitos perempuan modern itu yang apa ya....ya mungkin hanya sekedar bahwa dia melihat bahwa mitos perempuan modern dengan segala atributnya, berkarir, berpenghasilan sendiri, mentereng, keren, wangi, berblazer dan sebagainya dengan segala atributnya itu yang mungkin juga peran media massa kalau saya kaitkan, kalau anda kaitkan dengan media sekarang kan kita menggambarkan dengan iklan segala macam itu kan banyak menggambarkan bahwa perempuan bekerja itu lebih prestise gitu ya dibanding yang tidak bekerja pokoknya yang masuk ke ranah publik itu dipandang eh berhasil ukuran-ukuran, kalau anda ingin disebut sebagai perempuan ini ya anda harus punya label-label seperti ini gitu lo label-label tertentu juga misalnya ya itu tadi harus bekerja harus punya karir yang bagus, harus dan bekerjanya harus di sektor-sektor yang eksekutif, penggambaran-penggambaran di iklan-iklan itu kan perempuan bekerja itu kan perempuan-perempuan yang berangkat ke kantor, kantornya ber-ac maksudnya peran-peran eksekutif gitu ya bukan misalnya, bukan pemilik katering misalnya, padahal kan itu juga bekerja, apaun definisi bekerja itu kan yang menghasilkan uang atau dia punya jasa jahitan sendiri itu kan nggak ada yang diaktegorikan perempuan bekerja secara glamor, glamorisasi, sebuah mitos-mitos perempuan modern itu kan yang selalu bekerja dan bekerja di ranah publik karena memang di rumah, keluar rumah menuju ke kantor, pake seragam yang keren, cantik ya itu tadi wangi pake blazer kerja di kantor gajinya tinggi, dilantai berapa ya itulah konsep bekerja konsep yang menurut media, meskipun perempuannya bekerja membuatkan teh untuk suaminya ini tetep kayaknya lebih sukses dari si istri." (Bu Ratih)

Jadi masalah perempuan-perempuan dinegara dunia ketiga mungkin lebih kompleks karena melibatkan berbagai aspek kehidupan perempuan. Dan yang paling berat adalah ketika perempuan harus menerima untuk teroedipalkan oleh keluarga sucinya.

Diskursus kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan, selain melibatkan individu juga melibatkan wacana-wacana yang ada. Dimana kuasa dan wacana saling berkaitan. Penelusuran ini menurut merupakan usaha menguraikan bentuk kuasa yang berbelit-belit dan



banyak variabel di dalam praktik diskursif maupun non diskursif dan mengembangkan serangkaian metode untuk memeriksa bagaimana kuasa beroperasi. Kuasa tidaklah dimiliki, diberikan atau diperebutkan, lebih baik ia dijalankan dan eksis hanya di dalam aksi. Kuasa merupakan substratum atau lapisan bawah yang dapat berpindah yang di atasnya ekonomi, cara produksi, cara pemerintahan, pengambilan keputusan, bentuk-bentuk pengetahuan, dan lain-lain. Kuasa juga dipahami bersifat plural, tidak bekerja pada 'lintasan tunggal', melainkan bersifat 'kapiler' menyebar melalui wacana, tubuh, dan hubungan di dalam suatu jaringan. Dengan kata lain kuasa tidak berasal dari sumber tunggal, melainkan beredar melalui keseluruhan tubuh sosial, bahkan sampai bagian tubuh terkecil dan terlihat sepele.

Begitu juga dengan wacana perempuan dalam serat Wararetno dan mitos perempuan modern di dunia ketiga. Bagaimana kuasa dalam wacana keduanya bekerja atau beroperasi dengan cara yang berbeda. Bagaimana kuasa dalam wacana keduanya merupakan suatu bentuk kuasa yang produktif, tanpa harus merisaukan siapa pemegang kuasa, namun lebih pada bagaimana kuasa bekerja.

Wacana tidak terkait dengan pemikiran, pikiran, atau subyek yang menimbulkannya, melainkan dengan bidang praktis dimana ia disebarkan. Wacana adalah serangkaian 'praktik' daripada struktur. Wacana tersusun atas tanda, namun mereka melakukan lebih dari sekedar menandakan benda, bagi mereka adalah "praktik yang secara sistematis membentuk



obyek yang mereka bicarakan". Pendekatan analisis wacana Foucault bukan untuk menyelidiki hukum konstruksi wacana sebagaimana dilakukan oleh mereka yang menggunakan metode struktural, tapi pada kondisi keberadaannya. Wacana tidak terkait dengan pemikiran, pikiran, atau subyek yang menimbulkannya, melainkan dengan bidang praktis dimana ia disebarkan. Wacana adalah serangkaian 'praktik' daripada struktur. Wacana tersusun atas tanda, namun mereka melakukan lebih dari sekedar menandakan benda, bagi mereka adalah "praktik yang secara sistematis membentuk obyek yang mereka bicarakan".<sup>3</sup>

Intinya konsep wacana Foucault sangat terkait erat dengan konsepnya mengenai kebenaran, pengetahuan, dan kuasa. Konsep kuasa Foucault tidak di dalam agensi-misalnya negara, kekuatan ekonomi, atau individu- melainkan memandangnya dalam pengertian operasi 'mikro kuasa'.

Dari pembahasan mengenai definisi kekerasan, jenis kekerasan dan wacana-wacana dan mitos-mitos perempuan yang berkembang, peneliti melihat bahwa ternyata perempuan itu hanya hadir (terutama dalam serat Wararetno) dalam diskursus mengenai seksualitas dan 'keluarga suci'.

Dalam falsafah Jawa ketika kita bicara perempuan, maka yang ada hanyalah masalah orientasi seksualitas perempuan yang harus 'dijaga' atau lebih miripnya 'dikontrol'. Sedangkan dalam mitos perempuan

---

<sup>3</sup> Ann Brooks, *Postfeminisme and Cultural Studies* (1997)



modern, perempuan mengalami kekerasan secara simbolik. 'Keberhasilan' perempuan dalam dunia nyata, seringkali tidak merubah posisionalitas perempuan secara psikis atau dalam dunia simbolik. Karena simbolik telah direpresentasikan oleh "The Name Of The Father" atau atas nama ayah.





## BAB VII

### NEGOSIASI PERAN

#### PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN EKONOMI

Negosiasi sering dikaitkan dengan persoalan identitas dan kemampuan metabahasa. Negosiasi perempuan lebih kompleks lagi karena melibatkan posisionalitas perempuan yang marjinal terhadap laki-laki. Apa yang disebut Foucault sebagai pengetahuan sangat erat kaitannya dengan negosiasi, identitas, dan persoalan metabahasa. Karena dalam beberapa karyanya, Foucault menunjukkan bagaimana pengetahuan-pengetahuan tertentu yang dianggap sepele telah dibungkam dengan 'diam-diam'. Begitu juga dengan pengetahuan tentang perempuan maupun pengetahuan perempuan. Ada penindasan, penolakan, subordinasi, dan marginalisasi terhadap pengetahuan perempuan dan pengetahuan tentang perempuan.

Kristeva-lah yang kemudian banyak mentransformasikan pemikiran Foucault pada kajian-kajian tentang subordinasi feminin yang belakangan disebut sebagai "post-gender". Bagi Kristeva, subordinasi feminin adalah sebuah posisionalitas dihubungkan dengan konsep marjinal dan bukan sebuah esensi. Karena, feminin bukan sesuatu yang khusus untuk perempuan melainkan suatu posisi psikis, suatu bidang yang dipelihara di dalam ketidaksadaran, dan suatu bidang yang marjinal kepada simbolik. Oleh karena itulah Kristeva percaya bahwa budaya adalah upaya untuk



menemukan perlawanan yang simbolik. Dan Kristeva menghubungkan yang simbolik dengan berbagai wacana yang mengatur kehidupan publik : agama, ekonomi, pengelompokan tribal dan nasional, hukum, politik, dan metafisika, dan mengaitkan logika dominan dan basis kuasa dan masing-masing paternitas (ayah) dan maskulinitas. Sejak saat itu, Kristeva tertarik untuk melakukan analisis kembali ke tingkatan pra-Oedipal menggunakan riset ke dalam penguasaan bahasa masa kanak-kanak awal. Dan usahanya kali ini sangat dekat dengan karya Lacan dan Freud tentang kekuatan kuno pra-Oedipal yang ia terjemahkan dalam pola hubungan Ibu-anak dan identifikasi anak dalam hukum paternalitas Bapak.

Pada perempuan korban kekerasan terutama kekerasan ekonomi, kekhawatiran Kristeva pada hilangnya identitas perempuan sebagai sebuah cermin penindasan psikis karena identifikasi mereka dengan sang ayah terjadi. Mbak Melati adalah sebuah gambaran perempuan yang mengalami "kemiskinan dalam ekonomi psikis". Pada kondisi awal kanak-kanaknya, mbak Melati sangat mengidentifikasikan dirinya secara psikis dengan karakter bapaknya,

" Bapakku kan tentara ya, Bapakku kan angkatan darat, saya dititipkan di mbah Lamongan....."(Mbak Melati)

Ketika ingatan masa kanak-kanak awal ditanyakan, jawaban yang pertama kali muncul adalah karakteristik Bapak. Ada semacam kekuatan psikis yang direpresikan pada dunia simbolis mbak Melati. Bahwa figur ayah adalah pemimpin keluarga yang menjadi "trend" dalam edukasi



anak-anak. Walaupun pekerjaan mengasuh anak adalah "kewajiban" Ibu, namun tentang bagaimana cara anak dididik adalah "hak" Bapak. Bapak adalah "rules" dan Ibu adalah birokratnya. Bapak adalah produsen dan Ibu adalah penyalurnya. seperti dalam bahasa "Fast Food" Baudrillard, Ibu seperti pramuria restoran cepat saji yang hanya menjalankan prosedur dari manajemen tanpa bertanya "resep rahasia" dari makanan yang ia sajikan. Dan anak seperti masyarakat "Negeri Fast-Food" yang menerima makan pesannya tanpa bertanya dari apa saja bahan makanan yang mereka makan. Ibu dan Anak adalah "birokrat" dari "rules" Bapak.

Identifikasi identitas lewat hukum paternalitas Bapak pada Mbak Melati tidak berhenti di masa kanak-kanak, namun sampai pada penerjemahan identitasnya dalam pemikiran, dunia simbolisnya dan terutama bahasa.

Penokohan Soekarno dalam dunia politik oleh Bapak pada diri mbak Melati telah menjadikan Soekarno di mata mbak Melati figur manusia "SUPER". Dan tentunya menciptakan posisi marginal pada feminitas, karena manusia "SUPER" adalah Soekarno, laki-laki, gagah, jenius, dan perkasa (memiliki banyak perempuan),

".....sewaktu SMA itu sudah ikut organisasi GSNI, itu jaman Bung Karno jaya.....Bapakku kan termasuk orang PNI, jadi tahu betul. Bapakku juga tentara, jadi tentara yang nasionalis gitu loh, dia juga pecinta Soekarno, buku-buku Soekarno banyak. Aku juga suka baca-baca buku Soekarno, buku-buku putih, buku-buku yang dilarang pemerintah.....nasionalis, agamanya gak kuat, Islamnya gak kuat, dia cenderung kejawen.....Ya rasanya di Indonesia itu gak ada orang sehebat Soekarno, tidak sehebat Soekarno, sampai sekarang saya tidak menemukan orang



selevel, separohe, gak onok iki prasaku. Dia konseptor sejarah, terlepas bojone akeh iku wis lumrah, manusiawi, justru orang yang libidonya seks tinggi, walaupun iku duduk penelitian iki, justru brilian itu, saya itu kan mayoritas dekat dengan orang-orang gede, justru wong sing otake brilian-brilian rumangsaku....."(Mbak Melati)

Pada dunia simbolis, mbak Melati banyak merepresentasikan identitas perempuan berdasarkan apa yang "layak" dan "pantas" bagi Bapak. Bahkan sekarang bukan lagi sebagai "trend" mendidik anak tapi juga sebagai "trend" sebuah normalitas dalam berinteraksi dengan lingkungan dan terutama lawan jenis,

"Bapakku lek ngajari yo, suka peka terhadap lingkungan...walaupun aku sendiri bukan orang kaya, ya itu disuruh pek sama lingkungan, memahami, lingkungan masyarakat seng, ya terutama orang miskin ya.....bener, yo mungkin yo, tapi kalau saya inget ajaran bapak saya itu lho! kon iku ojok suka njalok-njalok, gak to, dadi aku pacaran iku gak pernah njalok-njalok, meneng ae dan menganggap iku tabu yo, opo maneh njalok-njalok iku sesuai dengan ajaran bapakku, trus tapi aku tak abaikan yo, karena waktu itu aku orangnya sederhana, gak macem-macem, gak nuntut, ngejreng-ngejreng iku yo ndak, waktu iku aku yo digawani bapak sepeda motor, waktu kuliah yo..."(Mbak Melati)

Ada banyak hal lagi yang terjadi pada identifikasi konsep diri mbak Melati sebagai perempuan. Proses identifikasi dengan figur ayah sebagai simbol utama, telah membawa mbak Melati dalam "kotak permainan" phallosentris dan terjebak oleh metanarasi bahasa laki-laki. Seperti yang diyakini Luce Irigaray bahwa laki-laki dengan bahasa skizofreniknya memiliki kemampuan metabahasa yang lebih daripada perempuan. Karena bagi Irigaray, bahasa dan sistem representasi tidak dapat



mengekspresikan hasrat perempuan. Hilangnya identitas feminin yang "sesungguhnya" dan kemampuan metabahasa mbak Melati tampak pada "kebungkaman" mbak Melati pada permasalahan pribadinya terutama dengan lawan jenis (laki-laki mestinya).

Pada awal masa-masa pra-nikah, mbak Melati dihadapkan pada masalah pribadi yang kompleks. Mbak Melati mengalami kebimbangan sekali (lagi oleh laki-laki), ketika "ancaman" datang dari pasangannya yang menginginkan menikah secepat mungkin. Munculnya niat menikah dari mbak Melati bukan representasi dari hasrat seorang perempuan, tapi karena kemampuan laki-laki dalam meneguhkan posisi psikisnya yang dominan terhadap pasangannya,

"...Kon lek gak cepet-cepet kawin, aku iki arepe ditugasno nang Timor-Timur. Timor-Timur kan masih rame ya. "Nek aku nang Timor-Timur yo kemungkinan kita ndak ketemu". Trus yo akhere aku ndak duwe pilihan lio, mek de'e tok, yo wes gak popo wes....."(Mbak Melati)

Dalam masalah rumah tangganya, pada akhirnya keputusan dan penyelesaian masalah hanyalah representasi dari hasrat Bapak. Dan itu berarti juga hukum paternal Bapak,

"Tapi saya masih sekolah, dia (suami) kan gak kuliah dulu, aku menikah itu sebelum lulus, Mei 1985, sebelum lulus kuliah itu, waktu itu kan aku bikin skripsi tapi kok gak dadi-dadi, trus mari ngono kok aku maleh belajar kerjo aku dadi wartawan, nanggone majalah Liberti, trus maune aku ditawari Jawa Pos, gak entok ambek bapakku. "Kon timbange terkatung-katung, wes tutukno ae kuliahmu, gak usah kerjo, bapak sek kuat mbandani". Yo sombonge ngono Bapakku iku....."(Mbak Melati)



Representasi dari Bapak lainnya juga tampak pada bentuk sifat-sifat feminin yang biasanya dimiliki oleh Ibu, seperti khawatir, cemas, dan berharap. Bapak tidak hanya memberi ruang gerak yang sempit pada identifikasi feminin tapi juga "mengambil lahan" positivitas feminin. Seperti tampak pada kekhawatiran Bapak pada kondisi rumah tangga mbak Melati dan kebijakan-kebijakan Bapak dalam mengatasi masalah tersebut,

"Bapakku tahu yo, aku gak bahagia yo, aku yo suka purik, yo suka anu...."Kon iku bojomu nyambut gawe, kok gak dike'i duwek" kene yo gak tahu, yo "yok opo carane njauk", aku ngono....."Kon iku wes wayahe mandiri". Akhere golek kontrakan....Jadi aku sudah bekerja, itu baru bapak ngusir gitu. " Kamu harus belajar mandiri, kamu sudah bekerja, jangan ikut orang tua terus". (Mbak Melati)

Kebijakan-kebijakan Bapak tidak berhenti hanya pada pekerjaan dan permasalahan rumah tangga saja tapi juga pada karir politiknya. Bapak tidak hanya mempengaruhi secara akademis tapi juga politis,

"Setelah menikah, sama sekali nyaris tidak memiliki aktivitas apapun. Pertama, tidak boleh sama Bapak, ya sebenarnya sudah ada yang ngincer, saya dijadikan wakil sekretaris PDI di Surabaya, tapi tak diijinkan, tapi saya nurut sampek aku dseneni karo penguruse, "Kon iku dianu...wong liyane antri", akhirnya aku disuruh membuat surat pernyataan untuk mengundurkan diri, akhirnya dengan ketekatan saya, mungkin karena saya bekerja, mungkin kan waktu jadi....dengan mudah begitu saja tak lepas dari organisasi."(Mbak Melati)

Dari awal, Kristeva mengingatkan kita pada ketertutupan awal anak-anak kepada ibunya, eksplorasi terhadap tubuh ibunya dan tubuhnya sendiri. Ketertutupan mbak Melati pada ibunya bahkan dimulai



sejak bayi, karena masa balitanya yang dihabiskan bersama kakek-nenek di desa. Dan ketika beranjak SD mbak Melati langsung berhadapan dengan hukum paternal Bapak. Ini berarti jouissance (kepuasan) dengan ikatan ibu di masa pra-Oedipal lebih pendek dan singkat.

Dan bagaimana Kristeva menggunakan istilah 'semiotika' untuk mengkategorisasikan aktivitas praverbal yang 'disensor' oleh tatanan simbolik namun tidak pernah hilang. 'semiotika' masuk ke dalam suatu hubungan yang bersifat berlawanan dengan yang simbolik, dan secara terus-menerus menekan wacana rasional. Saling mempengaruhi antara semiotika dan simbolik menghasilkan suatu proses penandaan (significance) dari pada suatu makna univokal (signification). Dan tempat dimana praktik penandaan terjadi adalah sebuah 'teks', suatu situs dimana energi-energi ketidaksadaran secara simultan menyerang konvensi-konvensi formal bahasa.

Kasus yang kedua, adalah kasus yang agak berbeda dari mbak Melati, sebut saja mbak Mawar. Mbak Mawar sejak kecil, hampir sama dengan mbak Melati, dipisahkan dari orang tuanya. Mbak Mawar dibesarkan oleh kakek dan neneknya di Desa. Mbak Mawar mendapat kasih sayang yang melimpah. Namun, saat beranjak balita, mbak Mawar dipulangkan pada orang tuanya di kota. inilah masa-masa sulit mbak Mawar, karena sejak saat itu mbak Mawar masuk dalam hukum paternalitas Bapak,



"Masa-masa itu masa sulit karena saya yang dulunya biasa dengan limpahan kasih sayang, dengan kemanjaan, ketika diasuh lagi dengan orang tua, orang tua saya... apalagi dia itu orang tua yang otoriter, ya saya mengalami seperti shock culture. Orang tua saya sangat disiplin, otoriter, dsb, sehingga saya yang dulunya dimanja, wah terserah apa kata saya, sekarang jadi apa kata orang tua"(Mbak Mawar)

Masuknya mbak Mawar dalam hukum sosial Bapak tampak pada peraturan yang dibertakukan di dalam keluarga yaitu tidak boleh memiliki hubungan khusus dengan lawan jenis sebelum sukses berkarir. Keterikatan yang sangat pada hukum sosial atau paternal Bapak ini ditunjukkan dengan sikap mbak Mawar yang melakukan perlawanan pada sang Bapak. Insiden ini adalah insiden terburuk dalam hidupnya,

"Pengalaman buruk yang tidak akan pernah saya lupakan itu adalah ketika puncak konflik antara saya dan bapak saya mengenai hubungan dengan laki-laki, pada waktu sekitar tahun 2000, waktu saya sedang semester awal di sastra, eh waktu itu saya menjalin hubungan dengan...ya pacaran lah... dengan si A, dan prinsip orang tua saya waktu itu sampek sekarang, anak-anaknya tidak boleh berhubungan dengan lawan jenis sebelum dia sukses...Bapak saya akhirnya mengajukan option yang itu jarang sekali dilontarkan, akhirnya dia memberi kesempatan pada saya : Apa sih mau kamu? Akhirnya saya ungkapkan apa sih yang saya inginkan, itu pengalaman buruk yang tidak pernah saya lupakan, karena yang jelas saat itu...huh...hati saya sangat sakit"(Mbak Mawar)

Seperti yang dikatakan Lacan, *Father as social Law*, Bapak adalah hukum sosial bagi anak-anaknya terutama anak perempuan. Mbak Mawar, saat itu tidak memiliki kemampuan metabahasa yang memadai sehingga selalu menimbulkan ketegangan-ketegangan baru dengan Bapak. Dan ketika masuk masa-masa pernikahan, mbak Mawar berpikir



dapat lepas dari hukum paternal bapak. Namun, mbak Mawar justru terjebak pada "ketuarga sucinya" Freud. Selanjutnya, mbak Mawar terjebak pada hukum paternal suaminya sendiri. Dan, inilah yang membuat mbak Mawar kembali mengalami ketidakmampuan metabahasa,

"Suami saya itu tipe orang yang...ya gitulah, ndak pernah bisa kita berbicara, kita omongkan gimana sih solusinya...ya dia itu sebenarnya menghindar untuk diajak diskusi"(Mbak Mawar)

Sisi lain dari subordinitas feminin tampak pada kemampuan metabahasa perempuan. Seperti tesis Luce Irigaray, bahwa laki-laki memiliki kemampuan metabahasa yang tidak dimiliki oleh perempuan. Dan ketidakmampuan metabahasa perempuan ini tampak pada proses negosiasi yang dilakukan perempuan pada pasangannya. Proses negosiasi itu meliputi negosiasi peran, baik perannya sebagai istri (wife) dan ibu rumah tangga (housewife).

Mbak Melati adalah seorang figur perempuan yang mandiri. Segala urusan rumah tangganya diserahkan pada pembantu (perempuan lagi) dan mbak Melati menyibukkan dirinya dengan mencari "nafkah". Mbak Melati pada akhirnya memasuki dunia kerja, dunia yang menurut Mariana Amiruddin<sup>1</sup> sebagai "dunia laki-laki yang terkungkung". Dengan pembagian kerja yang melelahkan, laki-laki harus selalu mencari nafkah sekalipun tak berbakat. Mbak Melati lambat laun setara dengan laki-laki, dan seperti yang dikhawatirkan Irigaray bahwa mbak Melati pada akhirnya

---

<sup>1</sup> Menulis tesis mengenai "Representasi Seksualitas Perempuan dalam Saman".



berpotensi menjadi laki-laki. Dan kondisi yang seperti ini hanya akan memapankan kanon maskulin. Mbak Melati bisa saja merepresentasikan "maskulinitasnya" dan melakukan posisionalitas psikis pada sifat-sifat feminin melalui pembantunya yang notabene perempuan. Inilah yang dimaksudkan Foucault, bahwa kuasa itu bersifat produktif dan laki-laki (secara biologis) bukan pemegang kekuasaan yang absolut.

Pada negosiasi sebagai istri (partnership and relationship), mbak Melati melakukan negosiasi-negosiasi lewat diskusi-diskusi dengan suami terutama sekali masalah anak. Namun, suami ternyata mengembangkan bahasa "kebungkaman". Dan bahasa "kebungkaman" sang suami dibalas dengan bahasa "kebungkaman" pula. Mbak Melati lebih memilih diam, karena ingin meminimalisasi konflik dengan suami,

"Pernah, gak....tapi diem, yo dirungokno, tapi gak ono solusi, tanggepannya dia gimana? Wes iku sak....contohne ngene, kita pindah rumah itu kita harus memindah anak-anak sekolah. Mari ngono....kene kan ndaftarne, wong loro kene, ternyata saat itung-itungan duit, de'e gak ngetokno duit.....aku gak pernah, wong de'e lek ditakoni, soko ngendi kok malah jarene, ngamuk eh.....akhere tak jarno ae, lo kok yamene soko ngendi ae? Laopo kon takok-takok?"(Mbak Melati)

Ketidakmampuan perempuan melakukan metabahasa, membuat laki-laki tidak dapat memahami hasrat perempuan. Bahasa "kebungkaman" mbak Melati membuat dominasi maskulinitas si suami semakin mapan. Dalam proses negosiasi tersebut, mbak Melati menginternalisasi nilai-nilai yang menurut logika phallosentris adalah sesuatu yang "pantas" dan normal. Misalnya ketika mbak Melati



menganggap pembagian peran yang logosentris tersebut sebagai sesuatu yang alami. Seperti yang dibahas Lacan tentang identitas 'maskulin' dan feminin yang sebenarnya tidak ilmiah, namun hasil retakan di dalam tatanan ilmiah. Kemiskinan 'ekonomi psikis' dan ketidakmampuan metabahasa mbak Melati telah membentuk subyektivitas femininnya yang phallosentris. Identitas 'feminin' yang phallosentris itu misalnya penerimaan hukum sosial atas peran perempuan sebagai 'manajer' rumah tangga, ibu yang peduli pada anak-anak, istri yang 'nrimo' keadaan suami, dan mungkin juga sifat-sifat 'bungkam' lainnya seperti bersabar dan menjadi sumber cinta bagi anak-anaknya,

"Tapi lek tidur yo mbek aku, anak-anak lek tidur yo mbek aku."  
(Mbak Melati)

Kegagalan mbak Melati dalam melakukan negosiasi, membuat mbak Melati mengalami kesulitan finansial. Bagi mbak Melati tidak ada pilihan lain selain bekerja. Seperti yang telah dibahas bersama Kristeva dan Cixous diatas, mbak Melati bekerja berarti memasuki dunia 'maskulin'. Dunia yang pada akhirnya hanya akan merepresentasikan subyektivitas pada logika spermatikos. Logika spermatikos inilah yang membuat mbak Melati menyerahkan pekerjaan domestiknya pada dua orang pembantu (perempuan). Tapi masuk dunia 'maskulin' tidak serta merta membuat mbak Melati menduduki posisi psikis yang setara dengan suami, mbak Melati tetap menjadi 'manajer' dalam pekerjaan domestik



tersebut. Perbedaannya hanyalah masalah teknis, mbak Melati secara kasat mata tidak menyentuh pekerjaan tersebut namun dalam tatanan simbolik mbak Melati lah yang menjalankan peran dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Jadi, sesungguhnya dalam tatanan simbolik mbak Melati tidak pernah mampu menegosiasikan perannya.

Sebenarnya kegagalan dalam tatanan simbolik ini telah dirasakan mbak Melati pada masa kanak-kanaknya yaitu ketika mbak Melati harus memaklumi saudara laki-lakinya untuk tidak bekerja membantu ibunya berjualan di toko,

"Yo, justru anake sing wedok-wedok seng ngrewangi dodol, arek lanang gak blas, dikongkon kulak'an malah anak-anak lakinya yang....."(Mbak Melati)

Ketidakmampuan metabahasa pada perempuan lainnya ditunjukkan pada kasus mbak Mawar. Bagi mbak Mawar, tidak satupun masalah keluarga yang sanggup diselesaikan bersama,

"Proses diskusinya ya mungkin karena pola pikir suamiku kayak gitu dan dia keras banget, kita itu sering, akhire eyel-eyelan dan ujungnya panas, nanti gak ketemu solusinya, dan masalah itu mengambang dan besok akan diulangi lagi, seperti itu lagi, itu karena pola pikirnya sangat patriarki sekali, aku sampek ngeyel-ngeyel, aku pernah sampek ngomong, "Mas lumrah kalau istrinya mas itu lulusan SD yang nggak tahu apa-apa gitu loh, tapi aku ini disekolahkan bapakku sampek kuliah, sedikit banyak tahulah tentang bagaimana suami-istri, laki-laki perempuan, menjalankan perannya itu gimana" (mbak Mawar)

Proses-proses negosiasi tersebut hanya berujung pada konflik dengan suami. Mbak Mawar tidak bisa melakukan perlawanan posisionalitasnya sebagai perempuan yang tersubordinasi secara nyata



dan simbolik. Mbak Mawar tetap sebagai istri dan ibu rumah tangga dalam pandangan phallogosentrisme.

"Melawan kekerasan itu...babak belur akhirnya. Benar dan itu sulit sekali, melalui perdebatan-perdebatan...akhere rame...akhere bertengkar....dsb"

Dari pembahasan mengenai negosiasi terutama negosiasi peran, peneliti mendapatkan sebuah gambaran bahwa perempuan karena semiotiknya yang direpresentasikan secara simbolik oleh maskulinitas mengalami kesulitan untuk mengembangkan kekhasan femininnya. Perempuan dalam kultur 'keluarga suci' telah terjebak pada peran domestik, bahkan secara simbolik. Walaupun perempuan mungkin bekerja atau memiliki akses ekonomi, perempuan secara simbolik hampir tidak melakukan perlawanan. 'Keluarga suci' ibarat sebuah labirin kekuasaan bagi perempuan. 'Keluarga suci' telah mengoedipalkan perempuan sebatas di ranah domestik, namun peneliti bukan bermaksud terjebak pada logika oposisi biner antara privat dan publik.

Berbicara mengenai 'keluarga suci' tidak bisa dilepaskan dari analisis pra-Oedipalnya Kristeva dan psikoanalisisnya Luce Irigaray. Salah satu tesis utamanya adalah bahwa bahasa dan sistem representasi tidak dapat mengekspresikan hasrat perempuan. Irigaray mempelajari bahasa skizofrenik laki-laki dan perempuan dan mengamati bahwa laki-laki memiliki kemampuan metabahasa yang tidak dimiliki oleh perempuan.

Perempuan korban kekerasan ekonomi, dalam kemampuan metabahasanya memang tidak memadai. Selain karena terjebak oleh



phallosentris, akses ekonomi memang lebih direpresentasikan oleh dunia maskulin. Tetapi dalam dunia ekonomi yang maskulin itu, hadirnya perempuan tetap lebih marjinal dari laki-laki, walaupun mungkin tidak semua perempuan marjinal secara nyata (karir, jabatan) namun secara simbolis, perempuan tetap diidentikkan dengan kekhasan femininnya (yang dianggap negatif). Perempuan memang bisa setara dengan laki-laki, dan dia akan menjadi sesuatu yang berpotensi menjadi laki-laki. Definisi patriarkal seperti inilah yang menurut Irigaray menyebabkan perempuan kehilangan sentuhannya dengan feminitas esensialnya yang terletak di dalam tubuh perempuan.

Bagi Irigaray tidak ada ruang bagi perlawanan di dalam pengertian 'tatanan simbolik', dan perempuan yang tidak merepresi sifat keperempuanannya yang sejati, tidak bisa memiliki akses untuk itu. Begitu juga dengan perempuan korban kekerasan ekonomi, mereka terjebak oleh bahasa, dalam dunia simbolik, dan bila mereka tidak merepresentasikan femininnya menurut definisi patriarkal mereka (terutama bagi mbak Melati yang sudah bercerai) tidak akan mendapat akses dalam dunia nyata.

Sebenarnya Irigaray ingin menawarkan sebuah interpretasi positif tentang tubuh perempuan, paling tidak mereka tidak lagi didefinisikan dari sudut kekurangannya (tidak lengkap, dsb). Bagaimana perempuan-perempuan korban kekerasan ini tidak lagi didefinisikan secara patriarkal, sehingga mereka bisa menemukan bahasanya sendiri dan menemukan identitas femininnya.



Irigaray menyarankan suatu sistem alternatif dimana ada ruang untuk perempuan membicarakan hasrat mereka sendiri. Tujuan akhir Irigaray adalah mendekonstruksi terhadap Phallosentrisme melalui penegasan sistem simbolik lainnya yang didasarkan atas kekhususan feminin perempuan.

Akhirnya, bagi perempuan korban kekerasan terutama kekerasan ekonomi, Cixous menyarankan adanya 'rumah bahasa' bagi perempuan. Sehingga perempuan tidak lagi melakukan negosiasi tanpa kemampuan metabahasa, dan supaya perempuan bisa diberi ruang untuk mengembangkan metabahasanya. Dan proses 'rumah bahasa' ini tidak bisa dilepaskan dari peran identitas pra-Oedipal. Identitas perempuan jangan lagi dibentuk lewat proses-proses yang misoginis. Perempuan harus dibebaskan dari labirin oedipus complex, seperti keinginan Deleuze-Guattari melalui revolusi hasrat perempuan. Karena anti-Oedipus Deleuze-Guattari dianggap sebagai perlawanan yang sungguh-sungguh pada ide Oedipus complex dan fokusnya pada "keluarga suci" yang terdiri dari "bapak-ibu dan saya". Ini karena Oedipus complex dianggap sebagai sebuah totalisasi ide, dan masyarakat harus dibebaskan darinya.

Inti dari anti-Oedipus adalah mengingatkan kita bahwa kita semua sudah teroedipal dan digilakan oleh keluarga kita semenjak sosialisasi proses dan akibatnya menjadi fasisme. Tujuan dari anti-Oedipat adalah untuk membebaskan kita dari ikatan ini dan membiarkan hasrat kita berkeliaran atau dengan kata lain "revolusi hasrat". Model seseorang yang



bebas dari ikatan oedipal, yang bebas berkeliaran adalah skizofrenik. Lebih umum lagi, apa yang diusahakan Deleuze-Guattari adalah subyektivitas kolektif, subyektivitas non fasis-anti-Oedipus.

Skizoanalisis Deleuze-Guattari akan membantu perempuan korban kekerasan ekonomi ini untuk membebaskan mesin hasratnya, karena hasrat dipandang sebagai kekuatan revolusioner. Ia adalah kekuatan eksplosif yang menyangsikan tatanan yang telah mapan.

Melalui proses revolusi hasrat ini, perempuan akan mampu mengembangkan metabahasanya, karena tidak lagi terjebak pada logika phallosentrisme lagi. Dan proses negosiasi peran perempuan tidak lagi hanya berujung pada 'kebungkaman' atau kebuntuan bagi kaum perempuan sendiri.



## BAB VIII

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 8.1 Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai definisi kekerasan, jenis kekerasan dan wacana-wacana dan mitos-mitos perempuan yang berkembang, peneliti melihat bahwa ternyata perempuan itu hanya hadir (terutama dalam serat Wararetno) dalam diskursus mengenai seksualitas dan 'keluarga suci'.

Dalam falsafah Jawa ketika kita bicara perempuan, maka yang ada hanyalah masalah orientasi seksualitas perempuan yang harus 'dijaga' atau lebih miripnya 'dikontrol'. Sedangkan dalam mitos perempuan modern, perempuan mengalami kekerasan secara simbolik. 'Keberhasilan' perempuan dalam dunia nyata, seringkali tidak merubah posisionalitas perempuan secara psikis atau dalam dunia simbolik. Karena simbolik telah direpresentasikan oleh "The Name Of The Father" atau atas nama ayah.

Perempuan korban kekerasan ekonomi, dalam kemampuan metabahasanya memang tidak memadai. Selain karena terjebak oleh phallosentris, akses ekonomi memang lebih direpresentasikan oleh dunia maskulin. Tetapi dalam dunia ekonomi yang maskulin itu, hadirnya perempuan tetap lebih marginal dari laki-laki, walaupun mungkin tidak semua perempuan marginal secara nyata (karir, jabatan) namun secara simbolis, perempuan tetap diidentikkan dengan kekhasan femininnya (yang dianggap negatif). Perempuan memang bisa setara dengan



laki-laki, dan dia akan menjadi sesuatu yang berpotensi menjadi laki-laki. Definisi patriarkal seperti inilah yang menurut Irigaray menyebabkan perempuan kehilangan sentuhannya dengan feminitas esensialnya yang terletak di dalam tubuh perempuan.

Hampir tidak ada ruang bagi perlawanan di dalam pengertian 'tatanan simbolik', dan perempuan yang tidak merepresi sifat keperempuanannya yang sejati, tidak bisa memiliki akses untuk itu. Begitu juga dengan perempuan korban kekerasan ekonomi, mereka terjebak oleh bahasa, dalam dunia simbolik, dan bila mereka tidak merepresentasikan femininnya menurut definisi patriarkal mereka (terutama bagi mbak Endang yang sudah bercerai) tidak akan mendapat akses dalam dunia nyata. Paling tidak mereka tidak lagi didefinisikan dari sudut kekurangannya (tidak lengkap, dsb). Bagaimana perempuan-perempuan korban kekerasan ini tidak lagi didefinisikan secara patriarkal, sehingga mereka bisa menemukan bahasanya sendiri dan menemukan identitas femininnya.

## 8.2 Saran

Menurut peneliti pembahasan mengenai kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan ekonomi harus lebih diperluas. Terutama dalam UU No.223 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, definisi kekerasan ekonomi harus diperluas. Perempuan sepertinya masih dipandang sebagai pihak yang marginal terhadap dunia ekonominya sendiri. Perempuan sepertinya dianggap sebagai pihak yang 'diberi' kekuasaan ekonomi oleh suami. Logika berpikir yang lebih



membebaskan hendaknya mulai di wacanakan terutama karena kekerasan sendiri terkadang yang tidak dianggap sebagai kekerasan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Brooks, Ann. *Postfeminisme and Cultural Studies : Sebuah Pengantar Paling Kompherensif*. Yogyakarta ; Jalasutra. 2004.

Foucault, Michel. *Sejarah Seks dan Kekuasaan/Michel Foucault oleh Jean-Louis Chevreau*; Alih Bahasa, Rahayu S. Hidayat. Jakarta ; Gramedia Pustaka Utama. 1997.

Grosz, Elizabeth. *A Feminist Introduction, Jacques Lacan*. Great Britain; Routledge. 1998.

Madan, Sarup. *Poststrukturalisme dan Posmodernisme, Sebuah Pengantar Kritis*. LKis.Yogyakarta.2003.

Ritzer, George. *Teori Sosial Posmodern*. Penerjemah, Muhammad Taufik. Yogyakarta ; Kreasi Wacana. Maret 2004.

Rusbiantoro, Dadang. *Bahasa Dekonstruksi dalam Artikel Foucault dan Derrida*. Editor, Dadang Rusbiantoro; Penyunting, Zahra Nihayati-cetakan 1. Yogyakarta ; Tiara Wacana. 2001.

Said, Edward William. *Bukan-Eropa : Freud dan Politik Identitas Timur Tengah*. Penerjemah, LP. Hok. Serpong ; Marjin Kiri. September 2005.

Scanzoni and Scanzoni. *Men, Women, and Change ; A Sociology of Marriage and Family*. McGraw-Hill, Inc, 1976.

Sinaga, Martin Lukito. *Identitas Poskolonial "Gereja Suku" dalam Masyarakat Sipil; Studi tentang Jaulung Wismar Saragih dan Komunitas Kristen Simalungun*. Yogyakarta; LKis. 2004

**Skripsi**

Novrita, Erlina Maya. *Konstruksi dan Respon Perempuan Korban Tindak Kekerasan*. Surabaya; Universitas Airlangga. 2000.

**Majalah**

*Media Perempuan*, edisi no.5, Mei 2005.

**Koran**

*Swara*, Kompas, 14 Maret 2005.

**Bulletin**

*SUARA APIK*, edisi no.25 dan 28, Th 2005.



**Nama : Febriana Firdaus**  
**NIM : 070116543**

**Guide Interview**  
**Perempuan Korban Kekerasan Ekonomi**  
**(Diskursus Mengenai Kekerasan dan Negosiasi Peran pada Perempuan Korban Kekerasan Ekonomi)**

**1. Identitas Informan**

- Nama
- Alamat
- Usia
- Pendidikan
- Pekerjaan
- Status perkawinan
- Anak
- Status tempat tinggal
- Penghasilan

**2. Life History Before Marriage**

- Masa balita
- Masa kanak-kanak
- Masa remaja
- Masa dewasa awal
- Menikah (proses)

**Dalam melakukan penggalan data, hal-hal lainnya yang perlu diketahui/ditanyakan**

- Pola asuh orang tua
- Pembagian kerja dalam rumah (sosialisasi nilai gender dalam keluarga)
- Lingkungan pergaulan (rumah, kerja, sekolah)
- Riwayat pendidikan
- Riwayat kerja
- Riwayat pendidikan
- Idola
- Hubungan dengan laki-laki
- Hobi/bacaan
- Cita-cita, harapan hidup
- Pengalaman yang tidak terlupakan (baik-buruk)

**3. Life History After Marriage**

- Tahun pertama pernikahan
- Pembagian kerja dalam rumah tangga
- Pembagian keuangan dalam rumah tangga
- Nilai-nilai yang dianut dalam rumah tangga
- Kerja (jika ada)
- Lingkungan pergaulan
- Aktivitas sosial yang dilakukan
- Media yang dikonsumsi
- Konflik-konflik yang pernah terjadi dalam rumah tangga

**4. Diskursus mengenai kekerasan**

- Definisi mengenai kekerasan
- Sejauh mana suatu hal dianggap sebagai sebuah kekerasan
- Macam-macam kekerasan

- Kekerasan terhadap perempuan (baik di area publik maupun privat)
- Kekerasan domestik
- Kekerasan ekonomi
- Melawan kekerasan

**5. Negosiasi peran**

Negosiasi peran yang dilakukan

